



LAPORAN KINERJA

*Direktorat Irigasi Pertanian
Tahun Anggaran 2024*



JL. Taman Margasatwa No.3 Ragunan
Jakarta Selatan



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2025

Inspektur I



Andry Asmara, SE, MM

NIP. 197312141994031001

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Irigasi Pertanian dalam penyelenggaraan program yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 selama kurun waktu satu tahun anggaran 2024. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas pencapaian kinerja perlu disusun Laporan Kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, maka ruang lingkup Laporan Kinerja memuat hal-hal terkait pencapaian tujuan/sasaran strategis kegiatan aspek irigasi pertanian berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu diharapkan saran dan masukan yang membangun dari semua pihak. Akhirnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2024 ini disampaikan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Februari 2025

Direktur,



Dhanir Gartina, S.Kom., M.T

NIP. 197901172002121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan Rancangan Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020-2024, program kerja Direktorat Irigasi Pertanian yaitu :

- 1) Terwujudnya pengembangan sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil, baik yang bersumber dari air tanah maupun air permukaan;
- 2) Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui kegiatan pengembangan jaringan air irigasi;
- 3) Terwujudnya kegiatan pengembangan irigasi rawa;
- 4) Terwujudnya upaya konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan efektif dan aliran permukaan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan;
- 5) Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) untuk mendorong pola pengelolaan irigasi partisipatif, serta terupdatednya data P3A sebagai bagian dari proses pembinaan usaha ekonomi dan pengembangan jaringan irigasi di tingkat usaha tani;
- 6) Pengembangan basis data sistem pengelolaan dan pemanfaatan air melalui inventarisasi, validasi, dan konsolidasi data dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan air serta peningkatan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi.

Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2024 telah dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang terdiri dari : masukan, keluaran dan hasil kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Sasaran kinerja aspek irigasi pertanian tahun 2024 yaitu: 1) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian dengan indikator kinerja tingkat pemenuhan lahan pertanian yang mendapat pengairan tercapai 39,80% (99,59%) dari target sebesar 39,96%. 2) Terwujudnya birokrasi Direktorat Irigasi Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima dengan indikator kinerja persentase capaian reformasi birokrasi tematik yang menjadi tanggungjawab Direktorat Irigasi Pertanian tercapai 60% (100%) dari target sebesar 60%.

Adapun kinerja serapan anggaran aspek Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian TA. 2024 dari target senilai sebesar Rp. 2.101.293.000.000,00 sampai dengan 31 Desember tahun 2024 telah teralisasi sebesar Rp 1.849.459.938.075,00 (88,02%), yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan Infrastruktur Irigasi Pertanian di daerah melalui tugas pembantuan dan dana pusat serta dukungan manajemen aspek Irigasi Pertanian.

Keberhasilan capaian kinerja aspek pengelolaan irigasi pertanian, karena adanya komitmen yang kuat antara petugas pengelola irigasi pertanian baik di pusat maupun daerah. Hambatan dan kendala yang dihadapi sampai pada akhir kegiatan diantaranya adalah : 1) Adanya revisi DIPA V yang terbit pada tanggal

3 April 2024 dimana muncul alokasi irigasi perpompaan melalui dana Tugas Pembantuan dan adanya anggaran belanja tambahan (ABT) untuk kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan melalui dana Tugas Pembantuan yang terbit pada tanggal 25 Juni 2024 dengan alokasi total irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan mencapai 15.339 unit, sehingga memerlukan tenaga ekstra untuk proses CPCL sampai dengan pencairan anggaran dan pelaksanaan fisik. 2) Untuk beberapa kegiatan di UPLAND yang melalui mekanisme kontraktual proses pelelangan membutuhkan waktu sehingga kurangnya antisipasi pelaksana menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda. 3) Kendala administratif seperti: rekening kelompok yang sudah tidak aktif, penulisan nama di rekening bank yang berbeda dan berbeda ejaan dengan nama kelompok tani yang terdaftar dll sehingga proses pencairan ke rekening kelompok mengalami keterlambatan, pergantian petugas menyebabkan perubahan penyelesaian administrasi keuangan, perubahan nomenklatur dinas, penyampaian laporan kegiatan secara detail melalui aplikasi MPO; 4) Masih terbatasnya basis data sistem pengelolaan dan pemanfaatan air sebagai dasar penentuan lokasi pengembangan irigasi pertanian sehingga sulitnya menetapkan lokasi prioritas untuk kegiatan termasuk sulitnya menetapkan lokasi yang sesuai dengan kriteria teknis. 5) Keterbatasan petugas pelaksana kegiatan, secara kuantitas maupun kualitas pada tingkat kabupaten dan provinsi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	3
1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia.....	6
1.5 Dukungan Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024	10
2.1.1 Visi.....	10
2.1.2 Misi.....	10
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	11
2.1.4 Arah Kebijakan	13
2.1.5 Rencana Aksi	15
2.1.6 Program dan Kegiatan	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.1.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran	18
3.1.2 Pencapaian Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian	18
3.1.2.1 Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pertanian Terhadap Total Kebutuhan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pertanian	18
3.1.2.2 Rasio Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang Dibina.....	19

3.1.2.3	Jumlah Pengembangan Sumber Air Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	20
3.1.2.4	Rasio Unit Konservasi Air untuk Penambahan Areal Tanam yang diberikan terhadap Total Kebutuhan 21	
3.1.2.5	Rasio Rekomendasi Iklim yang Dimanfaatkan	22
3.1.2.6	Tingkat Pemenuhan Lahan Pertanian yang Mendapat Pengairan	22
3.1.2.7	Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Tematik Yang Menjadi Tangungjawab Direktorat Irigasi Pertanian.....	24
3.1.3	Analisis Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian	25
3.1.3.1	Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pertanian Terhadap Total Kebutuhan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pertanian	25
3.1.3.2	Rasio Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang Dibina.....	27
3.1.3.3	Jumlah Pengembangan Sumber Air Untuk Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan	29
3.1.3.4	Rasio Unit Konservasi Air untuk Penambahan Areal Tanam yang Diberikan Terhadap Total Kebutuhan	32
3.1.3.5	Rasio Rekomendasi Mitigasi Iklim.....	35
3.1.3.6	Tingkat Pemenuhan Lahan Pertanian yang Mendapat Pengairan	37
3.1.3.7	Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Tematik Yang Menjadi Tangungjawab Direktorat Irigasi Pertanian.....	41
3.1.3.8	Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian.....	42
3.1.4	Analisis Capaian Kegiatan Pendukung Lainnya terhadap Aspek Irigasi Pertanian	44
3.1.5	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
3.1.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	46
3.1.6.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	46
3.1.6.2	Pengembangan Sumber Air	47

3.1.6.3 Konservasi Air	47
3.2 Realisasi Anggaran Kegiatan Irigasi Pertanian TA. 2024	48
3.3 Hambatan dan Kendala.....	51
3.4 Upaya dan Tindak Lanjut.....	52
BAB IV PENUTUP.....	54
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Distribusi Pegawai Direktorat Irigasi Pertanian Berdasarkan Pangkat dan Golongan	7
Tabel 2.	Distribusi Pegawai Direktorat Irigasi Pertanian Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir	7
Tabel 3.	Distribusi Pejabat Direktorat Irigasi Pertanian Eselon II, Analis PSP Madya, Analis PSP Muda dan Kasubbag TU Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Tabel 4.	Distribusi Pegawai Direktorat Irigasi Pertanian Berdasarkan Ruang Per Golongan.....	8
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2024	17
Tabel 6.	Capaian Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA. 2020-2024	27
Tabel 7.	Realisasi Kegiatan Pengembangan Sumber Air TA. 2024.....	30
Tabel 8.	Capaian Kegiatan Pengembangan Sumber Air TA. 2020-2024.....	31
Tabel 9.	Realisasi Kegiatan Konservasi Air TA. 2024	33
Tabel 10.	Capaian Kegiatan Konservasi Air TA. 2020-2024.....	34
Tabel 11.	Luas Layanan Kegiatan Irigasi Pertanian TA. 2024.....	38
Tabel 12.	Perhitungan Capaian Tingkat Pemenuhan Pemenuhan Pengairan Pada Lahan Pertanian TA. 2024	39
Tabel 13.	Capaian Tingkat Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian 2020-2024 Berdasarkan DIPA	40
Tabel 14.	Capaian Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian Berdasarkan RP JMN 2020-2024.....	41
Tabel 15.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	43
Tabel 18.	Realisasi Anggaran Kegiatan Irigasi Pertanian.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Irigasi Pertanian	2
Gambar 2. Grafik Capaian Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Periode TA. 2020-2024.....	27
Gambar 3. Grafik Capaian kegiatan Pengembangan Sumber Air TA. 2020- 2024	31
Gambar 4. Grafik Capaian Kegiatan Konservasi Air TA. 2020-2024	35
Gambar 5. Grafik Capaian Tingkat Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian Berdasarkan DIPA.....	40
Gambar 6. Grafik Capaian Tingkat Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian Berdasarkan RP JMN 2020-2024	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Jadwal Palang Rencana Aksi Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Irigasi Pertanian	57
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2024 58	
Lampiran 3.	Perhitungan Tingkat Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian Tahun 2020 sd 2024.....	62
Lampiran 4.	Realisasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier TA. 2024 (Dana Pusat)	63
Lampiran 5.	Data Capaian Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (Dana Tugas Pembantuan) TA. 2019-2023	67
Lampiran 6.	Sasaran Data Perkumpulan Petani Pemakai AIR (P3A)	73
Lampiran 7.	Rekap Data Profil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) TA. 2024	74
Lampiran 8.	Realisasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaaan TA. 2024	76
Lampiran 9.	Data Capaian Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaaan TA 2019 – 2023	83
Lampiran 10.	Realisasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaaran TA. 2024	89
Lampiran 11.	Data Capaian Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaaran TA 2019 – 2023	96
Lampiran 12.	Realisasi Konservasi Air berupa Irigasi Betekanan TA. 2024 ..	105
Lampiran 13.	Realisasi Konservasi Air Berupa Damparit TA. 2024	107
Lampiran 14.	Realisasi Konservasi Air Berupa Normalisasi Saluran TA. 2024.....	109
Lampiran 15.	Realisasi Konservasi Air Berupa Tata Air Mikro TA. 2024	109
Lampiran 16.	Data Capaian Kegiatan Konservasi Air Berupa Pengembangan Embung Pertanian (Dana TP) TA 2019 – 2023	110
Lampiran 17.	Rekomendasi Mitigasi Iklim TA. 2024	117
Lampiran 18.	Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier TA. 2024	119
Lampiran 19.	Dokumentasi Kegiatan Irigasi Perpompaaan TA. 2024.....	122
Lampiran 20.	Dokumentasi Kegiatan Irigasi Perpipaaran TA. 2024.....	124
Lampiran 21.	Dokumentasi Kegiatan Bangunan Konservasi Air TA. 2024 ...	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

NAWACITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.

Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: a) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, b) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta c) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

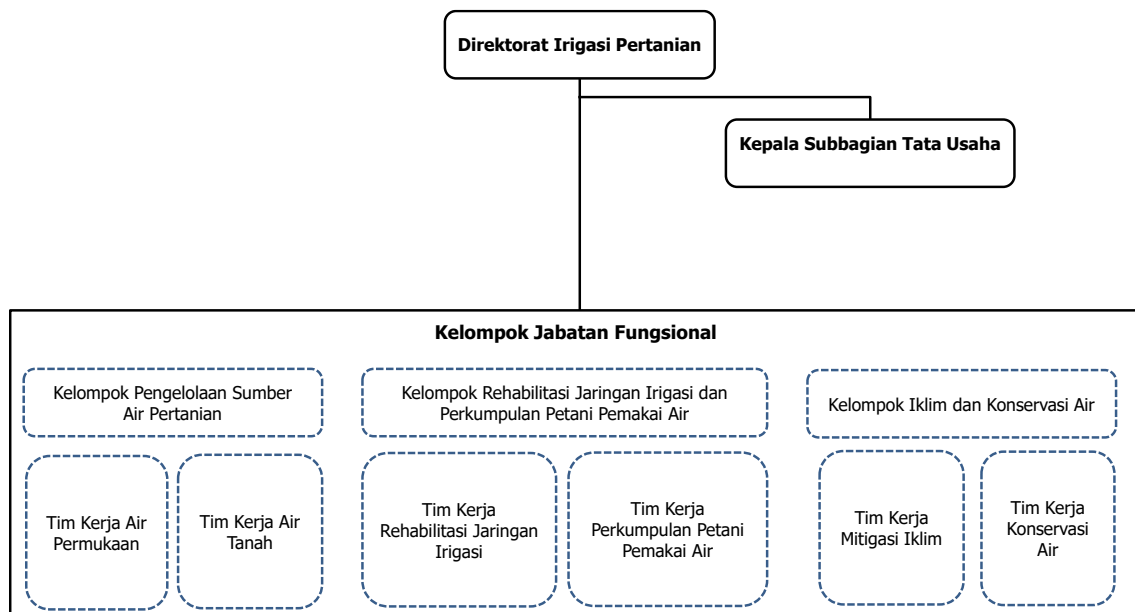
Untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut, prasarana dan sarana pertanian memiliki peranan yang penting sebagai penggerak pembangunan pertanian. Komponen prasarana dan sarana yang meliputi lahan, air/irigasi, bibit/benih, pupuk, pestisida, alsintan, investasi dan pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama kegiatan usahatani dan usaha lanjutannya. Terkait dengan peningkatan layanan irigasi, maka dilakukan upaya-upaya seperti: a) peningkatan fungsi prasarana; b) penerapan teknologi hemat air; c) peningkatan partisipasi masyarakat; d) pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A) melalui peningkatan kemampuan P3A dalam pengelolaan air irigasi dan produksi pertanian, pengelolaan irigasi secara partisipatif, pengembangan jejaring dan kemitraan P3A, e) pengembangan teknik pemanenan air dengan pengembangan embung dan pemanfaatan sumber air tanah dan air permukaan.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk kebijakan dan program Direktorat Irigasi Pertanian serta memenuhi

Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Irigasi Pertanian dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja aspek irigasi pertanian adalah adanya revisi DIPA dan adanya penambahan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) pada kegiatan irigasi pertanian.

1.2 Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Irigasi Pertanian

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air di lahan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber air pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pendampingan kelembagaan petani pemakai air di daerah irigasi pertanian, serta konservasi air; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.

Direktorat Irigasi Pertanian terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan dan kearsipan Direktorat Irigasi Pertanian.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI No. 278 Tahun 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, sebagai berikut :

a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Irigasi Pertanian terdiri atas:

- 1) Kelompok Pengelolaan Sumber Air Pertanian
 - a) Tim Kerja Air Permukaan
 - b) Tim Kerja Air Tanah
- 2) Kelompok Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air
 - a) Tim Kerja Rehabilitasi Jaringan Irigasi
 - b) Tim Kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air
- 3) Kelompok Iklim dan Konservasi Air
 - a) Tim Kerja Mitigasi Iklim
 - b) Tim Kerja Konservasi Air

b. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Kelompok Pengelolaan Sumber Air Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang air permukaan dan air tanah

a) Tim Kerja Permukaan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang air permukaan

b) Tim Kerja Air Tanah

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang air tanah

2) Kelompok Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan jaringan irigasi tersier dan perkumpulan petani pemakai air

a) Tim Kerja Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi jaringan irigasi

b) Tim Kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur dan

kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perkumpulan petani pemakai air

3) Kelompok Iklim dan Konservasi Air

a) Tim Kerja Mitigasi Iklim

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang mitigasi iklim

b) Tim Kerja Konservasi Air

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konservasi air

c. Keanggotaan

- 1) Kelompok substansi dan tim kerja lingkup Direktorat Irigasi Pertanian terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana
- 2) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Irigasi Pertanian meliputi jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Irigasi Pertanian
- 3) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Irigasi Pertanian per Desember 2024 mendapat dukungan sumber daya manusia sebanyak 46 (empat puluh enam) pegawai dengan status 45 Aparatur Sipil Negara dan 1 pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Sumber daya Direktorat Irigasi Pertanian tersusun secara sistematis untuk mendukung kelancaran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian.

Secara rinci jumlah pegawai Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2024 dengan status PNS dan PPPK dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Distribusi Pegawai Direktorat Irigasi Pertanian Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Golongan Pegawai				Total (org)
		IV	III	II	I	
1	Direktur	1		-	-	1
2	Kelompok Pengelolaan Sumber Air Pertanian	3	10	-	-	13
3	Kelompok Pengembangan Jaringan Irigasi dan P3A	2	9	-	-	11
4	Kelompok Iklim dan Konservasi Air	5	6	-	-	11
5	Tata Usaha	-	10	-	-	10
	Jumlah	11	35	-	-	46

Tabel 2. Distribusi Pegawai Direktorat Irigasi Pertanian Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir

No	Golongan	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP
1	I						
2	II						
3	III	1	6	21		7	
4	IV		11				
	Jumlah	1	17	21		7	

Tabel 3. Distribusi Pejabat Direktorat Irigasi Pertanian Eselon II, Analis PSP Madya, Analis PSP Muda dan Kasubbag TU Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	1		1
2	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya	1		1
3	Analis PSP Madya	2	3	5
4	Analis PSP Muda	8	6	14
5	Analis PSP Pertama	5	1	6
6	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	9
7	Pengolah Data dan Informasi	3	4	7
8	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1		1
9	Pengadministrasi perkantoran		1	1
10	Sekretaris Pimpinan		1	1
	Jumlah	28	18	46

Tabel 4. Distribusi Pegawai Direktorat Irigasi Pertanian Berdasarkan Ruang Per Golongan

No	Golongan	Ruang					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	I						
2	II						
3	III	4	14	1	16		35
4	IV	7	3		1		11
	Jumlah						46

1.5 Dukungan Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian

Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2024 sesuai DIPA Revisi Terakhir (Revisi DIPA XIV Desember 2024), sebesar Rp. 2.101.293.000.000,00 meliputi:

- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier : Rp. 127.425.000.000,00
- b. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim : Rp. 53.419.400.000,00
- c. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (MP Food Estate) : Rp. 7.000.000.000,00

d. Irigasi Perpompaaan	:	Rp. 1.193.980.000.000,00
f. Irigasi Perpipaan	:	Rp. 543.500.000.000,00
g. Koordinasi	:	Rp. 25.968.600.000,00
h. Dokumen Pinjaman Luar Negeri UPLAND	:	Rp. 150.000.000.000,00

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian dijabarkan dalam Rancangan Rencana Strategis Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2020 – 2024. Selanjutnya Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 diuraikan secara detail dalam Rencana Kerja Tahunan, sedangkan Rencana Kerja Tahunan Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2023 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh pihak pertama Direktur Irigasi Pertanian dan pihak kedua, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai wujud kontrak kinerja.

2.1 Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rancangan Rencana Strategis Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2020 – 2024 memuat program/kegiatan untuk mendukung terwujudnya Nawa Cita Kabinet Kerja periode 2020-2024. Rancangan Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan irigasi pertanian yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Irigasi Pertanian selama periode 2020-2024.

2.1.1 Visi

Sejalan dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka Visi Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan Direktorat Irigasi Pertanian Sebagai Motor Penggerak Tersedianya Air irigasi untuk Pertanian Secara Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan.

2.1.2 Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, Direktorat Irigasi Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi tingkat usaha tani yang terintegrasi dengan jaringan irigasi primer dan sekunder/DI serta pengembangan tata air mikro.
- b. Mendorong pengembangan dan pengelolaan sumber air untuk penambahan areal tanam tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan.
- c. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana irigasi di daerah lahan rawa lebak maupun pasang surut.
- d. Mendorong upaya-upaya konservasi air dan pengelolaan lingkungan usaha pertanian serta melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi sebagai antisipasi perubahan iklim global.
- e. Mendorong pemberdayaan dan penguatan masyarakat/petani pemakai air melalui penerapan pola irigasi partisipatif, upaya pemberdayaan kelembagaan petani, dan pengarusutamaan gender.
- f. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan pengelolaan irigasi pertanian berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pengelolaan Irigasi Pertanian tahun 2020 – 2024, adalah :

- a. Mewujudkan pengembangan sumber air irigasi alternatif dengan skala kecil, bersumber air tanah maupun air permukaan untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui pengembangan, rehabilitasi, dan optimalisasi air irigasi baik jaringan irigasi tingkat usahatani maupun jaringan irigasi pedesaan.
- c. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan air irigasi di lahan rawa, melalui pengembangan irigasi di lahan rawa lebak maupun pasang surut.

- d. Melaksanakan upaya pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air di 34 provinsi, dalam rangka meningkatkan posisi tawar petani sesuai Permentan No. 79 tahun 2012 serta melakukan update data P3A.
- e. Melakukan upaya konservasi air dan pengelolaan/pelestarian lingkungan usaha pertanian serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global.
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga (K/L) terkait dalam rangka memecahkan permasalahan dalam pengelolaan air, serta mendorong optimalisasi dana pembangunan serta fokus dalam pembangunan infrastruktur irigasi untuk pencapaian ketahanan pangan nasional.
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian dalam bidang teknis dan manajemen pengelolaan air.

Sasaran pelaksanaan pembangunan dan program kerja Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengembangan sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil, baik yang bersumber dari air tanah maupun air permukaan.
- b. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui kegiatan pengembangan jaringan irigasi.
- c. Terwujudnya kegiatan pengembangan irigasi rawa.
- d. Terwujudnya upaya konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan efektif dan aliran permukaan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta Pelaksanaan penyebaran informasi perubahan iklim dan pelaksanaan training adaptasi perubahan iklim.
- e. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) untuk mendorong pola pengelolaan irigasi partisipatif, serta ter updated nya data P3A sebagai bagian dari proses pembinaan usaha ekonomi dan pengembangan jaringan irigasi di tingkat usaha tani.

- f. Pengembangan basis data sistem pengelolaan dan pemanfaatan air melalui inventarisasi, validasi, dan konsolidasi data dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan air serta peningkatan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Direktorat Irigasi Pertanian, merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam rangka mendukung pembangunan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Kebijakan pembangunan prasarana sarana dari aspek ketersediaan air dan pengelolaan air untuk pertanian, melalui upaya pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil, adalah :

- a. Diprioritaskan pada kawasan kekeringan dengan mendayagunakan sumber air permukaan (sungai, danau, mata air, air bekas galian tambang dll) melalui pengembangan irigasi perpipaan/perpompaan, dan air tanah pada lapisan akuifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah dan dinaikkan kepermukaan sebagai sumber air irigasi.
- b. Pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil secara berkelanjutan dengan cara partisipatif.
- c. Meningkatkan jumlah ketersediaan air alternatif skala kecil melalui kerjasama dengan masyarakat maupun aparat TNI di perdesaan.

Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran optimasi pemanfaatan air irigasi, adalah:

- a. Peningkatan fungsi prasana dan sarana irigasi sampai pada tingkat usahatani secara efisien, optimal, dan dapat dikelola oleh petani secara partisipatif, baik di lahan sawah maupun rawa.
- b. Melibatkan partisipasi masyarakat, dalam pengelolaan irigasi tersier serta rehabilitasi dan perluasan irigasi tersier.

Kebijakan terkait dengan ketersediaan air pada kondisi terjadinya fenomena perubahan iklim, adalah:

- a. Memprioritaskan pembangunan sarana ketersediaan dan pengelolaan air melalui teknologi panen air (embung, dam parit dan *long storage*).
- b. Pengembangan teknologi pengelolaan air yang adaptif terhadap perubahan iklim (seperti irigasi tetes, berselang, *sprinkler* dll).
- c. Upaya adaptasi petani terhadap kondisi kekeringan dan banjir pada kawasan pertanian akibat dampak perubahan iklim melalui partisipasi masyarakat/petani dalam melakukan konservasi air dan menerapkan usaha tani hemat air.

Kebijakan yang terkait dengan peningkatan fungsi kelembagaan petani pemakai air (P3A) pada area tersier/ tingkat usaha tani adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan petani anggota dalam mengelola organisasi dan terkait dengan kegiatan pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif.
- b. Membangun sistem informasi/ database P3A melalui Inventarisasi, validasi, dan konsolidasi data dan informasi pemanfaatan dan pengelolaan air untuk kepentingan pembangunan/rehabilitasi jaringan untuk mendukung sistem ketahanan pangan nasional.
- c. Mendorong tumbuhnya kelembagaan petani pemakai air yang berfungsi sebagai operator dalam pemeliharaan jaringan irigasi partisipatif sesuai Permentan No. 79 tahun 2012.

Kebijakan pengelolaan air irigasi sangat terkait dengan pola koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan pemangku kepentingan lainnya juga perlu dilakukan baik internal Kementerian Pertanian maupun eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan atau pemerintah daerah.

2.1.5 Rencana Aksi

Dalam pencapaian sasaran strategis Direktorat Irigasi Pertanian telah disusun rencana aksi selama setahun sebagai berikut :

- a. Penerbitan pedoman teknis kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian;
- b. Sosialisasi Kegiatan;
- c. Verifikasi calon petani dan calon lokasi;
- d. Pengawasan pemberkasan dokumen Bantuan Pemerintah sampai dengan transfer dana;
- e. Pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan fisik;
- f. Pemantauan dan pengendalian secara periodik (triwulan);
- g. Evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Pelaporan.

Jadwal palang (*time line*) rencana aksi tersebut diatas dapat dilihat pada **lampiran 2**.

2.1.6 Program dan Kegiatan

Program Direktorat Irigasi Pertanian adalah: Pengembangan Sarana dan Prasarana/ Infrastruktur Pengelolaan Irigasi Pertanian, dengan indikator kinerja adalah:

- a. Tersedianya kebijakan di bidang irigasi pertanian;
- b. Tersedianya standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang irigasi pertanian;
- c. Terlaksananya bimbingan teknis di bidang irigasi pertanian;

- d. Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP) dan/atau produksi pertanian melalui peningkatan fungsi layanan irigasi;
- e. Meningkatnya luasan (Ha) areal pelayanan air irigasi pada area lahan pertanian baru.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Irigasi Pertanian dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung Program Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Selain itu, masing-masing Koordinator dan Subkoordinator memiliki perjanjian kinerja individu yang mendukung Perjanjian Kinerja Direktur Irigasi Pertanian.

Perjanjian Kinerja ini menjadi dokumen untuk mewujudkan capaian strategis Direktorat Irigasi Pertanian. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian, dengan target indikator kinerja yaitu tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian adalah sebesar 39,96% dan 2) Terwujudnya birokrasi direktorat irigasi pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan target indikator yaitu persentase capaian reformasi birokrasi tematik yang menjadi tanggungjawab direktorat irigasi pertanian adalah sebesar 60,00%.

Namun pada Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa target tingkat pemenuhan lahan pertanian yang mendapat pengairan untuk TA. 2024 adalah sebesar 42,76%. Target tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian pada Perjanjian Kerjasama Tahun 2024 mengalami perubahan sehingga tidak sesuai dengan target pada Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024. Hal ini disebabkan adanya perubahan anggaran/revisi DIPA pada Direktorat Irigasi Pertanian.

Target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian kinerja (PK) Direktorat Irigasi Pertanian

TA. 2024 dapat dilihat pada **Tabel 5** di bawah ini. Sedangkan Perjanjian kinerja Direktur Irigasi Pertanian TA. 2023 terlampir pada **Lampiran 2**.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Direktur Irigasi Pertanian			
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian	Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	%	39,96
	Terwujudnya birokrasi Direktorat Irigasi Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima	Persentase capaian reformasi birokrasi tematik yang menjadi tanggungjawab Direktorat Irigasi Pertanian	%	60,00
2	Kapoksi Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air			
		Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian terhadap total kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian	%	1,07
		Rasio P3A yang diberdayakan terhadap total P3A	%	1,30
3	Kapoksi Pengembangan Sumber Air			
		Jumlah pengembangan sumber air tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ha	208.425
4	Kapoksi Iklim dan Konservasi Air			
		Rasio unit konservasi air untuk penambahan areal tanam yang diberikan terhadap total kebutuhan	%	1,28
		Rasio rekomendasi mitigasi iklim yang dimanfaatkan	%	100,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu:

- a. Sangat Berhasil (capaian >100%),
- b. Berhasil (capaian 80-100%),
- c. Cukup Berhasil (capaian 60-79%), dan
- d. Kurang Berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.2 Pencapaian Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian

3.1.2.1 Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pertanian Terhadap Total Kebutuhan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pertanian

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah rehabilitasi irigasi tersier yang dilaksanakan pada tahun berjalan terhadap rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan. Jaringan tersier yaitu jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapannya. Rehabilitasi jaringan tersier merupakan kegiatan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/ meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga dapat mempertahankan, menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP).

Rasio pemenuhan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) ini dinilai berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dengan formula sebagai berikut :

$$x = \frac{\text{Total rehabilitasi jaringan irigasi}}{\text{Total rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan}} \times 100\%$$
$$x = \frac{\alpha}{\beta} \times 100\%$$

Keterangan :

x = Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan

α = Realisasi rehabilitasi jaringan irigasi tersier (ha)

β = Total kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi tersier (3.898.729 ha)

Total kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Pada tahun 2024 seluas 3.898.729 ha merupakan hasil dari pengurangan total kebutuhan jaringan pada tahun 2020 seluas 4.620.979 Ha dikurangi jumlah realisasi rehabilitasi jaringan irigasi tersier pada tahun 2020 sd 2023 seluas 722.250 Ha.

Untuk total Kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi tersier tahun 2020 sendiri merupakan hasil dari total kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi mendukung tanaman pangan/lahan sawah irigasi seluas 4.755.054 ha dikurangi jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier tahun 2020 seluas 134.075 Ha.

3.1.2.2 Rasio Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang Dibina

Rasio Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang dibina dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$x = \frac{\text{Jumlah P3A yang dibina}}{\text{Total P3A}} \times 100\%$$
$$x = \frac{\alpha}{\beta} \times 100\%$$

Keterangan :

x = Rasio Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang dibina

α = Jumlah P3A yang dibina (kelompok)

β = Total P3A (770 kelompok)

3.1.2.3 Jumlah Pengembangan Sumber Air Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

Indikator ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan unit bangunan pengembangan sumber air untuk areal pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang mendapat suplai air terhadap total luas areal pertanian. Jumlah unit pengembangan sumber air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diberikan berasal dari dana Tugas Pembantuan.

Pengukuran pencapaian kinerja dinilai berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber air yang mendukung sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan formula sebagai berikut :

$$x = a + b + c + d + e + f + g + h$$

Keterangan:

- x = Jumlah pengembangan sumber air tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
- a = Jumlah unit irigasi perpompaan yang dibangun untuk penambahan areal tanam tanaman pangan
- b = Jumlah unit irigasi perpipaan yang dibangun untuk penambahan areal tanam tanaman pangan
- c = Jumlah unit irigasi perpompaan yang dibangun untuk penambahan areal tanam hortikultura
- d = Jumlah unit irigasi perpipaan yang dibangun untuk penambahan areal tanam hortikultura
- e = Jumlah unit irigasi perpompaan yang dibangun untuk penambahan areal tanam perkebunan
- f = Jumlah unit irigasi perpipaan yang dibangun untuk penambahan areal tanam perkebunan
- g = Jumlah unit irigasi perpompaan yang dibangun untuk penambahan areal tanam peternakan
- h = Jumlah unit irigasi perpipaan yang dibangun untuk penambahan areal tanam peternakan

**Realisasi fisik irigasi perpompaan/perpipaan adalah realisasi fisik kegiatan dana TP*

3.1.2.4 Rasio Unit Konservasi Air untuk Penambahan Areal Tanam yang diberikan terhadap Total Kebutuhan

Indikator ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan unit bangunan konservasi air yang berupa embung/dam parit/long storage untuk penambahan areal tanam yang diberikan terhadap total kebutuhan. Jumlah unit bangunan konservasi air untuk penambahan areal pertanian yang diberikan berasal dari dana Tugas Pembantuan dan Pusat.

Luas lahan kering: 20.388.815 Ha, sudah tertangani selama rentang waktu TA. 2015 - 2019 seluas 314.815 Ha. Sisa lahan kering yang belum tertangani seluas 20.074.000 Ha (20 Juta Ha), dengan asumsi akan ditangani 50% (10 Juta Ha) melalui kegiatan embung. Maka total kebutuhan unit konservasi air yaitu 40.000 unit, yang diperoleh dari 10.000.000 Ha dibagi 25 Ha (25 Ha adalah luas layanan per unit embung).

Areal tanam yang dimaksud pada indikator ini adalah luas areal pertanian tanaman pangan, luas areal pertanian hortikultura, luas areal perkebunan dan luas areal peternakan.

Rasio pemenuhan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) ini dinilai berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan konservasi air dengan formula sebagai berikut :

$$x = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

- x = Rasio unit konservasi air untuk penambahan areal tanam yang diberikan terhadap total kebutuhan
- a = Jumlah unit konservasi air untuk penambahan areal pertanian yang diberikan
- b = Total kebutuhan unit konservasi air (40.000 unit).

(Asumsi luas lahan kering harusnya 20 juta Ha dengan kebutuhan embung untuk 10 juta Ha (50%), yaitu 10 juta dibagi 25 Ha per unit embung = 40.000 unit)

3.1.2.5 Rasio Rekomendasi Iklim yang Dimanfaatkan

Indikator ini bertujuan untuk memperoleh rekomendasi yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi terkait mitigasi iklim yang diberikan.

Formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$x = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

x = Rasio rekomendasi mitigasi iklim

a = Identifikasi rekomendasi mitigasi iklim yang dimanfaatkan

b = Identifikasi rekomendasi mitigasi iklim yang dihasilkan

Metode/cara pengambilan data adalah dengan melakukan survey terkait pemanfaatan rekomendasi mitigasi iklim. Survey dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi iklim yang dihasilkan.

Kata “dimanfaatkan” dalam Rasio rekomendasi iklim, yaitu rekomendasi ditindaklanjuti menjadi aktivitas mitigasi iklim oleh penerima rekomendasi. Sedangkan mitigasi adalah upaya memperlambat laju pemanasan global serta perubahan iklim melalui penurunan emisi (pancaran) GRK serta peningkatan penyerapan GRK.

3.1.2.6 Tingkat Pemenuhan Lahan Pertanian yang Mendapat Pengairan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur total luas lahan yang mendapat suplai air terhadap total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan.

Total lahan yang mendapat suplai air diperoleh dari jumlah lahan yang mendapat suplai air dari pengembangan jaringan irigasi tersier, pengembangan irigasi perpompaan, pengembangan irigasi perpipaan dan pengembangan embung pertanian dari tahun 2015 sampai dengan saat ini (tahun 2024).

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Lahan

pertanian ini adalah lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pengairan merupakan lahan pertanian yang mendapatkan suplai air. Suplai air ini bisa diperoleh dari pengembangan jaringan irigasi baru maupun rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan irigasi perpompaan, pengembangan irigasi perpipaian, dan embung pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian.

Tingkat pemenuhan lahan pertanian yang mendapat pengairan dapat diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$x = \frac{a}{b} x 100\%$$

Keterangan :

- x = Tingkat pemenuhan lahan pertanian yang mendapat pengairan (%)
- a = Identifikasi total lahan pertanian yang mendapat suplai air melalui jaringan irigasi (ha)
- b = Identifikasi total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan pertanian (11.904.564 Ha)

Penilaian berdasarkan 3 indikator kinerjanya yaitu:

- a. Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian
- b. Jumlah pembangunan bangunan konservasi air (irigasi bertekanan, normalisasi saluran dan dam parit)
- c. Jumlah pengembangan sumber air tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dan peternakan (irigasi perpompaan dan irigasi perpipaian)

Diketahui bahwa total luas lahan yang mendapat suplai air dari tahun 2015 sampai dengan 2023 adalah seluas 4.497.422 Ha, target realisasi kegiatan irigasi pertanian tahun 2024 adalah 259.742 Ha sehingga total lahan pertanian yang mendapat suplai air menjadi 4.757.164 Ha. Dari data tersebut maka dapat dihitung target tingkat pemenuhan lahan pertanian yang mendapat pengairan untuk Tahun 2024 sebagai berikut :

$$x = \frac{a}{b} x 100\%$$

Tingkat pemenuhan lahan pertanian yang mendapat suplai pengairan =

$$\frac{\text{Identifikasi total luas lahan yang mendapat suplai air}}{\text{Identifikasi total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{4.497.422 + 259.742}{11.904.564} \times 100\%$$

$$x = \frac{4.757.164}{11.904.564} \times 100\%$$

$$x = 39,96\%$$

Penjelasan total kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, total kebutuhan unit konservasi air, dan total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan pertanian dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

3.1.2.7 Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Tematik Yang Menjadi Tanggungjawab Direktorat Irigasi Pertanian

Fokus RB Tematik yang menjadi tanggungjawab Direktorat Irigasi Pertanian adalah pada pengentasan kemiskinan.

Indikator persentase capaian reformasi birokrasi tematik yang menjadi tanggungjawab Direktorat Irigasi Pertanian ini bertujuan untuk mengukur capaian indikator kemiskinan terhadap bobot target kemiskinan pada kegiatan Jaringan Irigasi Tersier yang direhabilitasi.

Direktorat Irigasi Pertanian	
Sasaran	: Terwujudnya Birokrasi Direktorat Irigasi Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima
Indikator	: Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Tematik yang Menjadi Tanggungjawab Direktorat Irigasi Pertanian
Keterangan	: Direktorat Irigasi Pertanian mengampu kegiatan Pengentasan Kemiskinan Eskترم pada RO Jaringan Irigasi Tersier Yang Direhabilitasi $\text{RB Tematik} = \frac{(\text{capaian indikator kemiskinan})}{(\text{bobot target kemiskinan})} \times 100\%$
Target	: 60%

Berdasarkan perhitungan diatas, target Persentase RB Tematik sebesar 60% diperoleh dari nilai capaian indikator kemiskinan (1,2) dibagi dengan nilai bobot target kemiskinan dengan (2) dan dikalikan 100%. Nilai capaian indikator kemiskinan dan nilai bobot target kemiskinan berdasarkan perhitungan dari Biro

Perencanaan dan Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementaerian Pertanian seperti dibawah ini (no.8):

No.	Unker/ Indikator	Range Nilai	2024			% CNRB
			Nilai Target	Nilai Bobot	Bobot Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
	Ditjen PSP			39	29,084	74,57%
1	Tingkat Maturitas SPIP (Biro KBMN)	1 - 5	3	4	2,4	Cascade
2	Nilai SAKIP (Biro Ren)	0 - 100	76	4	3,04	Cascade
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Biro KBMN)	0 - 100	89,5	2	1,79	Cascade
4	Capaian IKU (Biro Ren)	0 - 100	95	7	5,054	Cascade
5	Tindak Lanjut Rekomendasi (Itjen)	0 - 100	85	4	3,4	Cascade
6	Indeks BerAkhlik (Biro OK)	0 - 100	80	4	3,2	Cascade
7	Survei Penilaian Integritas (Itjen)	0 - 100	78	10	7,8	Cascade
8	Pengentasan Kemiskinan			2	1,2	
9	Pengendalian Inflasi			2	1,2	

3.1.3 Analisis Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian

Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian untuk mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana terkait penyediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan.

Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian diupayakan dengan pemenuhan pengairan lahan pertanian melalui kegiatan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi tersier; pengembangan sumber air untuk penambahan areal tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan.

Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024 terhadap periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

3.1.3.1 Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pertanian Terhadap Total Kebutuhan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pertanian

Rehabilitasi jaringan irigasi tersier merupakan kegiatan perbaikan/ penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Dengan direhabilitasinya jaringan

irigasi tersier, diharapkan manfaatnya/dampaknya dapat meningkatkan intensitas pertanaman (IP).

Pada tahun 2024 tercapai jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 1.663 unit atau seluas 41.575 Ha (100%) dari target 41.575 Ha.

Dengan demikian capaian rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan adalah :

$$x = \frac{\text{Total rehabilitasi jaringan irigasi}}{\text{Total rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{\alpha}{\beta} \times 100\%$$

$$x = \frac{41.575}{3.898.729} \times 100\%$$

$$x = 1,07 \%$$

Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang tercapai 1,07% dari target 1,07% (100%). Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, capaian ini termasuk dalam kategori “**Berhasil**” mencapai 100% dari target.

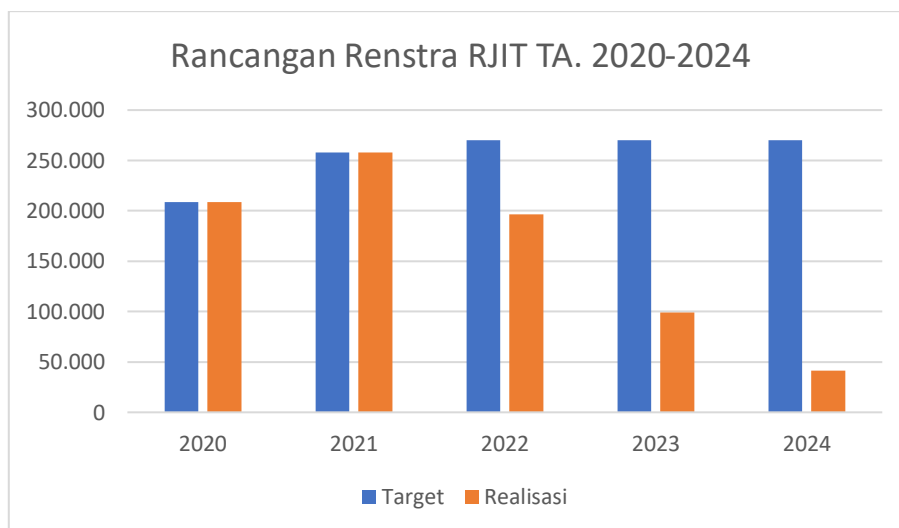
Pada TA. 2024 anggaran dana Tugas Pembantuan untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier tidak ada. Dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 terdapat anggaran dana tugas pembantuan untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sebanyak 12 unit senilai Rp. 900.000.000,00 dari target 12 unit (100%). Secara presentase realisasi anggaran tugas pembantuan tahun 2024 mengalami penurunan.

Sedangkan realisasi anggaran dari dana Banpem Pusat Tahun 2024 untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sebanyak 1.663 unit senilai Rp.124.725.000.000,00. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dengan realisasi sebanyak 1.016 unit senilai Rp. 76.200.000.000,00 maka terjadi kenaikan sebanyak 647 unit atau senilai Rp. 48.525.000.000,00 atau sebesar 63,68%.

Sementara itu jika dilihat dari pencapaian target rencana renstra 2020-2024 sebesar 1.276.264 Ha, mulai tahun 2020-2024 telah dilaksanakan seluas 803.627 Ha atau 62,97%, sehingga masih terdapat sisa target pengembangan jaringan Irigasi seluas 427.637 Ha.

Tabel 6. Capaian Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA. 2020-2024

Rancangan Renstra 2020-2024			
Tahun	Target	Realisasi	%
	(Ha)	(Ha)	
2020	208.812	208.602	99,90%
2021	257.800	257.800	100,00%
2022	269.884	196.550	72,83%
2023	269.884	99.100	36,72%
2024	269.884	41.575	15,40%
Total	1.276.264	803.627	62,97%



Gambar 2. Grafik Capaian Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Periode TA. 2020-2024

Realisasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier TA. 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 4**. Capaian Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 2019-2023 (5 tahun terakhir) dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

3.1.3.2 Rasio Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang Dibina

Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi (RJI) tidak lepas adanya peran kelembagaan perkumpulan petani

pemakai air di tingkat lapangan. Kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pengelolaan irigasi. Melalui partisipasi aktif dari anggota P3A, maka akan meningkatkan rasa kebersamaan, gotong-royong dan rasa tanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sarana irigasi yang dilakukan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan irigasi di tingkat usaha tani. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah juga berperan aktif untuk melakukan pembinaan kepada P3A dalam pengelolaan air irigasi. Pembinaan merupakan suatu proses fasilitasi pembelajaran untuk peningkatan kapasitas kelembagaan P3A yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pada tahun anggaran 2024, Direktorat Irigasi Pertanian dalam hal ini Tim Kerja Pemberdayaan Petani Pemakai Air telah melakukan pembinaan terhadap 10 P3A sesuai dengan tingkatannya, yaitu: P3A belum berkembang (pemula); P3A sedang berkembang (lanjut); dan P3A sudah berkembang (madya dan maju) yang bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan P3A yang kuat, mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat. Kegiatan pembinaan kelembagaan P3A tahun anggaran 2024 dilaksanakan di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, Sleman, Subang, Tasikmalaya, Magelang, Tanggamus, Sumbawa, dan Kota Palopo. Dari hasil pembinaan tersebut, didapatkan data dan informasi sebanyak 10 profil kelembagaan P3A sesuai dengan klasifikasi P3A.

Rasio P3A yang diberdayakan terhadap total P3A adalah

$$x = \frac{a}{b} x 100\%$$

$$x = \frac{10}{770} x 100\%$$

$$x = 1,30\%$$

Total P3A (770 kelompok) atau Sasaran Data Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Rasio perkumpulan petani pemakai air (P3A) yang dibina yang tercapai sebesar 1,30 % (100% dari target sebesar 1,30%), capaian ini termasuk dalam kategori

“**Berhasil**”. Data dan informasi sebanyak 10 profil kelembagaan P3A sesuai dengan klasifikasi P3A yang dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Informasi profil P3A akan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dipetak tersier, penentuan sasaran dan target produksi untuk pencapaian ketahanan pangan nasional, dan peningkatan peran petani dalam Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) serta dalam rangka ikut serta untuk mensukseskan program Jaringan Petani Nasional (JPN) Kementerian Pertanian dalam kaitan pembinaan dan pemberdayaan P3A.

3.1.3.3 Jumlah Pengembangan Sumber Air Untuk Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan

Pengembangan sumber air untuk penambahan areal tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan sumber air irigasi untuk usaha pertanian. Kegiatan ini dikembangkan melalui kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi irigasi pada lahan tadah hujan, daerah persawahan yang rawan kekeringan dan pertanaman eksisting yang terdampak kekeringan.

Total anggaran yang dilalokasikan untuk kegiatan Pengembangan Sumber Air Tahun 2024 melalui dana Tugas Pembantuan sebanyak 15.339 unit dengan anggaran sebesar Rp. 1.737.480.000.000,00, yang terdiri dari irigasi perpompaan sebanyak 9.904 unit dengan anggaran sebesar Rp.1.193.980.000.000,00 dan anggaran irigasi perpipaan sebanyak 5.435 unit dengan anggaran sebesar Rp. 543.500.000.000,00.

Capaian kegiatan pengembangan sumber air yang dibangun Tahun Anggaran 2024 melalui dana Tugas Pembantuan per 31 Desember 2024 sebanyak 13.691 unit (89,26%) senilai Rp. 1.547.726.817.232,00 (89,08%), yang terdiri dari kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Capaian kegiatan irigasi perpompaan sebanyak 9.487 unit (95,79%) senilai Rp. 1.130.994.634.127,00 (94,72%) yang tersebar di 33 propinsi 335 kabupaten.
- Capaian kegiatan irigasi perpipaan sebanyak 4.204 unit (77,35%) senilai Rp. 416.732.183.105,00 (76,68%) yang tersebar di 28 propinsi 236 kabupaten.

Tabel 7. Realisasi Kegiatan Pengembangan Sumber Air TA. 2024

No	Kegiatan	Unit	HA
1	Irigasi Perpompaan	9.487	148.310
2	Irigasi Perpipaan	4.204	42.040
	Total	13.691	190.350

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebanyak 7 unit (100%) senilai Rp. 1.177.866,300,00 (97,02%), sedangkan Tahun Anggaran 2024 dari target 15.339 unit unit senilai Rp. 1.737.480.000.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai 13.691 unit (89,26%) senilai Rp.1.547.726.817.232,00 (89,08%), Secara presentasi realisasi anggaran tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7,94%.

Jumlah pengembangan sumber air tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan:

$$x = a + b + c + d + e + f + g + h$$

$$x = 9.487 + 4.204 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0$$

$$x = 13.691$$

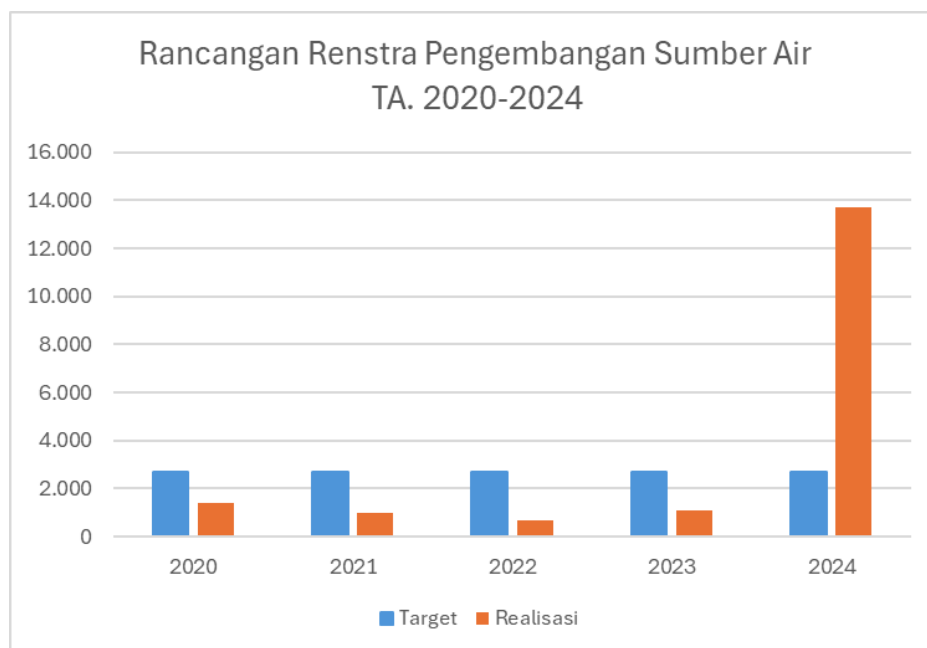
Jumlah pengembangan sumber air tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan tercapai 13.691 unit. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, capaian ini termasuk dalam kategori “**Berhasil**” mencapai 89,26% dari target.

Target kegiatan pengembangan sumber air dalam Renstra Ditjen PSP 2020-2024 sebanyak 13.500 unit. Apabila dibandingkan dengan target Renstra Ditjen

PSP 2020-2024, maka sampai dengan tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 17.805 unit atau 131,89%

**Tabel 8. Capaian Kegiatan Pengembangan Sumber Air
TA. 2020-2024**

Rancangan Renstra 2020-2024			
Tahun	Target (unit)	Realisasi (unit)	(%)
2020	2.700	1.384	51,26%
2021	2.700	972	36,00%
2022	2.700	696	25,78%
2023	2.700	1.062	39,33%
2024	2.700	13.691	507,07%
Total	13.500	17.805	131,89%



**Gambar 3. Grafik Capaian kegiatan Pengembangan Sumber Air
TA. 2020-2024**

Realisasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan TA. 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 8**, Data Capaian Kegiatan Realisasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan TA. 2019-2023 (5 tahun terakhir) dapat dilihat pada **Lampiran 9**, Realisasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan TA. 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 10** dan Data Capaian Kegiatan Pengembangan

Irigasi Perpipaan TA 2019 – 2023 (5 tahun terakhir) dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

3.1.3.4 Rasio Unit Konservasi Air untuk Penambahan Areal Tanam yang Diberikan Terhadap Total Kebutuhan

Konservasi air untuk penambahan areal pertanian dilaksanakan melalui kegiatan irigasi bertekanan, normalisasi saluran, damparit dan bangunan konservasi air mendukung *Food Estate* yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air di tingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi untuk komoditas pertanian dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani di musim kemarau.

Pada TA. 2024 target kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim (dana Bantuan Pemerintah Pusat) adalah sebagai berikut:

- Irigasi Bertekanan sebanyak 266 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.920.000.000,00
- Normalisasi Saluran sebanyak 33 Unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.960.000.000,00
- Damparit sebanyak 121 Unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.520.000.000,00
- Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (mendukung Food Estate sebanyak unit 58 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.960.000,000,00

Sampai dengan 31 Desember 2024, telah tercapai :

- Irigasi Bertekanan, realisasi fisik sebanyak 233 unit (87,59%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.394.969.000,00 (98,36%) yang tersebar di 16 provinsi dan 57 kabupaten.
- Normalisasi Saluran, realisasi fisik sebanyak 24 unit (72,73%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.695.000.000,00 (68,06%), yang tersebar di 7 provinsi dan 11 kabupaten/kota.

- Damparit, realisasi fisik sebanyak 100 unit (82,64%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.536.140.000,00 (86,34%), yang tersebar di 17 provinsi 37 kabupaten/kota.
- Bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim (mendukung *food estate*), realisasi fisik sebanyak 58 unit (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.960.000.000,00 (100%) di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas.

Tabel 9. Realisasi Kegiatan Konservasi Air TA. 2024

No.	Kegiatan	Unit	Ha
1	Irigasi Bertekanan	233	3.041
2	Damparit	100	2.239
3	Normalisasi Saluran	24	712
4	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim mendukung	58	2.320
	Total	415	8.312

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi Kegiatan Konservasi dana Banpem Pusat pada TA. 2023 sebanyak 499 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58.420.842.400,00 dan pada TA. 2024 realisasi sebanyak 415 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.586.109.000,00. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara presentase realisasi anggaran dana Banpem Pusat tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Namun untuk pada TA. 2024 tidak ada kegiatan konservasi air dari dana Tugas Pembantuan, sedangkan di TA. 2023 ada 3 unit bangunan konservasi air berupa embung yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan senilai Rp. 360.000.000,00.

Berdasarkan realisasi kegiatan konservasi air tersebut, berikut ini rasio unit konservasi air untuk penambahan areal tanam yang diberikan terhadap total kebutuhan:

$$x = \frac{a}{b} x 100\%$$

$$x = \frac{415}{40.000} x 100\%$$

$$x = 1,04 \%$$

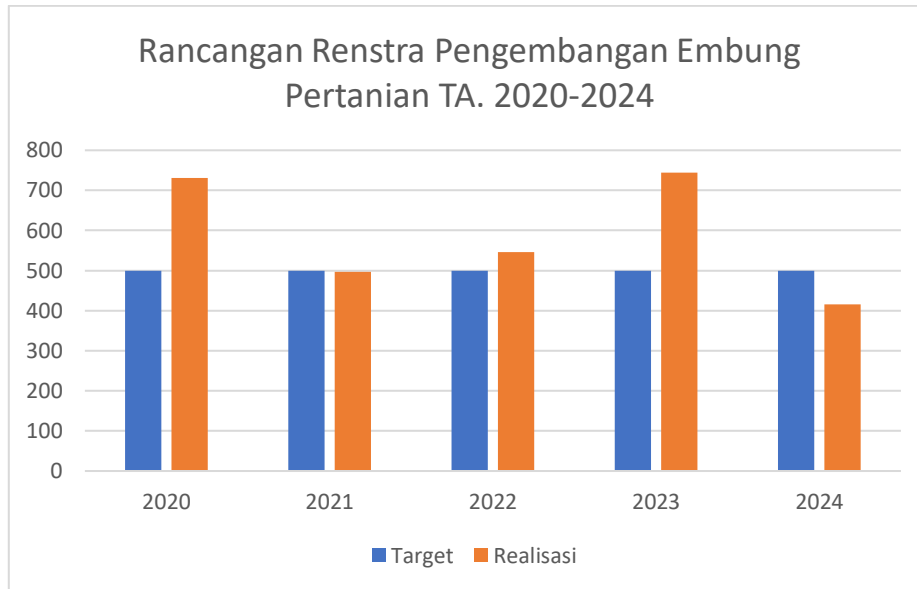
Rasio unit konservasi air untuk penambahan areal tanam yang diberikan terhadap total kebutuhan yang tercapai 1,04 % dari target 1,28 %. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, capaian ini termasuk dalam kategori “**Berhasil**” mencapai 81,09% dari target.

Realisasi Konservasi Air berupa Irigasi Bertekanan TA. 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 12**, Realisasi Kegiatan Konservasi Air berupa Damparit dapat dilihat pada **Lampiran 13**, Realisasi Kegiatan Konservasi Air berupa Normalisasi dapat dilihat pada **Lampiran 14**, Konservasi Air Mendukung FE berupa Tata Air Mikro dapat dilihat pada **Lampiran 15**. Realisasi Kegiatan Konservasi Air TA 2019-2022 (5 tahun terakhir) dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

Target kegiatan konservasi air pada Renstra Ditjen PSP 2020-2024 sebanyak 2.500 unit. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024, maka sampai dengan tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 2.933 unit atau 117,32%.

**Tabel 10. Capaian Kegiatan Konservasi Air
TA. 2020-2024**

Rancangan Renstra 2020-2024			
Tahun	Target	Realisasi (Ha)	(%)
	(Ha)		
2020	500	731	146,20%
2021	500	497	99,40%
2022	500	546	109,20%
2023	500	744	148,80%
2024	500	415	83,00%
Total	2.500	2.933	117,32%



Gambar 4. Grafik Capaian Kegiatan Konservasi Air TA. 2020-2024

3.1.3.5 Rasio Rekomendasi Mitigasi Iklim

Target kinerja Sub Kelompok Mitigasi Iklim TA. 2024 sesuai dengan perjanjian Kinerja adalah terwujudnya penerapan rekomendasi terkait mitigasi iklim. Dimana indikator kinerjanya adalah jumlah rekomendasi mitigasi iklim yang dihasilkan sebanyak 2 (dua) rekomendasi.

Saat ini, telah dihasilkan rekomendasi mitigasi iklim sebanyak 2 (dua) rekomendasi, sehingga rasio rekomendasi mitigasi iklim adalah :

$$x = \frac{a}{b} x 100\%$$

$$x = \frac{2}{2} x 100\%$$

$$x = 100\%$$

Secara rasio rekomendasi mitigasi iklim sudah sesuai target yaitu 100% dari target 100%. Jumlah rekomendasi yang ditargetkan 2 (dua) rekomendasi dan realisasi 2 (dua) rekomendasi.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio rekomendasi iklim TA.2023 terealisasi sebanyak 3 rekomendasi. Dan TA. 2024 sampai dengan

akhir Desember 2024, dari target 2 rekomendasi mitigasi iklim terealisasi sebanyak 2 rekomendasi (100%) secara presentase realisasi tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, capaian ini termasuk dalam kategori “Berhasil” karena telah mencapai 100%. Rekomendasi mitigasi iklim ini dapat dilihat pada Lampiran 17.

Berdasarkan capaian tersebut, diharapkan dampak perubahan iklim yang terjadi pada sektor pertanian di Indonesia, baik itu kejadian banjir atau kekeringan yang kadang tidak dapat di prediksi waktu kejadiannya terutama oleh petani dapat diantisipasi melalui adaptasi dan mitigasi iklim.

Keberhasilan aksi adaptasi perubahan iklim ini diharapkan dapat mengamankan kestabilan produksi pangan terutama padi. Diharapkan partisipasi semua pihak yang berkepentingan terhadap perubahan iklim dalam kebijakan dan program yang dilakukan pada di semua level.

Rekomendasi yang telah dihasilkan berupa: (1) Adaptasi dalam menyikapi awal musim kemarau, (2) Adaptasi dalam menyikapi awal musim hujan

Berikut 2 Rekomendasi Adaptasi Perubahan Iklim :

1. Adaptasi dalam menyikapi awal musim kemarau

- a. *Early warning system* dan rutin pantau informasi BMKG
- b. Pada wilayah yang mengalami awal musim kemarau pada Mei-Juli 2024 perlu ada persiapan pemanfaatan sumber-sumber air alternatif dan pemilihan komoditas yang sesuai.
- c. Pada wilayah yang diprediksi masih akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) perlu ada persiapan pemanfaatan sumber-sumber air alternatif.
- d. Pada wilayah yang tidak mengalami musim kemarau, berpeluang melakukan tanam lebih awal sekitar bulan September-Oktober 2024
- e. Untuk melakukan penjadwalan musim tanam menyesuaikan karakteristik klimatologi wilayah
- f. Pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi tersier/kuarter, gerakan panen air, teknologi hemat air
- g. Gunakan benih toleran kekeringan

- h. Memanfaatkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi yang sudah mendaftar

2. Adaptasi dalam menyikapi awal musim hujan

Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa awal musim hujan di Indonesia dimulai pada Bulan September 2024 dan diperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada Bulan Desember sd Januari 2024.

Dalam rangka menghadapi musim hujan danantisipasi terjadinya banjir/longsor, agar tidak mengganggu produksi pangan nasional, maka perlu segera dilakukan upaya-upaya antisipasi dan mitigasi. Untuk itu perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir/longsor akibat perubahan iklim,
- b. Memetakan daerah rawan banjir melalui pemantauan kondisi iklim harian yang datanya bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),
- c. Melakukan percepatan tanam pada daerah yang rawan banjir di Bulan Januari – Februari 2025 dan sudah memasuki musim hujan, dengan mengerahkan brigade alsintan dan prasarana pendukung seperti traktor, pupuk, benih dan lainnya untuk mempercepat proses pengolahan tanah dan tanam.
- d. Melakukan normalisasi saluran dan pembangunan tanggul penahan air,
- e. Menggunakan benih varietas tahan genangan air,
- f. Mendorong petani untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

3.1.3.6 Tingkat Pemenuhan Lahan Pertanian yang Mendapat Pengairan

Indikator kinerja Direktorat Irigasi Pertanian berupa Tingkat Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian TA. 2024 adalah 39,96%. Berdasarkan analisis capaian pada masing-masing kelompok kerja di atas, pada TA. 2024 diperoleh :

- Realisasi Rehabilitasi jaringan irigasi terdiri dari 1.663 unit (41.575 Ha)
- Pengembangan sumber air sebanyak 13.691 unit (190.350 Ha) yang terdiri irigasi perpompaan dari Tugas Pembantuan sebanyak 9.487 unit (148.310 Ha) dan irigasi perpipaan dari Tugas Pembantuan sebanyak 4.204 unit (42.020 Ha)
- Realisasi Konservasi Air sebanyak 415 unit yang terdiri dari: irigasi bertekanan sebanyak 233 unit, damparit sebanyak 100 unit, normalisasi saluran sebanyak 24 unit dan bangunan konservasi air dan antisipasi anomaly iklim mendukung food estate sebanyak 58 unit. Total luas layanan kegiatan konservasi air sebanyak 415 unit adalah **8.312 Ha**.

Tabel 11. Luas Layanan Kegiatan Irigasi Pertanian TA. 2024

No	Kegiatan	Realisasi	
		Unit	Ha
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1.663	41.575
2	Pengembangan Sumber Air	13.691	190.350
3	Bangunan Konservasi Air	415	8.312
	Total	15.769	240.237

Capaian total lahan pertanian yang mendapat suplai air sampai dengan tahun 2024 adalah seluas 4.497.422 Ha. Maka pada Tahun 2024, berdasarkan formula tingkat pemenuhan lahan pertanian yang mendapat suplai air dapat diperoleh tingkat pemenuhan lahan pertanian yang mendapa suplai air sebagai berikut :

$$x = \frac{a}{b} x 100\%$$

Tingkat pemenuhan lahan pertanian yang mendapat suplai pengairan =

$$\frac{\text{Identifikasi total luas lahan yang mendapat suplai air}}{\text{Identifikasi total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan}} x 100\%$$

$$x = \frac{4.497.422 + 240.237}{11.904.564} x 100\%$$

$$x = \frac{4.737.659}{11.904.564} x 100\%$$

$$x = 39,80\%$$

Perhitungan diatas dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 12. Tingkat Pemenuhan Pemenuhan Pengairan Pada Lahan Pertanian TA. 2024

No.	Kegiatan	Target		Realisasi	
		Unit	Ha	Unit	Ha
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (Pusat)	1.663	41.575	1.663	41.575
2	Pengembangan Irigasi Perpompaaan (TP)	9.904	99.040	9.498	148.310
3	Pengembangan Irigasi Perpipaan (TP)	5.435	54.350	4.204	42.040
4	Pengembangan Irigasi Bertekanan (Pusat)	266	2.660	233	3.041
5	Pengembangan Damparit (Pusat)	121	2.420	100	2.239
6	Normalisasi Saluran (Pusat)	33	1.650	24	712,3
7	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung Food Estate	58	2.320	58	2.320
(a)	Total Realisasi	17.480	204.015	15.780	240.237
(b)	Total luas lahan yg mendapat suplai air 2023				4.497.422
(c) = (a) + (b)	Total luas lahan yg mendapat suplai air 2024				4.737.659
(d)	Total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan pertanian (Ha)				11.904.564
(e) = (c) / (d)	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)				39,80

Capaian Tingkat Pemenuhan Pemenuhan Pengairan pada Lahan Pertanian TA. 2024 adalah 39,80% atau 99,59% dari target indikator kinerja 39,96%. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, maka capaian sebesar 99,59% termasuk dalam kategori “**Berhasil**”

Capaian tingkat pemenuhan pemenuhan pengairan pada lahan pertanian TA. 2024 sebesar 99,59% ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya di TA. 2023 sebesar 100,11% maka capaian indikator kinerja di TA. 2024 mengalami penurunan. Penurunan capaian tersebut dipengaruhi adanya kegiatan pengembangan irigasi perpompaaan/irigasi perpipaan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dan kegiatan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim yang tidak dapat terealisasi di beberapa daerah, yang disebabkan oleh:

- Beberapa dinas pertanian Kabupaten/Kota tidak anggup untuk melaksanakan kegiatan irigasi perpompaaan dan irigasi perpipaan karena Calon Petani Calon Lokasi/CPCL tidak memenuhi kriteria teknis berdasarkan hasil verifikasi

- Usulan realokasi kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan antar propinsi tidak disetujui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk kegiatan ABT
- Optimalisasi anggaran untuk kegiatan Alat dan Mesin Pertanian dengan melakukan revisi anggaran dari ABT Irigasi Perpompaan/Irigasi Perpipaan dan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tidak disetujui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Capaian tingkat pemenuhan pengairan pada lahan pertanian berdasarkan DIPA atau Perjanjian Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Capaian Tingkat Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian TA. 2020-2024 Berdasarkan DIPA

Tahun	Target	Realisasi	(%)
	(%)	(%)	
2020	31,68	32,31	101,99%
2021	34,62	34,09	98,48%
2022	36,79	36,26	98,57%
2023	37,74	37,78	100,11%
2024	39,96	39,80	99,59%



Gambar 5. Grafik Capaian Tingkat Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian Berdasarkan DIPA

Sedangkan capaian tingkat pemenuhan pengairan pada lahan pertanian berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14. Capaian Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian Berdasarkan RP JMN 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	(%)
	(%)	(%)	
2020	31,64	32,31	102,12%
2021	34,45	34,09	98,96%
2022	37,22	36,26	97,42%
2023	39,99	37,78	94,47%
2024	42,76	39,80	93,07%



Gambar 6. Grafik Capaian Tingkat Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian Berdasarkan RP JMN 2020-2024

3.1.3.7 Persentase Capaian Reformasi Birokrasi Tematik Yang Menjadi Tangungjawab Direktorat Irigasi Pertanian

Indikator persentase capaian reformasi birokrasi tematik yang menjadi tanggungjawab Direktorat Irigasi Pertanian dengan mengukur capaian indikator kemiskinan terhadap bobot target kemiskinan pada kegiatan Jaringan Irigasi Tersier yang direhabilitasi adalah 60%.

Pada TA. 2024 realisasi fisik kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier adalah 100% yaitu 1.636 unit dari target 1.636 unit, berdasarkan realisasi fisik 100% ini maka diperoleh capaian indikator kemiskinan sebesar 1,2 dengan nilai bobot untuk pengentasan kemiskinan adalah 2. Sehingga Direktorat Irigasi Pertanian mengampu kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada RO Jarinagn Irigasi Tersier yang direhabilitasi adalah :

$$RB \text{ Tematik} = \frac{(\text{capaian indikator kemiskinan})}{(\text{bobot target kemiskinan})} \times 100\%$$

$$RB \text{ Tematik} = \frac{1,2}{2} \times 100\%$$

$$RB \text{ Tematik} = 60\%$$

Capaian persentase capaian reformasi birokrasi tematik yang menjadi tanggungjawab Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2024 tercapai 60% dari target 60%. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, capaian ini termasuk dalam kategori "**Berhasil**" (capaian 100%).

3.1.3.8 Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian

Capaian tingkat pemenuhan pengairan pada lahan pertanian dan persentase capaian reformasi birokrasi tematik yang menjadi tanggungjawab Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	% Capaian Terhadap Target	Kesimpulan
1	Direktur Irigasi Pertanian						
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian	Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	%	39,96	39,80	99,59%	Berhasil
	Terwujudnya birokrasi Direktorat Irigasi Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima	Persentase capaian reformasi birokrasi tematik yang menjadi tanggungjawab Direktorat Irigasi Pertanian	%	60,00	60,00	100,00%	Berhasil
2	Kapoksi Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air						
		Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian terhadap total kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian	%	1,07	1,07	100,00%	Berhasil
		Rasio P3A yang diberdayakan terhadap total P3A	%	1,30	1,30	100,00%	Berhasil
3	Kapoksi Pengembangan Sumber Air						
		Jumlah pengembangan sumber air tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ha	208.425	190.350	91,33%	Berhasil
4	Kapoksi Iklim dan Konservasi Air						
		Rasio unit konservasi air dan LH untuk penambahan areal tanam yang diberikan terhadap total kebutuhan	%	1,28	1,04	81,09%	Berhasil
		Rasio rekomendasi mitigasi iklim yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00%	Berhasil

3.1.4 Analisis Capaian Kegiatan Pendukung Lainnya terhadap Aspek Irigasi Pertanian

Kegiatan pendukung lainnya terhadap aspek irigasi pertanian merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan aspek irigasi pertanian baik di pusat maupun daerah.

Pemanfaatan dana ini adalah untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), alat pengolah data, pertemuan/koordinasi, maupun perjalanan dinas dalam rangka bimbingan, monitoring dan evaluasi. Kontribusi dari kegiatan Dukungan Aspek Irigasi Pertanian adalah memperlancar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan aspek irigasi pertanian baik di pusat maupun daerah.

Dukungan ini berupa dana pada:

a. **Pendampingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pusat**

Untuk pendampingan Kegiatan RJIT Pusat telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.700.000,00, sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp 2.608.893.501,00 atau sebesar 96,93%.

b. **Operasional Kegiatan pada Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim**

Untuk Operasional Kegiatan pada Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.019.400.000,00, sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp 2.986.526.877,00 atau sebesar 98,91%.

c. **Operasional Kegiatan pada Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim mendukung Food Estate**

Untuk Operasional Kegiatan pada Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim mendukung Food Estate telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 40.000.000,00, sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp 29.198.840,00 atau sebesar 73,00%.

d. Koordinasi Lingkup Irigasi Pertanian

Untuk koordinasi lingkup irigasi pertanian telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 25.968.600,00 dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp 25.846.885.102,00 atau sebesar 99,53%.

e. Dokumen Pinjaman Luar Negeri UPLAND

Untuk Dokumen Pinjaman Luar Negeri UPLAND telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 150.000.000.000,00, sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp 91.950.507.523,00 atau sebesar 61,30%. Alokasi anggaran ini berupa dukungan manajemen untuk kegiatan UPLAND baik di pusat maupun di daerah.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Presentase Efisiensi Anggaran} = \left(100 - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\right)\%$$

Pada TA. 2024 pagu anggaran aspek irigasi pertanian Rp. 2.101.293.000.000,00 sampai 31 Desember 2024 telah teralisasi sebesar Rp. 1.849.459.938.075,00 yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan Infrastruktur Irigasi Pertanian di daerah melalui tugas pembantuan dan dana pusat serta dukungan manajemen aspek Irigasi Pertanian. Berikut efisiensi anggaran kegiatan irigasi pertanian :

$$\begin{aligned}\text{Presentase Efisiensi Anggaran} &= \left(100 - \frac{1.849.459.938.075}{2.101.293.000.000} \times 100\right)\% \\ &= (100 - 0,8802 \times 100)\% \\ &= 11,98\%\end{aligned}$$

Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi anggaran aspek irigasi pertanian adalah 11,98%.

Mekanisme pengelolaan anggaran pada pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan yang dilakukan secara Bantuan Pemerintah (Banpem), dapat diperoleh efisiensi penggunaan anggaran antara lain: 1) Tidak adanya unsur pengambilan keuntungan dari anggaran Banpem yang diserahkan, 2) Adanya potensi penambahan volume pekerjaan dari volume yang ditargetkan melalui swadaya masyarakat/ petani.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan aspek irigasi pertanian yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah :

3.1.6.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Alokasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dari dana Banpem Pusat sebanyak 1.663 unit dengan anggaran sebesar Rp. 124.725.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 124.725.000.000,00 (100,00%) dan realisasi fisik 1.663 unit (100%).

Hasil yang dicapai adalah tercapainya jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 1.663 unit atau seluas 41.575 Ha (100%) dari target 41.575 Ha yang tersebar yang tersebar di 28 propinsi dan 195 kabupaten.

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi (RJI) tidak lepas adanya peran kelembagaan perkumpulan petani pemakai air di tingkat lapangan. Kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pengelolaan irigasi. Melalui partisipasi aktif dari anggota P3A, maka akan meningkatkan rasa kebersamaan, gotong-royong dan rasa tanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sarana irigasi yang dilakukan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan irigasi di tingkat usaha tani. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah juga berperan aktif untuk melakukan pembinaan kepada P3A dalam pengelolaan air irigasi. Pembinaan merupakan suatu proses fasilitasi pembelajaran untuk peningkatan kapasitas kelembagaan P3A yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pada tahun anggaran 2024, Direktorat Irigasi Pertanian dalam hal ini Subkelompok Pemberdayaan Petani Pemakai Air telah melakukan pembinaan terhadap 10 P3A sesuai dengan tingkatannya, yaitu: P3A belum berkembang (pemula); P3A sedang berkembang (lanjut); dan P3A sudah berkembang (madya dan maju) yang bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan P3A yang kuat, mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat.

3.1.6.2 Pengembangan Sumber Air

Alokasi kegiatan Pengembangan Sumber Air Tahun 2024 melalui dana Tugas Pembantuan sebanyak 15.339 unit dengan anggaran sebesar Rp.1.737.480.000.000,00, yang terdiri dari irigasi perpompaan sebanyak 9.904 unit dengan anggaran sebesar Rp.1.193.980.000.000,00 dan anggaran irigasi perpipaan sebanyak 5.435 unit dengan anggaran sebesar Rp.543.500.000.000,00.

Realisasi keuangan senilai Rp.1.547.726.817.232 (89,08%) dan realisasi fisik 13.691 unit (89,26%), yang terdiri dari realisasi keuangan irigasi perpompaan senilai Rp. 1.130.994.634.127,00 (94,72%) realisasi fisik 9.487 unit (95,79%) dan realisasi keuangan irigasi perpipaan senilai Rp. 416.732.183.105,00 (76,68%) realisasi fisik 4.204 unit (77,35%). Hasil yang dicapai adalah terbangunnya pengembangan sumber air berupa irigasi perpompaan sebanyak 9.487 unit yang tersebar yang tersebar di 33 propinsi dan 335 kabupaten, serta irigasi perpipaan sebanyak 4.204 unit yang tersebar di 28 provinsi 236 kabupaten.

3.1.6.3 Konservasi Air

Alokasi Kegiatan Konservasi Air pada Tahun 2024 sebesar Rp. 60.419.400.000,00 yang terdiri dari Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali iklim melalui kegiatan Irigasi Bertekanan sebesar Rp. 31.920.000.000,00, kegiatan Damparit sebesar Rp. 14.520.000.000,00 dan kegiatan Normalisasi Saluran sebesar Rp. 3.960.000.000,00 dan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung Food Estate sebesar Rp. 7.000.000.000,00.

Realisasi keuangan Konservasi Air sebesar Rp. 56.601.834.717,00 (93,68%) dan realisasi fisik 415 unit (86,82%) dari target 478 unit yang terdiri dari irigasi bertekanan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.394.969.000,00 (98,36%) dan fisik 233 unit (87,59%), damparit dengan realisasi keuangan Rp. 12.536.140.000,00 (86,34%) realisasi fisik 100 unit (82,64%) dan normalisasi saluran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.695.000.000,00 (68,06%) dengan realisasi fisik 24 unit (72,73%) dan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung Food Estate (Tata Air Mikro) sebesar Rp. 6.989.198.840,00 (99,85%) dengan realisasi fisik 58 unit (100%).

Hasil yang dicapai adalah terbangunnya bangunan konservasi air berupa irigasi bertekanan sebanyak 233 unit yang tersebar di 16 propinsi dan 57 kabupaten, normalisasi saluran sebanyak 24 unit yang tersebar di 7 propinsi 11 kabupaten, damparit sebanyak 100 unit yang tersebar di 17 provinsi 37 kabupaten dan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim mendukung *food estate* sebanyak 58 unit di kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

3.2 Realisasi Anggaran Kegiatan Irigasi Pertanian TA. 2024

Anggaran Aspek Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian TA. 2024 sebesar Rp. 2.101.293.000.000,00. dan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024 telah teralisasi sebesar Rp 1.849.459.938.075,00 (88,02%) yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan Infrastruktur Irigasi Pertanian di daerah melalui tugas pembantuan dan dana pusat serta dukungan manajemen aspek Irigasi Pertanian.

Tabel 16. Realisasi Anggaran Kegiatan Irigasi Pertanian

No	KEGIATAN	PAGU REFOCUSING		REALISASI							
		ALOKASI		Rp		KEUANGAN			FISIK		
		Unit	Rp	Unit	Rp	%	Unit	Unit	%		
1	1794RDK - Rehabilitasi Jaringan Irigasi	1.663	Unit	127.425.000.000	1.663	Unit	127.333.893.501	99,93%	1.663	Unit	100,00%
	- RJIT Pusat	1.663	Unit	124.725.000.000	1.663	Unit	124.725.000.000	100,00%	1.663	Unit	100,00%
	- Pendampingan RJIT Pusat	1	Keg	2.700.000.000			2.608.893.501	96,63%			
2	1794RBK - Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	420	Unit	53.419.400.000	357	Unit	49.612.635.877	92,87%	357	Unit	85,00%
	- Persiapan	1	Keg	2.556.900.000		Keg	2.546.638.349	99,60%			
	- Irigasi Bertekanan	266	Unit	31.920.000.000	233	Unit	31.394.969.000	98,36%	233	Unit	87,59%
	- Normalisasi Saluran	33	Unit	3.960.000.000	24	Unit	2.695.000.000	68,06%	24	Unit	72,73%
	- Damparit	121	Unit	14.520.000.000	100	Unit	12.536.140.000	86,34%	100	Unit	82,64%
	- Operasional (Monev)			462.500.000			439.888.528	95,11%			
3	1794RBK - Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (MP Food Estate)	58	Unit	7.000.000.000	58	Unit	6.989.198.840	99,85%	58	Unit	100,00%
	- Pelaksanaan Kegiatan (Kontruksi)	58	Unit	6.960.000.000	58	Unit	6.960.000.000	100,00%	58	Unit	100,00%
	- Operasional	1	Keg	40.000.000	-		29.198.840	73,00%			
4	1794RBK - IRIGASI PERPOMPAAN	9.904	Unit	1.193.980.000.000	9.487	Unit	1.130.994.634.127	94,72%	9.487	Unit	95,79%
	- Pendukung (operasional)			76.808.800.000			62.223.164.127	81,01%			
	- Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpompaaan	9.904	Unit	1.117.171.200.000	9.487	Unit	1.068.771.470.000	95,67%	9.487	Unit	95,79%
5	1794RBK - IRIGASI PERPIPAAN	5.435	Unit	543.500.000.000	4.204	Unit	416.732.183.105	76,68%	4.204	Unit	77,35%
	- Pendukung (operasional)			32.610.000.000			21.689.603.105	66,51%			
	- Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpipaian	5.435	Unit	510.890.000.000	4.204	Unit	395.042.580.000	77,32%	4.204	Unit	77,35%
6	1794AEA - Koordinasi	1	Keg	25.968.600.000		Keg	25.846.885.102	99,53%			
7	1794BDD - Dokumen Pinjaman Luar Negeri UPLAND	1	Keg	150.000.000.000		Keg	91.950.507.523	61,30%			
	- UPLAND Pusat	1	Keg	112.321.900.000	-	Keg	56.760.747.685	50,53%			
	- UPLAND Daerah	1	Keg	37.678.100.000	-	Keg	35.189.759.838	93,40%			
	TOTAL			2.101.293.000.000			1.849.459.938.075	88,02%			

Adapun realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian (sesuai target PK Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2024) dengan rincian sebagai berikut :

a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Realisasi Anggaran Kegiatan Rehabilitasi jaringan irigasi Tersier pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 127.333.893.501,00 (99,93%) dari target Rp 127.425.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Capaian anggaran ini termasuk dalam kategori "**Berhasil**".

b. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

Realisasi Anggaran Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 49.612.635.877,00 (92,87%) dari target Rp. 53.419.400.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 85,00%. Capaian anggaran ini termasuk dalam kategori "**Berhasil**".

c. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (MP Food Estate)

Realisasi Anggaran Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (MP Food Estate) pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.989.198.840,00 (99,85%) dari target Rp. 7.000.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Capaian anggaran ini termasuk dalam kategori "**Berhasil**".

d. Irigasi Perpompaan

Realisasi Anggaran Kegiatan Irigasi Perpompaan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.130.994.634.127,00 (94,72%) dari target Rp.1.193.980.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 95,79%. Capaian anggaran ini termasuk dalam kategori "**Berhasil**".

e. Irigasi Perpipaan

Realisasi Anggaran Kegiatan Irigasi Perpipaan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 416.732.183.105,00 (76,68%) dari target

Rp. 543.500.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 77,35%. Capaian anggaran ini termasuk dalam kategori “**Cukup Berhasil**”.

f. Koordinasi Lingkup Irigasi Pertanian

Realisasi Anggaran Koordinasi Lingkup Irigasi Pertanian pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 25.846.885.102,00 (99,53%) dari target Rp 25.968.600.000,00. Capaian anggaran ini termasuk dalam kategori “**Berhasil**”.

g. Dokumen Pinjaman Luar Negeri UPLAND

Realisasi Anggaran Dokumen Pinjaman Luar Negeri UPLAND pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 91.950.507.523,00 (61,30%) dari target Rp. 150.000.000.000,00 capaian ini termasuk dalam kategori “**Cukup Berhasil**”.

3.3 Hambatan dan Kendala

Pelaksanaan kinerja aspek irigasi pertanian sampai dengan akhir tahun 2024 masih mengalami hambatan/kendala, sehingga pencapaian target sasaran strategis belum sepenuhnya tercapai.

Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 agar dapat disempurnakan untuk kegiatan TA. 2025.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

a. Kendala Non Teknis

- 1) Adanya revisi DIPA V yang terbit pada tanggal 3 April 2024 dimana muncul alokasi irigasi perpompaan melalui dana Tugas Pembantuan dan adanya penambahan ABT untuk kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan melalui dana Tugas Pembantuan yang terbit pada tanggal 25 Juni 2024 (alokasi total irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan mencapai 15.339 unit), sehingga memerlukan tenaga ekstra untuk proses CPCL sampai dengan pencairan anggaran dan pelaksanaan fisik.

- 2) Untuk beberapa kegiatan di UPLAND yang melalui mekanisme kontraktual proses pelelangan membutuhkan waktu sehingga kurangnya antisipasi pelaksana menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda.
- 3) Kendala administratif seperti :
 - rekening kelompok yang sudah tidak aktif, penulisan nama di rekening yang berbeda dan berbeda ejaan dengan nama kelompok tani yang terdaftar dll sehingga proses pencairan ke rekening kelompok mengalami keterhambatan.
 - pergantian petugas menyebabkan perubahan penyelesaian administrasi keuangan, perubahan nomenklatur dinas, penyampaian laporan kegiatan secara detail melalui aplikasi MPO

b. Kendala Teknis

- 1) Masih terbatasnya basis data sistem pengelolaan dan pemanfaatan air sebagai dasar penentuan lokasi pengembangan irigasi pertanian sehingga sulitnya menetapkan lokasi prioritas untuk kegiatan termasuk sulitnya menetapkan lokasi yang sesuai dengan kriteria teknis.
- 2) Keterbatasan petugas pelaksana kegiatan, secara kuantitas maupun kualitas pada tingkat kabupaten dan provinsi.

3.4 Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka diperlukan supaya tindak lanjut dan tindakan antisipatif ke depan sebagai berikut :

a. Aspek Non Teknis

- 1) Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang intensif.
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk sinergitas pelaksanaan kegiatan.
- 3) Meningkatkan sistem monitoring dengan instrumen yang lebih sesuai untuk pendataan sesuai kebutuhan.

- 4) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota.
- 5) Mengoptimalkan sistem pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini.

b. Aspek Teknis

- 1) Melakukan koordinasi lintas kementerian (Kemenko Bidang Perekonomian, Bappenas, kementerian PUPR, Pemda, dan Kementan) untuk mensinergikan perencanaan pengelolaan irigasi dalam mendukung swasembada pangan.
- 2) Meningkatkan pembinaan untuk pelaksanaan kegiatan teknis sesuai pedoman yang telah ditentukan dan RUKK yang telah dibuat. Apabila ada perubahan, agar dapat segera merevisi RUKK.
- 3) Meningkatkan persiapan antisipatif terhadap pengaruh iklim dalam pelaksanaan kegiatan, dengan mengatur rencana pelaksanaan seefektif mungkin.
- 4) Dalam pembinaan ke daerah menekankan agar identifikasi calon petani dan calon lokasi dapat dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga proses penyelesaian administrasi kegiatan dapat dipercepat.

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Irigasi Pertanian, maka dalam rangka mendukung pencapaian swasembada pangan sesuai Nawa Cita, kegiatan pengelolaan air irigasi merupakan kegiatan pendukung usaha pertanian khususnya tanaman pangan dalam penyediaan air irigasi.

Pencapaian sasaran strategis Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2024 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja aspek pengelolaan irigasi pertanian tahun 2024 yaitu : 1) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian dengan indikator kinerja tingkat pemenuhan lahan pertanian yang mendapat pengairan tercapai 39,80% (99,59%) dari target sebesar 39,96%. 2) Terwujudnya birokrasi Direktorat Irigasi Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima dengan indikator kinerja persentase capaian reformasi birokrasi tematik yang menjadi tanggungjawab Direktorat Irigasi Pertanian tercapai 60% (100%) dari target sebesar 60%.

Adapun kinerja serapan anggaran aspek Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian TA. 2024 dari target senilai sebesar Rp. 2.101.293.000.000,00 sampai dengan 31 Desember tahun 2024 telah teralisasi sebesar Rp 1.849.459.938.075,00 (88,02%), yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan Infrastruktur Irigasi Pertanian di daerah melalui tugas pembantuan dan dana pusat serta dukungan manajemen aspek Irigasi Pertanian.

Sebagai upaya untuk perbaikan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ke depan, maka perlu dilakukan langkah nyata mulai dari proses perencanaan hingga implementasi pelaksanaan kegiatan di lapang melalui: 1) Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, 2) Peningkatan sosialisasi, pembinaan dan pengawalan mulai dari pemberkasan banuan pemerintah, penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), transfer dana dan pelaksanaan konstruksi, 3) Peningkatkan sistim monitoring dan

pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini serta 4) Peningkatan koordinasi dan dukungan seluruh stakeholders baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian, dan 5) Peningkatan tindakan preventif dan antisipasi terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Palang Rencana Aksi Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Irigasi Pertanian

No	Jenis Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1	Penerbitan Pedoman Teknis Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian	■											
2	Sosialisasi Kegiatan	■	■	■	■	■	■						
3	Verifikasi calon petani dan calon lokasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4	Pengawasan Pemberkasan Dokumen Bantuan Pemerintah sampai dengan Transfer Dana		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Pelaksanaan Kegiatan Fisik			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Pemantauan dan Pengendalian secara Periodik (Triwulan)			■			■			■			■
7	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Pelaporan					■	■	■	■	■	■	■	■

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Irigasi Pertanian Tahun 2024

1. Perjanjian Kinerja Awal Sesuai Renstra 2020-2024

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550 TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083</p>	 
<hr/> PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>		
<p>Nama : Rahmanto Jabatan : Direktur Irigasi Pertanian Selanjutnya disebut pihak pertama</p>		
<p>Nama : Ali Jamil Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p>		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>		
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
<p>Jakarta, Desember 2023</p>		
<p>Pihak Kedua</p>		<p>Pihak Pertama</p>
		
<p>Ali Jamil</p>		<p>Rahmanto</p>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian	1-1	Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	39,26 %

KEGIATAN

1 Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

ANGGARAN

Rp. 734.452.280.000,-

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Ali Jamil



Rahmanto

2. Perjanjian Kinerja Sesuai DIPA TA. 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dhani Gartina
Jabatan : Direktur Irigasi Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Nur Alam Syah
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua

Andi Nur Alam Syah

Pihak Pertama

Dhani Gartina

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian	1-1	Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	39,96 %
2	Terwujudnya birokrasi Direktorat Irigasi Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	1-1	Persentase capaian reformasi birokrasi tematik yang menjadi tanggung jawab Direktorat Irigasi Pertanian	60,00%

KEGIATAN
1 Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

ANGGARAN
Rp. 2.101.293.000.000,-

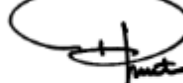
Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua



Andi Nur Alam Syah

Pihak Pertama



Dhani Gartina

Lampiran 3. Perhitungan Tingkat Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian Tahun 2020 sd 2024

Level	Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	%	31,68%	34,45%	36,74%	37,78%	39,96%
2	Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	%	31,68%	34,45%	36,74%	37,78%	39,96%
	Total lahan pertanian yang mendapat suplai air	Ha	3.771.452	4.101.141	4.373.362	4.497.422	4.757.164
	Total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan	Ha	11.904.564	11.904.564	11.904.564	11.904.564	11.904.564
3a	Rasio unit konservasi air dan LH untuk penambahan areal tanam yang diberikan terhadap total kebutuhan	%	1,63%	1,19%	1,25%	1,61%	1,28%
	Total kebutuhan unit konservasi air dan LH)	Unit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Rasio rekomendasi mitigasi iklim yang dimanfaatkan	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rekomendasi mitigasi iklim yang dimanfaatkan	Dokumen	3	3	3	3	2
4a	Jumlah unit konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian yang diberikan	Unit	650	477	500	645	511
	Jumlah penambahan areal pertanian yang diberikan	Ha	6.185	10.150	8.470	3.225	9.725
	Jumlah rekomendasi mitigasi iklim yang dihasilkan	Dokumen	3	3	3	3	2
3b	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian terhadap total kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian	%	2,93%	5,75%	5,44%	2,47%	1,07%
	Total kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi tersier	Ha	4.620.979	4.485.479	4.227.679	3.997.529	3.898.729
	Rasio P3A yang diberdayakan terhadap total P3A	%	1,06%	1,03%	1,00%	0,97%	1,30%
	Jumlah P3A yang diberdayakan	P3A	50	50	50	50	10
	Total P3A	P3A	4.719	4.869	5.019	5.169	770
4b	Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian	Ha	135.500	257.800	230.150	98.800	41.592
	Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang dibina	P3A	50	50	50	50	50
3c	Jumlah pengembangan sumber air tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Unit	951	849	414	899	12.467
	Jumlah pengembangan sumber air peternakan	Unit	187	130	337	161	0
4c	Jumlah pengembangan sumber air permukaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	ha	15.676	14.639	6.232	4.900	208.425
	Jumlah pengembangan sumber air tanah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	ha	22.340	46.970	27.032	12.076	
	Jumlah pengembangan sumber air permukaan peternakan	ha	187	130	75	51	0
	Jumlah pengembangan sumber air tanah peternakan	ha	0	0	262	110	0

**Lampiran 4. Realisasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
TA. 2024 (Dana Pusat)**

No	Propinsi/Kabupaten	Pagu		Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik	
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%
	NASIONAL	1.663	124.725.000.000	1.663	124.725.000.000	100,00%	1.663	100,00%
1	ACEH	92	6.900.000.000	92	6.900.000.000	100,00%	92	100,00%
1	Aceh Timur	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
2	Aceh Utara	26	1.950.000.000	26	1.950.000.000	100,00%	26	100,00%
3	Pidie	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
4	Biereun	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
5	Aceh Besar	18	1.350.000.000	18	1.350.000.000	100,00%	18	100,00%
6	Aceh Tamiang	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
7	Pidie Jaya	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
8	Aceh Tenggara	30	2.250.000.000	30	2.250.000.000	100,00%	30	100,00%
2	SUMATERA UTARA	75	5.625.000.000	75	5.625.000.000	100,00%	75	100,00%
9	Nias Selatan	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
10	Pakpak Barat	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
11	Samosir	4	300.000.000	4	300.000.000	100,00%	4	100,00%
12	Simalungun	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	100,00%	20	100,00%
13	Labuhan Batu	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
14	Padang Lawas	4	300.000.000	4	300.000.000	100,00%	4	100,00%
15	Kota Padang Sidempuan	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
16	Batu Bara	8	600.000.000	8	600.000.000	100,00%	8	100,00%
17	Padang Lawas Utara	8	600.000.000	8	600.000.000	100,00%	8	100,00%
18	Mandailing Natal	4	300.000.000	4	300.000.000	100,00%	4	100,00%
19	Langkat	10	750.000.000	10	750.000.000	100,00%	10	100,00%
20	Asahan	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
21	Serdang Bedagai	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
3	SUMATERA BARAT	31	2.325.000.000	31	2.325.000.000	100,00%	31	100,00%
22	Pasaman Barat	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
23	Solok	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
24	Sijunjung	4	300.000.000	4	300.000.000	100,00%	4	100,00%
25	Solok Selatan	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
26	Dharmasraya	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
27	Pesisir Selatan	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
28	Pariaman	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
29	Kota Padang	1	75.000.000	1	75.000.000	100,00%	1	100,00%
30	Tanah Datar	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
31	Agam	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
4	RIAU	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
32	Kampar	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
5	JAMBI	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	100,00%	20	100,00%
33	Merangin	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
34	Sarolangun	15	1.125.000.000	15	1.125.000.000	100,00%	15	100,00%
35	Kerinci	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
36	Batanghari	1	75.000.000	1	75.000.000	100,00%	1	100,00%
6	SUMATERA SELATAN	49	3.675.000.000	49	3.675.000.000	100,00%	49	100,00%
37	Ogan Komering Ulu Timur	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
38	Ogan Komering Ulu Selatan	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
39	Ogan Ilir	7	525.000.000	7	525.000.000	100,00%	7	100,00%
40	Penukal Abab Lematang Ilir	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
41	Muara Enim	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
42	Musi Rawas	12	900.000.000	12	900.000.000	100,00%	12	100,00%
43	Lahat	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
44	Ogan Komering Ulu	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
45	Kota Lubuk Linggau	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%

No	Propinsi/Kabupaten	Pagu		Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik	
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%
7	BENGKULU	25	1.875.000.000	25	1.875.000.000	100,00%	25	100,00%
46	Kepahiang	6	450.000.000	6	450.000.000	100,00%	6	100,00%
47	Bengkulu Selatan	6	450.000.000	6	450.000.000	100,00%	6	100,00%
48	Muko Muko	6	450.000.000	6	450.000.000	100,00%	6	100,00%
49	Seluma	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
50	Bengkulu Tengah	4	300.000.000	4	300.000.000	100,00%	4	100,00%
8	LAMPUNG	101	7.575.000.000	101	7.575.000.000	100,00%	101	100,00%
51	Lampung Tengah	35	2.625.000.000	35	2.625.000.000	100,00%	35	100,00%
52	Lampung selatan	21	1.575.000.000	21	1.575.000.000	100,00%	21	100,00%
53	Pesawaran	10	750.000.000	10	750.000.000	100,00%	10	100,00%
54	Pringsewu	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
55	Lampung Timur	14	1.050.000.000	14	1.050.000.000	100,00%	14	100,00%
56	Lampung Utara	16	1.200.000.000	16	1.200.000.000	100,00%	16	100,00%
9	BANGKA BELITUNG	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
57	Bangka Selatan	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
10	JAWA BARAT	219	16.425.000.000	219	16.425.000.000	100,00%	219	100,00%
58	Cianjur	50	3.750.000.000	50	3.750.000.000	100,00%	50	100,00%
59	Purwakarta	10	750.000.000	10	750.000.000	100,00%	10	100,00%
60	Garut	34	2.550.000.000	34	2.550.000.000	100,00%	34	100,00%
61	Sumedang	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
62	Cirebon	8	600.000.000	8	600.000.000	100,00%	8	100,00%
63	Pangandaran	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
64	Tasikmalaya	27	2.025.000.000	27	2.025.000.000	100,00%	27	100,00%
65	Indramayu	26	1.950.000.000	26	1.950.000.000	100,00%	26	100,00%
66	Sukabumi	8	600.000.000	8	600.000.000	100,00%	8	100,00%
67	Ciamis	15	1.125.000.000	15	1.125.000.000	100,00%	15	100,00%
68	Kota Tasikmalaya	10	750.000.000	10	750.000.000	100,00%	10	100,00%
69	Karawang	6	450.000.000	6	450.000.000	100,00%	6	100,00%
70	Majalengka	10	750.000.000	10	750.000.000	100,00%	10	100,00%
71	Kuningan	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
72	Bogor	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
11	JAWA TENGAH	199	14.925.000.000	199	14.925.000.000	100,00%	199	100,00%
73	Sukoharjo	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
74	Blora	13	975.000.000	13	975.000.000	100,00%	13	100,00%
75	Banyumas	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
76	Kendal	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
77	Grobogan	17	1.275.000.000	17	1.275.000.000	100,00%	17	100,00%
78	Batang	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
79	Kudus	10	750.000.000	10	750.000.000	100,00%	10	100,00%
80	Klaten	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
81	Tegal	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
82	Demak	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	100,00%	20	100,00%
83	Boyolali	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
84	Pekalongan	6	450.000.000	6	450.000.000	100,00%	6	100,00%
85	Wonogiri	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
86	Pemalang	6	450.000.000	6	450.000.000	100,00%	6	100,00%
87	Sragen	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
88	Cilacap	26	1.950.000.000	26	1.950.000.000	100,00%	26	100,00%
89	Wonosobo	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
90	Kebumen	14	1.050.000.000	14	1.050.000.000	100,00%	14	100,00%
91	Banjarnegara	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
92	Purbalingga	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
93	Temanggung	10	750.000.000	10	750.000.000	100,00%	10	100,00%
94	Magelang	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	100,00%	20	100,00%
95	Purworejo	7	525.000.000	7	525.000.000	100,00%	7	100,00%
96	Rembang	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
97	Pati	10	750.000.000	10	750.000.000	100,00%	10	100,00%

No	Propinsi/Kabupaten	Pagu		Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik	
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%
12	DI. YOGYAKARTA	8	600.000.000	8	600.000.000	100,00%	8	100,00%
98	Bantul	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
99	Gunungkidul	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
13	JAWA TIMUR	177	13.275.000.000	177	13.275.000.000	100,00%	177	100,00%
100	Jember	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
101	Ngawi	7	525.000.000	7	525.000.000	100,00%	7	100,00%
102	Sampang	12	900.000.000	12	900.000.000	100,00%	12	100,00%
103	Lumajang	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
104	Bojonegoro	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
105	Tuban	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
106	Mojokerto	7	525.000.000	7	525.000.000	100,00%	7	100,00%
107	Jombang	9	675.000.000	9	675.000.000	100,00%	9	100,00%
108	Nganjuk	9	675.000.000	9	675.000.000	100,00%	9	100,00%
109	Blitar	80	6.000.000.000	80	6.000.000.000	100,00%	80	100,00%
110	Madiun	30	2.250.000.000	30	2.250.000.000	100,00%	30	100,00%
111	Malang	1	75.000.000	1	75.000.000	100,00%	1	100,00%
112	Banyuwangi	8	600.000.000	8	600.000.000	100,00%	8	100,00%
14	BANTEN	49	3.675.000.000	49	3.675.000.000	100,00%	49	100,00%
113	Pandeglang	33	2.475.000.000	33	2.475.000.000	100,00%	33	100,00%
114	Kota Serang	6	450.000.000	6	450.000.000	100,00%	6	100,00%
115	Lebak	10	750.000.000	10	750.000.000	100,00%	10	100,00%
15	BALI	19	1.425.000.000	19	1.425.000.000	100,00%	19	100,00%
116	Tabanan	8	600.000.000	8	600.000.000	100,00%	8	100,00%
117	Jembrana	4	300.000.000	4	300.000.000	100,00%	4	100,00%
118	Badung	4	300.000.000	4	300.000.000	100,00%	4	100,00%
119	Gianyar	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
16	NTB	73	5.475.000.000	73	5.475.000.000	100,00%	73	100,00%
120	Lombok Tengah	7	525.000.000	7	525.000.000	100,00%	7	100,00%
121	Lombok Barat	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
122	Kota Mataram	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
123	Dompu	14	1.050.000.000	14	1.050.000.000	100,00%	14	100,00%
124	Dompu	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
125	Sumbawa	25	1.875.000.000	25	1.875.000.000	100,00%	25	100,00%
126	Bima	8	600.000.000	8	600.000.000	100,00%	8	100,00%
127	Kota Bima	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
128	Lombok Utara	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
129	Sumbawa Barat	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
17	NTT	53	3.975.000.000	53	3.975.000.000	100,00%	53	100,00%
130	Belu	9	675.000.000	9	675.000.000	100,00%	9	100,00%
131	Sumba Tengah	6	450.000.000	6	450.000.000	100,00%	6	100,00%
132	Alor	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
133	Kupang	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
134	Kota Kupang	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
135	Malaka	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
136	Sumba Timur	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
137	Sabu Rajua	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
138	TTS	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
139	Rote Ndao	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
140	Ende	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
141	Flores Timur	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
142	Lembata	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
143	Manggarai	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
144	Manggarai Barat	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
145	Manggarai Timur	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
146	Nagekeo	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
147	Ngada	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
148	Sikka	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%

No	Propinsi/Kabupaten	Pagu		Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik	
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%
18	KALIMANTAN BARAT	51	3.825.000.000	51	3.825.000.000	100,00%	51	100,00%
149	Sambas	9	675.000.000	9	675.000.000	100,00%	9	100,00%
150	Sintang	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
151	Landak	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	100,00%	20	100,00%
152	Sanggau	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	100,00%	20	100,00%
19	KALIMANTAN TIMUR	19	1.425.000.000	19	1.425.000.000	100,00%	19	100,00%
153	Penajam Paser Utara	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
154	Kutai Kartanegara	7	525.000.000	7	525.000.000	100,00%	7	100,00%
155	Kota Samarinda	7	525.000.000	7	525.000.000	100,00%	7	100,00%
20	SULAWESI TENGAH	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
156	Sigi	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
21	SULAWESI SELATAN	234	17.550.000.000	234	17.550.000.000	100,00%	234	100,00%
157	Gowa	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
158	Gowa	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
159	Gowa	6	450.000.000	6	450.000.000	100,00%	6	100,00%
160	Takalar	12	900.000.000	12	900.000.000	100,00%	12	100,00%
161	Jeneponto	21	1.575.000.000	21	1.575.000.000	100,00%	21	100,00%
162	Palopo	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
163	Sinjai	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
164	Selayar	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
165	Maros	14	1.050.000.000	14	1.050.000.000	100,00%	14	100,00%
166	Wajo	40	3.000.000.000	40	3.000.000.000	100,00%	40	100,00%
167	Bulukumba	10	750.000.000	10	750.000.000	100,00%	10	100,00%
168	Bantaeng	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
169	Pangkep	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
170	Gowa	10	750.000.000	10	750.000.000	100,00%	10	100,00%
171	Bone	32	2.400.000.000	32	2.400.000.000	100,00%	32	100,00%
172	Luwu	35	2.625.000.000	35	2.625.000.000	100,00%	35	100,00%
173	Sidenreng Rappang	14	1.050.000.000	14	1.050.000.000	100,00%	14	100,00%
174	Toraja Utara	2	150.000.000	2	150.000.000	100,00%	2	100,00%
175	Pinrang	6	450.000.000	6	450.000.000	100,00%	6	100,00%
22	SULAWESI TENGGARA	24	1.800.000.000	24	1.800.000.000	100,00%	24	100,00%
176	Konawe Utara	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
177	Konawe	19	1.425.000.000	19	1.425.000.000	100,00%	19	100,00%
23	GORONTALO	18	1.350.000.000	18	1.350.000.000	100,00%	18	100,00%
178	Gorontalo	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
179	Gorontalo Utara	1	75.000.000	1	75.000.000	100,00%	1	100,00%
180	Boalemo	1	75.000.000	1	75.000.000	100,00%	1	100,00%
181	Pohuwato	12	900.000.000	12	900.000.000	100,00%	12	100,00%
182	Bone Bolango	1	75.000.000	1	75.000.000	100,00%	1	100,00%
24	SULAWESI BARAT	46	3.450.000.000	46	3.450.000.000	100,00%	46	100,00%
183	Mamasa	7	525.000.000	7	525.000.000	100,00%	7	100,00%
184	Majene	9	675.000.000	9	675.000.000	100,00%	9	100,00%
185	Mamuju Tengah	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
186	Polewali Mandar	5	375.000.000	5	375.000.000	100,00%	5	100,00%
187	Mamuju	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	100,00%	20	100,00%
25	MALUKU	35	2.625.000.000	35	2.625.000.000	100,00%	35	100,00%
188	Maluku Tengah	21	1.575.000.000	21	1.575.000.000	100,00%	21	100,00%
189	Seram Bagian Timur	7	525.000.000	7	525.000.000	100,00%	7	100,00%
190	Buru	7	525.000.000	7	525.000.000	100,00%	7	100,00%
26	MALUKU UTARA	20	1.500.000.000	20	1.500.000.000	100,00%	20	100,00%
191	Halmahera Selatan	8	600.000.000	8	600.000.000	100,00%	8	100,00%
192	Halmahera Barat	9	675.000.000	9	675.000.000	100,00%	9	100,00%
193	Pulau Morotai	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
27	PAPUA	7	525.000.000	7	525.000.000	100,00%	7	100,00%
194	Keerom	7	525.000.000	7	525.000.000	100,00%	7	100,00%
28	PAPUA SELATAN	10	750.000.000	10	750.000.000	100,00%	10	100,00%
195	Merauke	10	750.000.000	10	750.000.000	100,00%	10	100,00%

**Lampiran 5. Data Capaian Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
(Dana Tugas Pembantuan) TA. 2019-2023**

NO	PROPINSI/KABUPATEN	TA. 2018						
		PAGU		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		(Ha)	(Rp)	(Ha)	(Rp)	%	HA	%
	INDONESIA	134.700	160.000.000.000	134.700	160.000.000.000	100,00	134.475	99,83
1	ACEH	8.200	9.840.000.000	8.200	9.840.000.000	100,00	8008,00	97,66
2	SUMATERA UTARA	7.000	8.400.000.000	7.000	8.400.000.000	100,00	7.000	100,00
3	SUMATERA BARAT	5.600	6.720.000.000	5.600	6.720.000.000	100,00	5.600	100,00
4	RIAU	1.200	1.440.000.000	1.200	1.440.000.000	100,00	1.200	100,00
5	JAMBI	1.850	2.220.000.000	1.850	2.220.000.000	100,00	1.850	100,00
6	SUMATERA SELATAN	3.200	3.840.000.000	3.200	3.840.000.000	100,00	3.200	100,00
7	BENGKULU	5.200	6.240.000.000	5.200	6.240.000.000	100,00	5.200	100,00
8	LAMPUNG	4.800	5.760.000.000	4.800	5.760.000.000	100,00	4.800	100,00
9	KEP. BANGKA BELITUNG							
10	JAWA BARAT	15.400	16.940.000.000	15.400	16.940.000.000	100,00	15.400	100,00
11	JAWA TENGAH	15.400	16.940.000.000	15.400	16.940.000.000	100,00	15.367	99,79
12	DI. YOGYAKARTA	1.800	1.980.000.000	1.800	1.980.000.000	100,00	1.800	100,00
13	JAWA TIMUR	10.000	11.000.000.000	10.000	11.000.000.000	100,00	10.000	100,00
14	BANTEN	1.000	1.100.000.000	1.000	1.100.000.000	100,00	1.000	100,00
15	BALI	5.400	5.940.000.000	5.400	5.940.000.000	100,00	5.400	100,00
16	NUSA TENGGARA BARAT	5.100	6.120.000.000	5.100	6.120.000.000	100,00	5.100	100,00
17	NUSA TENGGARA TIMUR	2.500	3.375.000.000	2.500	3.375.000.000	100,00	2.500	100,00
18	KALIMANTAN BARAT	4.900	6.615.000.000	4.900	6.615.000.000	100,00	4.900	100,00
19	KALIMANTAN TENGAH	1.600	2.160.000.000	1.600	2.160.000.000	100,00	1.600	100,00
20	KALIMANTAN SELATAN	1.700	2.295.000.000	1.700	2.295.000.000	100,00	1.700	100,00
21	KALIMANTAN TIMUR	1.300	1.755.000.000	1.300	1.755.000.000	100,00	1.300	100,00
22	KALIMANTAN UTARA	400	540.000.000	400	540.000.000	100,00	400	100,00
23	SULAWESI UTARA							
24	SULAWESI TENGAH	5.300	6.360.000.000	5.300	6.360.000.000	100,00	5.300	100,00
25	SULAWESI SELATAN	12.600	15.120.000.000	12.600	15.120.000.000	100,00	12.600	100,00
26	SULAWESI TENGGARA	4.750	5.700.000.000	4.750	5.700.000.000	100,00	4.750	100,00
27	GORONTALO	2.300	2.760.000.000	2.300	2.760.000.000	100,00	2.300	100,00
28	SULAWESI BARAT	2.700	3.240.000.000	2.700	3.240.000.000	100,00	2.700	100,00
29	MALUKU	-	-	-	-		-	
30	MALUKU UTARA	-	-	-	-		-	
31	PAPUA	1.900	3.040.000.000	1.900	3.040.000.000	100,00	1.900	100,00
32	PAPUA BARAT	1.600	2.560.000.000	1.600	2.560.000.000	100,00	1.600	100,00

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TA. 2019						
		PAGU		REALISASI			FISIK	
		(Ha)	(Rp)	(Ha)	(Rp)	%	HA	%
		134.075	160.000.000.000	132.060	159.922.000.000	99,95%	124.550	92,90%
1	ACEH	5.250	6.300.000.000	5.250	6.300.000.000	100,00%	5.250	100,00
2	SUMATERA UTARA	5.250	6.300.000.000	5.200	6.240.000.000	99,05%	4.188	79,76
3	SUMATERA BARAT	5.375	6.450.000.000	5.375	6.450.000.000	100,00%	5.368	99,88
4	RIAU	900	1.080.000.000	680	1.080.000.000	100,00%	900	100,00
5	JAMBI	4.000	4.800.000.000	4.060	4.800.000.000	100,00%	3.936	98,39
6	SUMATERA SELATAN	6.500	7.800.000.000	7.173	7.800.000.000	100,00%	5.643	86,82
7	BENGKULU	4.050	4.860.000.000	4.050	4.860.000.000	100,00%	3.952	97,58
8	LAMPUNG	4.900	5.880.000.000	4.385	5.880.000.000	100,00%	4.838	98,72
9	BANGKA BELITUNG	1.100	1.320.000.000	1.100	1.320.000.000	100,00%	1.093	99,32
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-
11	JAWA BARAT	12.350	13.585.000.000	12.350	13.585.000.000	100,00%	10.500	85,02
12	JAWA TENGAH	12.350	13.585.000.000	12.350	13.585.000.000	100,00%	12.325	99,80
13	DI. YOGYAKARTA	2.100	2.310.000.000	2.100	2.310.000.000	100,00%	2.100	100,00
14	JAWA TIMUR	12.250	13.475.000.000	12.250	13.475.000.000	100,00%	10.350	84,49
15	BANTEN	1.900	2.090.000.000	1.900	2.090.000.000	100,00%	1.859	97,83
16	BALI	5.250	5.775.000.000	5.558	5.775.000.000	100,00%	5.250	100,00
17	NTB	5.200	6.240.000.000	3.850	6.240.000.000	100,00%	5.200	100,00
18	NTT	3.100	4.185.000.000	2.825	4.185.000.000	100,00%	2.744	88,51
19	KALIMANTAN BARAT	2.000	2.700.000.000	2.000	2.700.000.000	100,00%	1.794	89,69
20	KALIMANTAN TENGAH	1.750	2.362.500.000	1.750	2.362.500.000	100,00%	1.303	74,43
21	KALIMANTAN SELATAN	1.800	2.430.000.000	1.800	2.430.000.000	100,00%	1.600	88,89
22	KALIMANTAN TIMUR	1.700	2.295.000.000	1.700	2.295.000.000	100,00%	1.700	100,00
23	KALIMANTAN UTARA	850	1.147.500.000	850	1.147.500.000	100,00%	708	83,29
24	SULAWESI UTARA	2.700	3.240.000.000	2.700	3.240.000.000	100,00%	1.636	60,59
25	SULAWESI TENGAH	4.200	5.040.000.000	4.200	5.040.000.000	100,00%	4.151	98,84
26	SULAWESI SELATAN	11.400	13.680.000.000	11.400	13.680.000.000	100,00%	10.551	92,55
27	SULAWESI TENGGARA	4.550	5.460.000.000	4.670	5.460.000.000	100,00%	4.491	98,71
28	GORONTALO	2.750	3.300.000.000	2.150	3.300.000.000	100,00%	2.750	100,00
29	SULAWESI BARAT	2.050	2.460.000.000	2.035	2.442.000.000	99,27%	1.953	95,28
30	MALUKU	1.200	1.620.000.000	1.200	1.620.000.000	100,00%	1.156	96,35
31	MALUKU UTARA	1.000	1.350.000.000	1.000	1.350.000.000	100,00%	1.000	100,00
32	PAPUA	2.200	3.520.000.000	2.200	3.520.000.000	100,00%	2.163	98,30
33	PAPUA BARAT	2.100	3.360.000.000	1.950	3.360.000.000	100,00%	2.100	100,00

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TA. 2020						
		PAGU		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		(Ha)	(Rp)	(Ha)	(Rp)	%	HA	%
		135.600	160.000.000.000	135.594	159.992.800.000	100,00%	134.053	98,86%
1	ACEH	5.200	6.240.000.000	5.200	6.240.000.000	100,00%	5.200	100,00%
2	SUMATERA UTARA	2.500	3.000.000.000	2.500	3.000.000.000	100,00%	2.500	100,00%
3	SUMATERA BARAT	6.650	7.980.000.000	6.650	7.980.000.000	100,00%	6.650	100,00%
4	RIAU	600	720.000.000	600	720.000.000	100,00%	550	91,67%
5	JAMBI	4.650	5.580.000.000	4.650	5.580.000.000	100,00%	4.618	99,31%
6	SUMATERA SELATAN	2.900	3.480.000.000	2.900	3.480.000.000	100,00%	2.863	98,71%
7	BENGKULU	4.200	5.040.000.000	4.200	5.040.000.000	100,00%	4.200	100,00%
8	LAMPUNG	4.400	5.280.000.000	4.400	5.280.000.000	100,00%	4.400	100,00%
9	BANGKA BELITUNG	1.000	1.200.000.000	1.000	1.200.000.000	100,00%	1.000	100,00%
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	JAWA BARAT	15.650	17.215.000.000	15.650	17.215.000.000	100,00%	15.566	99,46%
12	JAWA TENGAH	14.300	15.730.000.000	14.300	15.730.000.000	100,00%	14.300	100,00%
13	DI. YOGYAKARTA	2.150	2.365.000.000	2.150	2.365.000.000	100,00%	2.150	100,00%
14	JAWA TIMUR	14.950	16.445.000.000	14.950	16.445.000.000	100,00%	14.950	100,00%
15	BANTEN	1.655	1.820.500.000	1.655	1.820.500.000	100,00%	1.655	100,00%
16	BALI	5.245	5.769.500.000	5.245	5.769.500.000	100,00%	5.245	100,00%
17	NTB	4.300	5.160.000.000	4.300	5.160.000.000	100,00%	4.300	100,00%
18	NTT	3.200	4.320.000.000	3.200	4.320.000.000	100,00%	3.200	100,00%
19	KALIMANTAN BARAT	1.800	2.430.000.000	1.800	2.430.000.000	100,00%	1.800	100,00%
20	KALIMANTAN TENGAH	1.750	2.362.500.000	1.750	2.362.500.000	100,00%	1.458	83,29%
21	KALIMANTAN SELATAN	2.400	3.240.000.000	2.400	3.240.000.000	100,00%	2.382	99,26%
22	KALIMANTAN TIMUR	1.800	2.430.000.000	1.800	2.430.000.000	100,00%	1.800	100,00%
23	KALIMANTAN UTARA	350	472.500.000	350	472.500.000	100,00%	288	82,14%
24	SULAWESI UTARA	3.600	4.320.000.000	3.594	4.312.800.000	99,83%	2.872	79,78%
25	SULAWESI TENGAH	5.000	6.000.000.000	5.000	6.000.000.000	100,00%	5.000	100,00%
26	SULAWESI SELATAN	12.000	14.400.000.000	12.000	14.400.000.000	100,00%	11.987	99,89%
27	SULAWESI TENGGARA	4.975	5.970.000.000	4.975	5.970.000.000	100,00%	4.975	100,00%
28	GORONTALO	2.300	2.760.000.000	2.300	2.760.000.000	100,00%	2.191	95,27%
29	SULAWESI BARAT	2.250	2.700.000.000	2.250	2.700.000.000	100,00%	2.130	94,67%
30	MALUKU	1.200	1.620.000.000	1.200	1.620.000.000	100,00%	1.200	100,00%
31	MALUKU UTARA	1.000	1.350.000.000	1.000	1.350.000.000	100,00%	1.000	100,00%
32	PAPUA	1.025	1.640.000.000	1.025	1.640.000.000	100,00%	1.025	100,00%
33	PAPUA BARAT	600	960.000.000	600	960.000.000	100,00%	600	100,00%

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TA. 2021						
		PAGU		REALISASI			FISIK	
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%
		4.380	328.485.000.000	4.380	328.485.000.000	100,00%	4.380	100,00%
1	ACEH	251	18.825.000.000	251	18.825.000.000	100,00%	251	100,00%
2	SUMATERA UTARA							
3	SUMATERA BARAT	239	17.925.000.000	239	17.925.000.000	100,00%	239	100,00%
4	RIAU	28	2.100.000.000	28	2.100.000.000	100,00%	28	100,00%
5	JAMBI	140	10.500.000.000	140	10.500.000.000	100,00%	140	100,00%
6	SUMATERA SELATAN	200	15.000.000.000	200	15.000.000.000	100,00%	200	100,00%
7	BENGGKULU	114	8.550.000.000	114	8.550.000.000	100,00%	114	100,00%
8	LAMPUNG	155	11.625.000.000	155	11.625.000.000	100,00%	155	100,00%
9	BANGKA BELITUNG	16	1.200.000.000	16	1.200.000.000	100,00%	16	100,00%
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-
11	JAWA BARAT	468	35.100.000.000	468	35.100.000.000	100,00%	468	100,00%
12	JAWA TENGAH	545	40.875.000.000	545	40.875.000.000	100,00%	545	100,00%
13	DI. YOGYAKARTA	51	3.825.000.000	51	3.825.000.000	100,00%	51	100,00%
14	JAWA TIMUR	506	37.950.000.000	506	37.950.000.000	100,00%	506	100,00%
15	BANTEN	21	1.575.000.000	21	1.575.000.000	100,00%	21	100,00%
16	BALI	190	14.250.000.000	190	14.250.000.000	100,00%	190	100,00%
17	NTB	140	10.500.000.000	140	10.500.000.000	100,00%	140	100,00%
18	NTT	48	3.600.000.000	48	3.600.000.000	100,00%	48	100,00%
19	KALIMANTAN BARAT	112	8.400.000.000	112	8.400.000.000	100,00%	112	100,00%
20	KALIMANTAN TENGAH	18	1.350.000.000	18	1.350.000.000	100,00%	18	100,00%
21	KALIMANTAN SELATAN	80	6.000.000.000	80	6.000.000.000	100,00%	80	100,00%
22	KALIMANTAN TIMUR	38	2.850.000.000	38	2.850.000.000	100,00%	38	100,00%
23	KALIMANTAN UTARA	2	135.000.000	2	135.000.000	100,00%	2	100,00%
24	SULAWESI UTARA	40	3.000.000.000	40	3.000.000.000	100,00%	40	100,00%
25	SULAWESI TENGAH	187	14.025.000.000	187	14.025.000.000	100,00%	187	100,00%
26	SULAWESI SELATAN	330	24.750.000.000	330	24.750.000.000	100,00%	330	100,00%
27	SULAWESI TENGGARA	138	10.350.000.000	138	10.350.000.000	100,00%	138	100,00%
28	GORONTALO	82	6.150.000.000	82	6.150.000.000	100,00%	82	100,00%
29	SULAWESI BARAT	19	1.425.000.000	19	1.425.000.000	100,00%	19	100,00%
30	MALUKU	54	4.050.000.000	54	4.050.000.000	100,00%	54	100,00%
31	MALUKU UTARA	88	6.600.000.000	88	6.600.000.000	100,00%	88	100,00%
32	PAPUA	26	1.950.000.000	26	1.950.000.000	100,00%	26	100,00%
33	PAPUA BARAT	54	4.050.000.000	54	4.050.000.000	100,00%	54	100,00%

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TA. 2022						
		PAGU		REALISASI			FISIK	
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%
		3,000	225,000,000,000	3,000	225,000,000,000	100.00%	3,000	100.00%
1	ACEH	102	7,650,000,000	102	7,650,000,000	100.00%	102	1
2	SUMATERA UTARA							
3	SUMATERA BARAT	159	11,925,000,000	159	11,925,000,000	100.00%	159	1
4	RIAU	26	1,950,000,000	26	1,950,000,000	100.00%	26	1
5	JAMBI	49	3,675,000,000	49	3,675,000,000	100.00%	49	1
6	SUMATERA SELATAN	76	5,700,000,000	76	5,700,000,000	100.00%	76	1
7	BENGKULU	95	7,125,000,000	95	7,125,000,000	100.00%	95	1
8	LAMPUNG	112	8,400,000,000	112	8,400,000,000	100.00%	112	1
9	BANGKA BELITUNG	12	900,000,000	12	900,000,000	100.00%	12	1
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-
11	JAWA BARAT	347	26,025,000,000	347	26,025,000,000	100.00%	347	1
12	JAWA TENGAH	472	35,400,000,000	472	35,400,000,000	100.00%	472	1
13	DI. YOGYAKARTA	51	3,825,000,000	51	3,825,000,000	100.00%	51	1
14	JAWA TIMUR	352	26,400,000,000	352	26,400,000,000	100.00%	352	1
15	BANTEN	30	2,250,000,000	30	2,250,000,000	100.00%	30	1
16	BALI	120	9,000,000,000	120	9,000,000,000	100.00%	120	1
17	NTB	131	9,825,000,000	131	9,825,000,000	100.00%	131	1
18	NTT	66	4,950,000,000	66	4,950,000,000	100.00%	66	1
19	KALIMANTAN BARAT	63	4,725,000,000	63	4,725,000,000	100.00%	63	1
20	KALIMANTAN TENGAH	33	2,475,000,000	33	2,475,000,000	100.00%	33	1
21	KALIMANTAN SELATAN	45	3,375,000,000	45	3,375,000,000	100.00%	45	1
22	KALIMANTAN TIMUR	16	1,200,000,000	16	1,200,000,000	100.00%	16	1
23	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-
24	SULAWESI UTARA	35	2,625,000,000	35	2,625,000,000	100.00%	35	1
25	SULAWESI TENGAH	141	10,575,000,000	141	10,575,000,000	100.00%	141	1
26	SULAWESI SELATAN	272	20,400,000,000	272	20,400,000,000	100.00%	272	1
27	SULAWESI TENGGARA	83	6,225,000,000	83	6,225,000,000	100.00%	83	1
28	GORONTALO	42	3,150,000,000	42	3,150,000,000	100.00%	42	1
29	SULAWESI BARAT	20	1,500,000,000	20	1,500,000,000	100.00%	20	1
30	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU UTARA	32	2,400,000,000	32	2,400,000,000	100.00%	32	1
32	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-
33	PAPUA BARAT	18	1,350,000,000	18	1,350,000,000	100.00%	18	1

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	TA. 2023						
		PAGU		REALISASI			FISIK	
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%
		1.016	76.200.000.000	1.016	76.200.000.000	100	1.016	98
1	ACEH	68	5.100.000.000	68	5.100.000.000	100	68	100
2	SUMATERA UTARA	30	2.250.000.000	30	2.250.000.000	100	30	100
3	SUMATERA BARAT	14	1.050.000.000	14	1.050.000.000	100	14	100
4	SUMATERA SELATAN	35	2.625.000.000	35	2.625.000.000	100	35	100
5	LAMPUNG	63	4.725.000.000	63	4.725.000.000	100	63	100
6	JAWA BARAT	166	12.450.000.000	166	12.450.000.000	100	166	100
7	JAWA TENGAH	105	7.875.000.000	105	7.875.000.000	100	105	100
8	JAWA TIMUR	107	8.025.000.000	107	8.025.000.000	100	107	100
9	KALBAR	36	2.700.000.000	36	2.700.000.000	100	36	100
10	KALTIM	13	975.000.000	13	975.000.000	100	13	100
11	KALTENG	13	975.000.000	13	975.000.000	100	13	100
12	SULSEL	105	7.875.000.000	105	7.875.000.000	100	105	100
13	BALI	14	1.050.000.000	14	1.050.000.000	100	14	100
14	NTB	59	4.425.000.000	59	4.425.000.000	100	59	100
15	NTT	34	2.550.000.000	34	2.550.000.000	100	34	100
16	MALUKU	27	2.025.000.000	27	2.025.000.000	100	27	100
17	PAPUA	12	900.000.000	12	900.000.000	100	12	100
18	MALUKU UTARA	13	975.000.000	13	975.000.000	100	13	100
19	BANTEN	32	2.400.000.000	32	2.400.000.000	100	32	100
20	SULBAR	23	1.725.000.000	23	1.725.000.000	100	23	100
21	JAMBI	14	1.050.000.000	14	1.050.000.000	100	14	100
22	SULTRA	18	1.350.000.000	18	1.350.000.000	100	18	94
23	GORONTALO	5	375.000.000	5	375.000.000	100	5	100
24	D.I. YOGYAKARTA	10	750.000.000	10	750.000.000	100	10	100

Lampiran 6. Sasaran Data Perkumpulan Petani Pemakai AIR (P3A)

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	LUAS BAKU LAHAN (Ha)	JUMLAH P3A		
				BADAN HUKUM	BELUM BERBADAN HUKUM	JUMLAH TOTAL
1	DI. YOGYAKARTA	Kab. Sleman	4.520,00	7	129	136
2	DI. YOGYAKARTA	Kab. Kulon Progo	28.487,00	93	197	290
3	DI. YOGYAKARTA	Kab. Bantul	3.702,78	78	-	78
4	DI. YOGYAKARTA	Kab. Gunung Kidul	7.238,00	44	136	180
5	JAWA BARAT	Ciamis	19.005	158	75	233
6	JAWA BARAT	Cianjur	47.014	14	370	384
7	JAWA BARAT	Garut	5.063	16	42	58
8	JAWA BARAT	Indramayu	-	-	98	98
9	JAWA BARAT	Karawang	28.435	212	-	212
10	JAWA BARAT	Kuningan	17.748	218	-	218
11	JAWA BARAT	Majalengka	36.576	-	363	363
12	JAWA BARAT	Purwakarta	5.413	-	43	43
13	JAWA BARAT	Subang *)	83.928,00	450	972	1.422
14	JAWA BARAT	Sumedang	31.024	-	400	400
15	JAWA BARAT	Tasikmalaya	4.274	-	35	35
16	JAWA BARAT	Kota Tasikmalaya	5.332	-	94	94
17	JAWA BARAT	Sukabumi	6.888	22	53	75
18	JAWA BARAT	Cirebon	-	66	108	174
19	JAWA BARAT	Bandung Barat	2.949	4	13	17
20	JAWA BARAT	Bandung	21.542	73	189	262
21	JAWA BARAT	Bogor	3.452	15	43	58
22	JAWA TENGAH	Magelang	8.702,00	10	93	103
23	LAMPUNG	Tanggamus	20.713	61	-	61
24	NTB	Sumbawa	43.673	70	60	130
25	SULSEL	Kota Palopo	1.676	5	40	45
		Jumlah	437.354,76	1.616	3.553	5.169

Lampiran 7. Rekap Data Profil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) TA. 2024

No	Nama P3A	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelas
1	P3A Potong Toae	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	Tellu Limpoe	Arateng	Lanjut
2	P3A Mammalatu	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	Wattang Pullu	Batang I	Lanjut
3	P3A Alapporeng	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	Pitu Riawa	Anabannae	Lanjut
4	P3A Massunpulo	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	Pitu Riawa	Lancirang	Lanjut
5	P3A Sapatangareng	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	Dua Pitue	Kalosi	Lanjut
6	P3A Pammase Puang	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	Watang Sidenreng	Sidenreng	Lanjut
7	P3A Sijelling	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	Tellu Limpoe	Arateng	Lanjut
8	P3A Bampa-Bampae	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	Pitu Riawa	Lagiwala	Lanjut
9	P3A Mannenungen I	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	Watang Polu	Lawawoi	Lanjut
10	P3A Adil	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	Panca Lantang	Alesalewo	Lanjut

REKAP INFORMASI KELEMBAGAAN P3A		REKAP INFORMASI KELEMBAGAAN P3A	
I. INFORMASI UMUM		II. INFORMASI UMUM	
Nama P3A	: POTONG TOAE	Nama P3A	: MAMMALATUO
Nama GP3A	: POLEWALI	Nama GP3A	:
Daerah Irigasi	: SADDANG	Daerah Irigasi	: SADDANG
Nama Sungai	: -	Nama Sungai	: -
Desa	: ARATENG	Desa	: BANGKA I
Kecamatan	: TELLU LIMPOE	Kecamatan	: WATANG PULU
Kabupaten	: SIDENRENG RAPPANG	Kabupaten	: SIDENRENG RAPPANG
Provinsi	: SULAWESI	Provinsi	: SULAWESI
Luas area irigasi	: 62 Ha	Luas area irigasi	: 300 Ha
Tahun berdiri	: 2022	Tahun berdiri	:
Status Badan Hukum	: BADAN HUKUM	Status Badan Hukum	: BADAN HUKUM
Jumlah Anggota Petani	: 52	Jumlah Anggota Petani	: 300
Pola Tanam PPT	: PADI - PADI	Pola Tanam PPT	: PADI - PADI
Produksi Pertanian	: 6,5 TON / HA	Produksi Pertanian	: 5,2 TON / HA
II. Kondisi saat ini		II. Kondisi saat ini	
Aspek Teknis	: Terawat dan Berfungsi lebih dari 50%	Aspek Teknis	: Terawat dan Berfungsi lebih dari 50%, Pemeliharaan jaringan tetapi hanya insidental
Aspek Kelembagaan	: Sudah berbadan hukum dan memiliki AD/ART	Aspek Kelembagaan	: Sudah berbadan hukum dan memiliki AD/ART
Aspek Teknis pertanian	: Jadwal tanam dilaksanakan secara serentak	Aspek Teknis pertanian	: Jadwal tanam dilaksanakan secara serentak
Aspek Keuangan	: Swadaya dan memiliki catatan rutin	Aspek Keuangan	: Swadaya dan memiliki catatan rutin
III. Kesimpulan		III. Kesimpulan	
P3A POTONG TOAE TERGOLONG KE DALAM KELAS LANJUT		P3A MAMMALATUO TERGOLONG KE DALAM KELAS LANJUT	
REKAP INFORMASI KELEMBAGAAN P3A		REKAP INFORMASI KELEMBAGAAN P3A	
III. INFORMASI UMUM		IV. INFORMASI UMUM	
Nama P3A	: ALAPPORENG	Nama P3A	: MASSUNPULOLOE
Nama GP3A	: ANABANNAE	Nama GP3A	: SAPPEWALI
Daerah Irigasi	: ANABANNAE	Daerah Irigasi	: LANCIRANG
Nama Sungai	: ANABANNAE	Nama Sungai	: SALO TENGNGA
Desa	: ANABANNAE	Desa	: LANCIRANG
Kecamatan	: PITU RIAWA	Kecamatan	: PITU RIAWA
Kabupaten	: SIDENRENG RAPPANG	Kabupaten	: SIDENRENG RAPPANG
Provinsi	: SULAWESI	Provinsi	: SULAWESI
Luas area irigasi	: 110 Ha	Luas area irigasi	: 539 Ha
Tahun berdiri	:	Tahun berdiri	:
Status Badan Hukum	: BADAN HUKUM	Status Badan Hukum	: BADAN HUKUM
Jumlah Anggota Petani	: 137	Jumlah Anggota Petani	: 137
Pola Tanam PPT	: PADI - PADI	Pola Tanam PPT	: PADI - PADI
Produksi Pertanian	: 6,5 TON / HA	Produksi Pertanian	: 6,5 TON / HA
II. Kondisi saat ini		II. Kondisi saat ini	
Aspek Teknis	: Terawat dan Berfungsi lebih dari 50%	Aspek Teknis	: Terawat dan Berfungsi lebih dari 50%
Aspek Kelembagaan	: Sudah berbadan hukum dan memiliki AD/ART	Aspek Kelembagaan	: Sudah berbadan hukum dan memiliki AD/ART
Aspek Teknis pertanian	: Jadwal tanam dilaksanakan secara serentak	Aspek Teknis pertanian	: Jadwal tanam dilaksanakan secara serentak
Aspek Keuangan	: Swadaya dan memiliki catatan rutin	Aspek Keuangan	: Swadaya dan memiliki catatan rutin
III. Kesimpulan		III. Kesimpulan	
P3A ALAPPORENG TERGOLONG KE DALAM KELAS LANJUT		P3A MASSUNPULOLOE TERGOLONG KE DALAM KELAS LANJUT	

REKAP INFORMASI KELEMBAGAAN P3A	
V. INFORMASI UMUM	
Nama P3A	: SIPATANGGARENG
Nama GP3A	:
Daerah Irigasi	: BILA
Nama Sungai	:
Desa	: KALOSI
Kecamatan	: DUA PITUE
Kabupaten	: SIDENRENG RAPPANG
Provinsi	: SULAWESI
Luas area irigasi	: 105 Ha
Tahun berdiri	:
Status Badan Hukum	: BADAN HUKUM
Jumlah Anggota Petani	: 95
Pola Tanam PPT	: PADI - PADI
Produksi Pertanian	: 6,5 TON / HA
II. Kondisi saat ini	
Aspek Teknis	: Terawat dan Berfungsi lebih dari 50%
Aspek Kelembagaan	: Sudah berbadan hukum dan memiliki AD/ART
Aspek Teknis pertanian	: Jadwal tanam dilaksanakan secara serentak
Aspek Keuangan	: Swadaya dan memiliki catatan rutin
III. Kesimpulan	
P3A SIPATANGGARENG TERGOLONG KE DALAM KELAS LANJUT	

REKAP INFORMASI KELEMBAGAAN P3A	
VI. INFORMASI UMUM	
Nama P3A	: PAMMASE PUANG
Nama GP3A	:
Daerah Irigasi	: SADDANG
Nama Sungai	:
Desa	: SIDENRENG
Kecamatan	: WATANG SIDENRENG
Kabupaten	: SIDENRENG RAPPANG
Provinsi	: SULAWESI
Luas area irigasi	: 126 Ha
Tahun berdiri	:
Status Badan Hukum	: BADAN HUKUM
Jumlah Anggota Petani	: 108
Pola Tanam PPT	: PADI - PADI
Produksi Pertanian	: 6 TON / HA
II. Kondisi saat ini	
Aspek Teknis	: Terawat dan Berfungsi lebih dari 50% tetapi tidak ada jadwal operasi jaringan
Aspek Kelembagaan	: Sudah berbadan hukum dan memiliki AD/ART
Aspek Teknis pertanian	: Jadwal tanam dilaksanakan secara serentak
Aspek Keuangan	: Swadaya dan memiliki catatan rutin
III. Kesimpulan	
P3A PAMMASE PUANG TERGOLONG KE DALAM KELAS LANJUT	

REKAP INFORMASI KELEMBAGAAN P3A	
VII. INFORMASI UMUM	
Nama P3A	: SUJELLING
Nama GP3A	: GP3A POLEWALI
Daerah Irigasi	: SADDANG
Nama Sungai	:
Desa	: ARATENG
Kecamatan	: TELLU LIMPOE
Kabupaten	: SIDENRENG RAPPANG
Provinsi	: SULAWESI SELATAN
Luas area irigasi	: 161,72 Ha
Tahun berdiri	: 2022
Status Badan Hukum	: BADAN HUKUM
Jumlah Anggota Petani	:
Pola Tanam PPT	: PADI - PADI
Produksi Pertanian	: 6 TON / HA
II. Kondisi saat ini	
Aspek Teknis	: Tidak Terawat dan fungsi saluran kurang dari 50%
Aspek Kelembagaan	: Sudah berbadan hukum dan memiliki AD/ART
Aspek Teknis pertanian	: Jadwal tanam dilaksanakan secara serentak
Aspek Keuangan	: Swadaya dan memiliki catatan rutin
III. Kesimpulan	
P3A SUJELLING TERGOLONG KE DALAM KELAS LANJUT	

REKAP INFORMASI KELEMBAGAAN P3A	
VIII. INFORMASI UMUM	
Nama P3A	: BAMPA – BAMP AE
Nama GP3A	: BULU - PALLANURI
Daerah Irigasi	: LAGIWALA
Nama Sungai	: KALIDONG
Desa	: LAGIWALA
Kecamatan	: PITU - RIAWA
Kabupaten	: SIDENRENG RAPPANG
Provinsi	: SULAWESI SELATAN
Luas area irigasi	: 110 Ha
Tahun berdiri	:
Status Badan Hukum	: BADAN HUKUM
Jumlah Anggota Petani	: 97
Pola Tanam PPT	: PADI - PADI
Produksi Pertanian	: 6,5 TON / HA
II. Kondisi saat ini	
Aspek Teknis	: Terawat dan fungsi saluran kurang lebih dari 50%
Aspek Kelembagaan	: Sudah berbadan hukum dan memiliki AD/ART
Aspek Teknis pertanian	: Jadwal tanam dilaksanakan secara serentak
Aspek Keuangan	: Swadaya dan memiliki catatan rutin
III. Kesimpulan	
P3A BAMPA - BAMP AE TERGOLONG KE DALAM KELAS LANJUT	

REKAP INFORMASI KELEMBAGAAN P3A	
IX. INFORMASI UMUM	
Nama P3A	: MANNENNUNGEN I
Nama GP3A	: MAKKAWARUT
Daerah Irigasi	: BANGKA I
Nama Sungai	: BANGKA I
Desa	: LAWAWOI
Kecamatan	: WATANG POLU
Kabupaten	: SIDENRENG RAPPANG
Provinsi	: SULAWESI SELATAN
Luas area irigasi	: 318,50 Ha
Tahun berdiri	:
Status Badan Hukum	: BADAN HUKUM
Jumlah Anggota Petani	: 320
Pola Tanam PPT	: PADI - PADI
Produksi Pertanian	: 4,8 TON / HA
II. Kondisi saat ini	
Aspek Teknis	: Terawat dan fungsi saluran kurang lebih dari 50%
Aspek Kelembagaan	: Sudah berbadan hukum dan memiliki AD/ART
Aspek Teknis pertanian	: Jadwal tanam dilaksanakan secara serentak
Aspek Keuangan	: Swadaya dan memiliki catatan rutin
III. Kesimpulan	
P3A MANNENNUNGEN I TERGOLONG KE DALAM KELAS LANJUT	

REKAP INFORMASI KELEMBAGAAN P3A	
X. INFORMASI UMUM	
Nama P3A	: ADIL
Nama GP3A	: JOMPO BATTOA
Daerah Irigasi	: SADDANG
Nama Sungai	:
Desa	: ALESALEWO
Kecamatan	: PANCA LANTANG
Kabupaten	: SIDENRENG RAPPANG
Provinsi	: SULAWESI SELATAN
Luas area irigasi	: 60,75 Ha
Tahun berdiri	: 1989
Status Badan Hukum	: BADAN HUKUM
Jumlah Anggota Petani	: 50
Pola Tanam PPT	: PADI - PADI
Produksi Pertanian	: 6,5 TON / HA
II. Kondisi saat ini	
Aspek Teknis	: Terawat dan fungsi saluran kurang lebih dari 50%
Aspek Kelembagaan	: Sudah berbadan hukum dan memiliki AD/ART
Aspek Teknis pertanian	: Jadwal tanam dilaksanakan secara serentak
Aspek Keuangan	: Swadaya dan memiliki catatan rutin
III. Kesimpulan	
P3A ADIL TERGOLONG KE DALAM KELAS LANJUT	

**Lampiran 8. Realisasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan
TA. 2024**

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU				REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT		TOTAL	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
		REF	ABT							
	NASIONAL	5.388	4.516	9.904	1.193.980.000.000	9.487	1.130.994.634.127	94,72	9.487	95,79%
1	ACEH	130	23	153	18.411.458.000	153	18.184.088.201	98,77%	153	100,00%
	Provinsi Aceh				130.118.000	-	98.430.000	75,65%		
1	Aceh Barat	16	2	18	2.148.840.000	18	2.113.859.086	98,37%	18	100,00
2	Aceh Selatan	6	2	8	956.380.000	8	955.380.000	99,90%	8	100,00
3	Aceh Singkil	1	1	2	242.640.000	2	242.640.000	100,00%	2	100,00
4	Aceh Timur	8	6	14	1.675.220.000	14	1.675.120.000	99,99%	14	100,00
5	Aceh Utara	36	2	38	4.535.860.000	38	4.443.240.000	97,96%	38	100,00
6	Pidie	6		6	716.980.000	6	708.950.500	98,88%	6	100,00
7	Kota Subulussalam	3		3	358.560.000	3	358.560.000	100,00%	3	100,00
8	Kota Lhokseumawe	3		3	358.560.000	3	358.559.815	100,00%	3	100,00
9	Gayo Lues	6		6	717.040.000	6	717.040.000	100,00%	6	100,00
10	Aceh Jaya	6	2	8	957.300.000	8	955.758.800	99,84%	8	100,00
11	Aceh Besar	4	4	8	955.040.000	8	954.960.000	99,99%	8	100,00
12	Aceh Tamiang	4		4	478.080.000	4	477.900.000	99,96%	4	100,00
13	Simeulue	4	1	5	606.940.000	5	594.090.000	97,88%	8	160,00
14	Bener Meriah		3	3	351.120.000	3	351.120.000	100,00%		-
15	Aceh Tenggara	25		25	2.981.660.000	25	2.938.680.000	98,56%	25	100,00
16	Bireuen	2		2	241.120.000	2	239.800.000	99,45%	2	100,00
2	SUMATERA UTARA	80	22	102	12.276.323.000	102	12.174.785.000	99,17%	102	100,00%
	Provinsi Sumatera Utara			-	138.923.000	-	137.677.000	99,10%		
17	Deli Serdang	11	5	16	1.884.700.000	16	1.867.050.000	99,06%	16	100,00
18	Labuhanbatu Utara	3	1	4	476.100.000	4	476.100.000	100,00%	4	100,00
19	Langkat	10	2	12	1.430.200.000	12	1.386.000.000	96,91%	12	100,00
20	Mandailing Natal	8	5	13	1.544.000.000	13	1.543.200.000	99,95%	13	100,00
21	Nias	5	2	7	832.700.000	7	821.550.000	98,66%	7	100,00
22	Nias Selatan	5	2	7	832.700.000	7	832.700.000	100,00%	7	100,00
23	Nias Utara	8	2	10	1.191.200.000	10	1.190.750.000	99,96%	10	100,00
24	Nias Barat	1	2	3	354.700.000	3	354.700.000	100,00%	3	100,00
25	Samosir	8		8	956.000.000	8	949.500.000	99,32%	8	100,00
26	Karo	2		2	239.000.000	2	238.950.000	99,98%	2	100,00
27	Serdang Bedagai	5	1	6	715.100.000	6	715.100.000	100,00%	6	100,00
28	Batu Bara	6		6	721.000.000	6	715.520.000	99,24%	6	100,00
29	Padang Lawas Utara	8		8	960.000.000	8	945.988.000	98,54%	8	100,00
3	SUMATERA BARAT	48	50	98	11.805.404.000	98	11.753.734.530	99,56%	98	100,00%
	Provinsi Sumatera Barat			-	138.704.000	-	111.043.550	80,06%		
30	Lima Puluh Kota	6	4	10	1.193.500.000	10	1.191.900.000	99,87%	10	100,00
31	Agam	6	4	10	1.193.500.000	10	1.189.974.980	99,70%	10	100,00
32	Kepulauan Mentawai	1		1	120.000.000	1	119.820.000	99,85%	1	100,00
33	Padang Pariaman	7		7	851.400.000	7	836.820.000	98,29%	7	100,00
34	Pasaman	5		5	600.000.000	5	598.921.500	99,82%	5	100,00
35	Pesisir Selatan	5	11	16	1.896.700.000	16	1.895.180.000	99,92%	16	100,00
36	Solok	5	5	10	1.191.250.000	10	1.189.710.000	99,87%	10	100,00
37	Tanah Datar	1	8	9	1.064.450.000	9	1.063.190.000	99,88%	9	100,00
38	Kota Padang	1	2	3	356.500.000	3	353.886.000	99,27%	3	100,00
39	Dharmasraya	3		3	360.000.000	3	359.600.000	99,89%	3	100,00
40	Solok Selatan	1	3	4	475.200.000	4	473.960.000	99,74%	4	100,00
41	Pasaman Barat	4		4	480.000.000	4	479.820.000	99,96%	4	100,00
42	Sijunjung	3	8	11	1.304.400.000	11	1.300.093.500	99,67%	11	100,00
43	Kota Payakumbuh		3	3	354.200.000	3	353.425.000	99,78%	3	100,00
44	Kota Pariaman		2	2	225.600.000	2	236.390.000	104,78%	2	100,00
4	RIAU	56	37	93	11.208.431.000	93	11.200.299.286	99,93%	93	100,00%
	Provinsi Riau			-	48.431.000	-	47.437.826	97,95%		
45	Indragiri Hilir	25	12	37	4.440.000.000	37	4.439.861.460	100,00%	37	100,00
46	Indragiri Hulu	5	5	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	100,00%	10	100,00
47	Kampar	4	5	9	1.080.000.000	4	480.000.000	44,44%	4	44,44

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU				REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT			(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
		REF	ABT	TOTAL	TOTAL					
48	Kuantan Singingi	7	5	12	1.440.000.000	12	1.440.000.000	100,00%	12	100,00
49	Pelalawan	7	5	12	1.440.000.000	12	1.440.000.000	100,00%	12	109,09
50	Rokan Hilir	6	5	11	1.320.000.000	16	1.913.000.000	144,92%	16	145,45
44	Rokan Hulu			-	-	-	-	-		
45	Siak	2		2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00
5	JAMBI	42	100	142	17.080.864.000	140	16.830.718.640	98,54%	140	98,59%
	Provinsi Jambi		50	50	6.040.864.000	50	6.038.893.640	99,97%	50	100,00
46	Batanghari	7	14	21	2.520.000.000	21	2.518.050.000	99,92%	21	100,00
47	Merangin	4	2	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00
48	Muaro Jambi	5		5	600.000.000	5	600.000.000	100,00%	5	100,00
49	Tanjung Jabung Barat	17	7	24	2.880.000.000	24	2.880.000.000	100,00%	24	100,00
50	Tanjung Jabung Timur	-	5	5	600.000.000	5	586.200.000	97,70%	5	100,00
51	Tebo	4	2	6	720.000.000	6	718.800.000	99,83%	6	100,00
52	Bungo			-	-	-	-	-		
53	Kerinci	5	5	10	1.200.000.000	8	969.000.000	80,75%	8	80,00
54	Sarolangun		8	8	960.000.000	8	960.000.000	100,00%	8	100,00
55	Kota Sungai Penuh		7	7	840.000.000	7	839.775.000	99,97%	7	100,00
6	SUMATERA SELATAN	172	-	172	20.842.806.000	117	13.660.471.365	65,54%	117	68,02%
	Provinsi Sumatera Selatan				202.806.000	-	100.542.165	49,58%		
56	Lahat	2		2	240.000.000	2	236.485.000	98,54%	2	100,00
57	Musi Banyuasin	7		7	840.000.000	7	817.547.200	97,33%	7	100,00
58	Musi Rawas	10		10	1.200.000.000	2	239.800.000	19,98%	2	20,00
59	Musi Rawas Utara	3		3	360.000.000	3	358.500.000	99,58%	3	100,00
60	Muara Enim	38		38	4.560.000.000	38	4.369.980.000	95,83%	38	100,00
61	Ogan Komering Ilir			-	-	-	-	-		
62	Kota Palembang	4		4	480.000.000	4	474.100.000	98,77%	4	100,00
63	Banyuasin			-	-	-	-	-		
64	Ogan Komering Ulu Timur	6		6	720.000.000	4	481.800.000	66,92%	4	66,67
65	Ogan Komering Ulu Selatan			-	-	-	-	-		
66	Ogan Ilir	39		39	4.680.000.000	39	4.434.617.000	94,76%	39	100,00
67	Empat Lawang	7		7	840.000.000	7	839.550.000	99,95%	7	100,00
68	Penukal Abab Lematang Ilir	12		12	1.440.000.000	7	831.150.000	57,72%	7	58,33
69	Kota Lubuk Linggau	4		4	480.000.000	4	476.400.000	99,25%	4	100,00
70	Ogan Komering Ulu	40		40	4.800.000.000	-	-	0,00%	-	-
7	BENGGULU	27	7	34	4.087.567.000	34	4.086.874.000	99,98%	34	100,00
	Provinsi Bengkulu				7.567.000	-	7.567.000	100,00%		
71	Bengkulu Selatan	6	1	7	840.000.000	7	840.000.000	100,00%	7	100,00
72	Bengkulu Utara	2		2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00
73	Rejang Lebong	2		2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00
74	Kaur	5		5	600.000.000	5	599.800.000	99,97%	5	100,00
75	Seluma	12	6	18	2.160.000.000	18	2.159.507.000	99,98%	18	100,00
76	Bengkulu Tengah			-	-	-	-	-		
8	LAMPUNG	157	258	415	49.948.321.000	415	49.881.152.430	99,87%	415	100,00
	Provinsi Lampung				148.321.000	-	148.043.080	99,81%		
77	Lampung Barat	14	12	26	3.120.000.000	26	3.117.010.000	99,90%	26	100,00
78	Lampung Selatan	14	15	29	3.480.000.000	29	3.479.010.000	99,97%	29	100,00
79	Lampung Tengah	18	49	67	8.040.000.000	67	8.039.550.000	99,99%	67	100,00
80	Lampung Utara	11	30	41	4.920.000.000	41	4.919.850.000	100,00%	41	100,00
81	Lampung Timur	14	43	57	6.840.000.000	57	6.815.599.150	99,64%	57	100,00
82	Tanggaman	10		10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	100,00%	10	100,00
83	Tulang Bawang	7	13	20	2.400.000.000	20	2.398.400.000	99,93%	20	100,00
84	Tulang Bawang Barat	6	5	11	1.320.000.000	11	1.309.300.000	99,19%	11	100,00
85	Way Kanan	16	50	66	7.920.000.000	66	7.897.090.200	99,71%	66	100,00
86	Pringsewu	14	6	20	2.400.000.000	20	2.400.000.000	100,00%	20	100,00
87	Pesawaran	13	10	23	2.760.000.000	23	2.757.300.000	99,90%	23	100,00
88	Mesuji	10	20	30	3.600.000.000	30	3.600.000.000	100,00%	30	100,00
89	Pesisir Barat	10	5	15	1.800.000.000	15	1.800.000.000	100,00%	15	100,00
9	BANGKA BELITUNG	8	1	9	1.083.026.000	9	1.077.026.000	99,45%	9	100,00
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				3.026.000	-	3.026.000	100,00%		
90	Bangka Selatan	4		4	480.000.000	4	474.000.000	98,75%	4	100,00
91	Bangka	4		4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00
92	Bangka Barat		1	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU				REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT		(Rp)	TOTAL	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
		REF	ABT	TOTAL						
10	JAWA BARAT	776	1.110	1.886	227.167.550.000	1.879	224.098.401.550	98,65%	1.879	99,63
	Provinsi Jawa Barat		225	225	27.847.550.000	218	25.842.521.000	92,80%	218	96,89
93	Kota Banjar	2	18	20	2.400.000.000	20	2.400.696.000	100,03%	20	100,00
94	Bandung	20	28	48	5.760.000.000	48	5.698.800.350	98,94%	48	100,00
95	Ciamis	30	18	48	5.760.000.000	48	5.759.574.000	99,99%	48	100,00
96	Cianjur	40	124	164	19.680.000.000	164	19.685.500.000	100,03%	164	100,00
97	Garut	83	50	133	15.960.000.000	133	15.984.540.000	100,15%	133	100,00
98	Indramayu	118	126	244	29.280.000.000	244	28.910.696.000	98,74%	244	100,00
99	Kuningan	45	75	120	14.400.000.000	120	14.213.100.000	98,70%	120	100,00
100	Majalengka	25	20	45	5.400.000.000	45	5.413.169.000	100,24%	45	100,00
101	Purwakarta	15	3	18	2.160.000.000	18	2.168.590.000	100,40%	18	100,00
102	Subang	107	125	232	27.840.000.000	232	27.795.226.500	99,84%	232	100,00
103	Tasikmalaya	109	45	154	18.480.000.000	154	18.225.900.000	98,63%	154	100,00
104	Sukabumi	80		80	9.600.000.000	80	9.479.160.000	98,74%	80	100,00
105	Bogor	7	48	55	6.600.000.000	55	6.534.139.800	99,00%	55	100,00
106	Bandung Barat	15	35	50	6.000.000.000	50	5.992.468.000	99,87%	50	100,00
107	Kota Bandung		1	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00
108	Kota Sukabumi	3	7	10	1.200.000.000	10	1.201.800.000	100,15%	10	100,00
109	Kota Bogor	1		1	120.000.000	1	120.600.000	100,50%	1	100,00
110	Karawang	20	100	120	14.400.000.000	120	14.402.250.500	100,02%	120	100,00
111	Pangandaran	6	12	18	2.160.000.000	18	2.163.434.400	100,16%	18	100,00
112	Bekasi	25	15	40	4.800.000.000	40	4.814.700.000	100,31%	40	100,00
113	Sumedang	20	15	35	4.200.000.000	35	4.171.436.000	99,32%	35	100,00
113	Kota Tasikmalaya	5	10	15	1.800.000.000	15	1.800.100.000	100,01%	15	100,00
114	Cirebon		10	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	100,00%	10	100,00
11	JAWA TENGAH	894	788	1.682	202.872.195.000	1.493	177.672.308.400	87,58%	1.493	88,76
	Provinsi Jawa Tengah			-	1.032.195.000	-	844.346.550	81,80%		
115	Kendal	33	19	52	6.240.000.000	52	6.144.795.400	98,47%	52	100,00
116	Pemalang	32	10	42	5.040.000.000	42	4.982.675.000	98,86%	42	100,00
117	Purbalingga	26	30	56	6.720.000.000	56	6.624.574.100	98,58%	56	100,00
118	Tegal	32	8	40	4.800.000.000	35	4.171.200.600	86,90%	35	87,50
119	Kota Tegal		3	3	360.000.000	3	359.474.000	99,85%	3	100,00
120	Kota Semarang	1		1	120.000.000	1	118.240.100	98,53%	1	100,00
121	Sragen	16	120	136	16.320.000.000	16	1.916.357.500	11,74%	16	11,76
122	Banjarnegara	27	20	47	5.640.000.000	47	5.619.014.000	99,63%	47	100,00
123	Sukoharjo	30	15	45	5.400.000.000	45	5.325.536.500	98,62%	45	100,00
124	Banyumas	35	34	69	8.280.000.000	59	6.935.666.900	83,76%	59	85,51
125	Pati	34	3	37	4.440.000.000	37	4.367.740.750	98,37%	37	100,00
126	Kudus	25	5	30	3.600.000.000	30	3.597.478.500	99,93%	30	100,00
127	Rembang	60	100	160	19.200.000.000	160	18.899.724.300	98,44%	160	100,00
128	Magelang	33	55	88	10.560.000.000	88	10.451.859.000	98,98%	88	100,00
129	Wonosobo	6	2	8	960.000.000	8	957.060.200	99,69%	8	100,00
130	Batang	30	15	45	5.400.000.000	45	5.395.120.500	99,91%	45	100,00
131	Kebumen	40	34	74	8.880.000.000	59	7.013.333.000	78,98%	59	79,73
132	Punworejo	20	17	37	4.440.000.000	32	3.779.609.200	85,13%	32	86,49
133	Demak	33	31	64	7.680.000.000	33	3.938.485.900	51,28%	33	51,56
134	Jepara	22	8	30	3.600.000.000	30	3.599.171.000	99,98%	30	100,00
135	Semarang	9	13	22	2.640.000.000	22	2.612.996.500	98,98%	22	100,00
136	Klaten	40		40	4.800.000.000	40	4.748.617.700	98,93%	40	100,00
137	Temanggung	7	1	8	960.000.000	8	956.400.400	99,63%	8	100,00
138	Wonogiri	16		16	1.920.000.000	16	1.895.409.500	98,72%	16	100,00
139	Boyolali	40	34	74	8.880.000.000	74	8.710.140.000	98,09%	74	100,00
140	Karanganyar	4		4	480.000.000	4	480.060.200	100,01%	4	100,00
141	Pekalongan	28	8	36	4.320.000.000	36	4.286.960.000	99,24%	36	100,00
142	Blora	55	56	111	13.320.000.000	111	13.094.129.700	98,30%	111	100,00
143	Brebes	40	3	43	5.160.000.000	40	4.762.890.400	92,30%	40	93,02
144	Cilacap	70	94	164	19.680.000.000	164	19.268.971.000	97,91%	164	100,00
145	Grobogan	50	50	100	12.000.000.000	100	11.814.270.000	98,45%	100	100,00
12	DI. YOGYAKARTA	46	12	58	7.029.620.000	58	7.019.215.700	99,85%	58	100,00
	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta				105.820.000	-	105.816.000	100,00%		
146	Bantul	2	5	7	839.850.000	7	839.850.000	100,00%	7	100,00
147	Gunungkidul	37	2	39	4.644.475.000	39	4.634.075.000	99,78%	39	100,00
148	Kulon Progo	4	5	9	1.079.700.000	9	1.079.700.000	100,00%	9	100,00
149	Sleman	3		3	359.775.000	3	359.774.700	100,00%	3	100,00

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU				REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT		(Rp)	TOTAL	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
		REF	ABT	TOTAL						
13	JAWA TIMUR	1.183	840	2.023	244.097.919.000	2.023	240.287.240.072	98,44%	2.023	100,00
	Provinsi Jawa Timur		150	150	19.337.919.000	150	19.005.987.927	98,28%	150	100,00
150	Bangkalan	78	62	140	16.800.000.000	140	16.799.522.355	100,00%	140	100,00
151	Banyuwangi	5		5	600.000.000	5	564.750.000	94,13%	5	100,00
152	Blitar	30	5	35	4.200.000.000	35	4.133.362.000	98,41%	35	100,00
153	Bojonegoro	18		18	2.160.000.000	18	2.094.528.000	96,97%	18	100,00
154	Bondowoso	20	57	77	9.240.000.000	77	9.086.486.800	98,34%	77	100,00
155	Gresik	16	6	22	2.640.000.000	22	2.583.018.000	97,84%	22	100,00
156	Jember	100	38	138	16.560.000.000	138	15.990.037.640	96,56%	138	100,00
157	Jombang	12	61	73	8.760.000.000	73	8.545.093.170	97,55%	73	100,00
158	Kediri	10	27	37	4.440.000.000	37	4.422.200.000	99,60%	37	100,00
159	Lamongan	120	29	149	17.880.000.000	149	17.516.422.180	97,97%	149	100,00
160	Lumajang	77	77	154	18.480.000.000	154	18.251.050.000	98,76%	154	100,00
161	Madiun	20	1	21	2.520.000.000	21	2.487.701.080	98,72%	21	100,00
162	Magetan	3		3	360.000.000	3	354.000.000	98,33%	3	100,00
163	Malang	11	10	21	2.520.000.000	21	2.517.050.000	99,88%	21	100,00
164	Nganjuk	40	32	72	8.640.000.000	72	8.540.865.700	98,85%	72	100,00
165	Ngawi	25		25	3.000.000.000	25	3.000.000.000	100,00%	25	100,00
166	Pacitan	75	47	122	14.640.000.000	122	14.611.098.000	99,80%	122	100,00
167	Pamekasan	59	28	87	10.440.000.000	87	10.440.000.000	100,00%	87	100,00
168	Ponorogo	8	7	15	1.800.000.000	15	1.798.890.000	99,94%	15	100,00
169	Probolinggo	5	7	12	1.440.000.000	12	1.439.392.800	99,96%	12	100,00
170	Sampang	45	11	56	6.720.000.000	56	6.667.354.500	99,22%	56	100,00
171	Sidoarjo	50	40	90	10.800.000.000	90	10.728.950.000	99,34%	90	100,00
172	Situbondo	97	40	137	16.440.000.000	137	15.865.068.000	96,50%	137	100,00
173	Sumenep	140	39	179	21.480.000.000	179	20.949.529.700	97,53%	179	100,00
174	Trenggalek	45	11	56	6.720.000.000	56	6.623.028.600	98,56%	56	100,00
175	Tuban	67	4	71	8.520.000.000	71	8.326.635.120	97,73%	71	100,00
176	Tulungagung	3	44	47	5.640.000.000	47	5.634.644.500	99,91%	47	100,00
177	Pasuruan		7	7	840.000.000	7	835.974.000	99,52%	7	100,00
178	Kota Malang			-	-	-	-			
179	Kota Probolinggo	1		1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00
180	Kota Surabaya	3		3	360.000.000	3	354.600.000	98,50%	3	100,00
14	BANTEN	338	240	578	69.729.290.000	571	67.646.590.000	97,01%	571	98,79
	Provinsi Banten		75	75	9.369.290.000	75	9.031.090.000	96,39%	75	100,00
181	Lebak	155	45	200	24.000.000.000	193	22.529.000.000	93,87%	193	96,50
182	Pandeglang	85	46	131	15.720.000.000	131	15.448.000.000	98,27%	131	100,00
183	Serang	55	46	101	12.120.000.000	101	12.118.500.000	99,99%	101	100,00
184	Tangerang	28	25	53	6.360.000.000	53	6.360.000.000	100,00%	53	100,00
185	Kota Serang	15	3	18	2.160.000.000	18	2.160.000.000	100,00%	18	100,00
15	BALI	15	-	15	1.807.567.000	15	1.783.978.550	98,70%	15	100,00
	Provinsi Bali				7.567.000	-	7.543.250	99,69%		
186	Jembrana	1		1	120.000.000	1	119.935.000	99,95%	1	
187	Buleleng	14		14	1.680.000.000	14	1.656.500.300	98,60%	14	100,00
16	NTB	251	191	442	53.271.563.000	400	47.552.555.855	89,26%	400	90,50
	Provinsi Nusa Tenggara Barat		75	75	9.231.563.000	75	8.981.394.000	97,29%	75	100,00
188	Bima	49	35	84	10.080.000.000	49	5.865.184.000	58,19%	49	58,33
189	Dompu	13		13	1.560.000.000	13	1.538.000.000	98,59%	13	100,00
190	Lombok Barat	8	19	27	3.240.000.000	27	3.208.090.000	99,02%	27	100,00
191	Lombok Tengah	28	9	37	4.440.000.000	37	4.424.650.000	99,65%	37	100,00
192	Lombok Timur	11	26	37	4.440.000.000	37	4.363.350.000	98,27%	37	100,00
193	Lombok Utara	7	12	19	2.280.000.000	19	2.279.970.000	100,00%	19	100,00
194	Sumbawa	97	11	108	12.960.000.000	108	12.683.767.855	97,87%	108	100,00
195	Kota Bima	7	2	9	1.080.000.000	7	841.650.000	77,93%	7	77,78
196	Sumbawa Barat	26		26	3.120.000.000	26	3.119.900.000	100,00%	26	100,00
197	Kota Mataram	5	2	7	840.000.000	2	246.600.000	29,36%	2	28,57
17	NTT	111	108	219	26.382.916.000	219	26.182.297.300	99,24%	219	100,00
	Provinsi Nusa Tenggara Timur		75	75	9.102.916.000	75	9.095.797.300	99,92%	75	100,00
198	Kupang	9	8	17	2.040.000.000	17	2.016.950.000	98,87%	17	100,00
199	Timor Tengah Utara	5	2	7	840.000.000	7	833.950.000	99,28%	7	100,00
200	Manggarai	6	1	7	840.000.000	7	832.300.000	99,08%	7	100,00
201	Sumba Barat	14		14	1.680.000.000	14	1.659.950.000	98,81%	14	100,00
202	Sumba Timur	8	3	11	1.320.000.000	11	1.301.150.000	98,57%	11	100,00
203	Rote Ndao	7	2	9	1.080.000.000	9	1.066.800.000	98,78%	9	100,00
204	Manggarai Barat	7	3	10	1.200.000.000	10	1.180.300.000	98,36%	10	100,00

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU				REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT			(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
		REF	ABT	TOTAL	TOTAL					
205	Ngada	5	2	7	840.000.000	7	832.900.000	99,15%	7	100,00
206	Sumba Barat Daya	8	3	11	1.320.000.000	11	1.307.300.000	99,04%	11	100,00
207	Sumba Tengah	4		4	480.000.000	4	472.450.000	98,43%	4	100,00
208	Manggarai Timur	7		7	840.000.000	7	829.450.000	98,74%	7	100,00
209	Sabu Raijua	2		2	240.000.000	2	237.650.000	99,02%	2	100,00
210	Ende	3	2	5	600.000.000	5	593.600.000	98,93%	5	100,00
211	Malaka	7	2	9	1.080.000.000	9	1.069.350.000	99,01%	9	100,00
212	Timor Tengah Selatan	5		5	600.000.000	5	593.450.000	98,91%	5	100,00
213	Alor	5		5	600.000.000	5	595.850.000	99,31%	5	100,00
214	Sikka	6	4	10	1.200.000.000	10	1.187.650.000	98,97%	10	100,00
215	Nagekeo	2		2	240.000.000	2	237.200.000	98,83%	2	100,00
216	Kota Kupang	1	1	2	240.000.000	2	238.250.000	99,27%	2	100,00
217	Belu			-	-	-	-	-		
18	KALIMANTAN BARAT	149	63	212	25.559.565.000	212	25.250.923.877	98,79%	212	100,00
	Provinsi Kalimantan Barat		50	50	6.119.565.000	50	5.988.674.777	97,86%	50	100,00
218	Bengkayang	18		18	2.160.000.000	18	2.142.000.000	99,17%	18	100,00
219	Landak	33	3	36	4.320.000.000	36	4.269.675.300	98,84%	36	100,00
220	Kapuas Hulu	14		14	1.680.000.000	14	1.660.150.000	98,82%	14	100,00
221	Ketapang	23		23	2.760.000.000	23	2.736.699.000	99,16%	23	100,00
222	Mempawah	3		3	360.000.000	3	356.250.000	98,96%	3	100,00
223	Sambas	25		25	3.000.000.000	25	2.978.394.800	99,28%	25	100,00
224	Sintang	4	1	5	600.000.000	5	598.860.000	99,81%	5	100,00
225	Kota Singkawang	1		1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00
226	Kubu Raya	21		21	2.520.000.000	21	2.483.870.000	98,57%	21	100,00
227	Kayong Utara	5		5	600.000.000	5	600.000.000	100,00%	5	100,00
228	Sekadau	2	4	6	720.000.000	6	717.600.000	99,67%	6	100,00
228	Melawi		5	5	600.000.000	5	598.750.000	99,79%	5	100,00
19	KALIMANTAN TENGAH	56	55	111	13.369.944.000	88	10.495.681.315	78,50%	88	79,28
	Provinsi Kalimantan Tengah		20	20	2.455.444.000	-	81.185.000	3,31%		
229	Barito Selatan			-	-	-	-	-		
230	Barito Utara	10		10	1.205.000.000	10	1.204.830.000	99,99%	10	100,00
231	Kapuas	22		22	2.607.000.000	22	2.567.399.115	98,48%	22	100,00
232	Katingan			-	-	-	-	-		
233	Seruyan	7	5	12	1.440.000.000	12	1.406.990.000	97,71%	12	100,00
234	Sukamara			-	-	-	-	-		
235	Pulang Pisau		22	22	2.658.500.000	22	2.657.760.000	99,97%	22	100,00
236	Lamandau	2	2	4	480.000.000	4	472.097.200	98,35%	4	100,00
237	Gunung Mas			-	-	-	-	-		
238	Barito Timur	5		5	600.000.000	5	600.000.000	100,00%	5	100,00
239	Kotawaringin Barat			-	-	-	-	-		
240	Kotawaringin Timur	10		10	1.200.000.000	10	1.167.020.000	97,25%	10	100,00
241	Kota Palangkaraya		6	6	724.000.000	3	338.400.000	46,74%	3	50,00
20	KALIMANTAN SELATAN	108	85	193	23.282.592.000	115	13.822.205.700	59,37%	115	59,59
	Provinsi Kalimantan Selatan		50	50	6.122.592.000	3	519.193.200	8,48%	3	6,00
242	Banjarnegara	11	3	14	1.680.000.000	11	1.296.350.000	77,16%	11	78,57
243	Barito Kuala	22	1	23	2.760.000.000	22	2.608.683.000	94,52%	22	95,65
244	Hulu Sungai Selatan	9		9	1.080.000.000	9	1.075.385.000	99,57%	9	100,00
245	Hulu Sungai Tengah	3	2	5	600.000.000	3	364.100.000	60,68%	3	60,00
246	Hulu Sungai Utara	6	2	8	960.000.000	6	698.740.000	72,79%	6	75,00
247	Kotabaru	3	5	8	960.000.000	-	-	0,00%		-
248	Tabalong	4		4	480.000.000	4	481.734.500	100,36%	4	100,00
249	Tanah Laut	17	14	31	3.720.000.000	17	1.978.380.000	53,18%	17	54,84
250	Tapin	8		8	960.000.000	8	976.800.000	101,75%	8	100,00
251	Kota Banjarmasin	1	1	2	240.000.000	1	120.750.000	50,31%	1	50,00
252	Balangan	3	1	4	480.000.000	4	481.800.000	100,38%	4	100,00
253	Tanah Bumbu	21	5	26	3.120.000.000	26	3.100.290.000	99,37%	26	100,00
254	Kota Banjarbaru		1	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00
21	KALIMANTAN TIMUR	14	7	21	2.529.080.000	21	2.509.733.000	99,24%	21	100,00
	Provinsi Kalimantan Timur			-	9.080.000	-	9.070.000	99,89%		
255	Berau	4	2	6	720.000.000	6	717.763.000	99,69%	6	100,00
256	Kutai Kartanegara	4	3	7	840.000.000	7	827.920.000	98,56%	7	100,00
257	Kutai Timur	3		3	360.000.000	3	356.980.000	99,16%	3	100,00
258	Penajam Paser Utara	3		3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00
259	Paser		2	2	240.000.000	2	238.000.000	99,17%	2	100,00

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU			REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
		UNIT			(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
		REF	ABT	TOTAL	TOTAL					
22	KALIMANTAN UTARA	19	11	30	3.613.621.000	30	3.613.107.410	99,99%	30	100,00
	Provinsi Kalimantan Utara				13.621.000	-	13.621.000	100,00%	16	100,00
260	Bulungan	10	6	16	1.920.000.000	16	1.920.000.000	100,00%	16	100,00
261	Malinau	3		3	360.000.000	3	359.999.500	100,00%	3	100,00
262	Nunukan	6	5	11	1.320.000.000	11	1.319.486.910	99,96%	11	100,00
23	SULAWESI UTARA	64	42	106	12.763.891.000	105	12.680.752.000	99,35%	105	99,06
	Provinsi Sulawesi Utara		25	25	3.043.891.000	24	3.157.202.000	103,72%	24	96,00
263	Bolaang Mongondow	13	10	23	2.760.000.000	23	2.711.900.000	98,26%	23	100,00
264	Bolaang Mongondow Utara	9	1	10	1.200.000.000	10	1.184.100.000	98,68%	10	100,00
265	Bolaang Mongondow Timur	10	2	12	1.440.000.000	12	1.422.100.000	98,76%	12	100,00
266	Bolaang Mongondow Selatan	7	1	8	960.000.000	8	934.200.000	97,31%	8	100,00
267	Minahasa	2	1	3	360.000.000	3	346.350.000	96,21%	3	100,00
268	Minahasa Selatan	13		13	1.560.000.000	13	1.522.100.000	97,57%	13	100,00
269	Minahasa Utara	3	1	4	480.000.000	4	469.750.000	97,86%	4	100,00
270	Minahasa Tenggara	3		3	360.000.000	3	355.800.000	98,83%	3	100,00
271	Kota Tomohon	4	1	5	600.000.000	5	577.250.000	96,21%	5	100,00
24	SULAWESI TENGAH	54	34	88	10.599.350.000	85	10.237.487.780	96,59%	85	96,59
	Provinsi Sulawesi Tengah				39.350.000	-	39.217.780	99,66%		
272	Banggai	5	6	11	1.320.000.000	11	1.318.447.000	99,88%	11	100,00
273	Buol	14	3	17	2.040.000.000	17	2.040.000.000	100,00%	17	100,00
274	Toli Toli	8		8	960.000.000	8	959.823.000	99,98%	8	100,00
275	Morowali	6	3	9	1.080.000.000	6	720.000.000	66,67%	6	66,67
276	Morowali Utara	9	5	14	1.680.000.000	14	1.680.000.000	100,00%	14	100,00
277	Poso	5	4	9	1.080.000.000	9	1.080.000.000	100,00%	9	100,00
278	Sigi	1		1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00
279	Donggala	6	8	14	1.680.000.000	14	1.680.000.000	100,00%	14	100,00
280	Banggai Laut		1	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00
281	Parigi Moutong		4	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00
25	SULAWESI SELATAN	340	234	574	69.220.533.000	574	68.625.366.016	99,14%	574	100,00
	Provinsi Sulawesi Selatan		100	100	12.340.533.000	100	12.311.397.162	99,76%	100	100,00
282	Barru	25	9	34	4.080.000.000	34	4.072.850.000	99,82%	34	100,00
283	Bone	69		69	8.280.000.000	69	8.095.950.000	97,78%	69	100,00
284	Gowa	27	14	41	4.920.000.000	41	4.858.350.000	98,75%	41	100,00
285	Jeneponto	23	10	33	3.960.000.000	33	3.909.930.000	98,74%	33	100,00
286	Luwu	13	1	14	1.680.000.000	14	1.680.000.000	100,00%	14	100,00
287	Luwu Utara	6		6	720.000.000	6	711.000.000	98,75%	6	100,00
288	Maros	12		12	1.440.000.000	12	1.440.000.000	100,00%	12	100,00
289	Pangkajene dan Kepulauan	10	5	15	1.800.000.000	15	1.757.200.000	97,62%	15	100,00
290	Kepulauan Selayar	6	3	9	1.080.000.000	9	1.060.400.000	98,19%	9	100,00
291	Sidenreng Rappang	15	5	20	2.400.000.000	20	2.374.810.000	98,95%	20	100,00
292	Sinjai	27	15	42	5.040.000.000	42	5.028.383.354	99,77%	42	100,00
293	Takalar	15	17	32	3.840.000.000	32	3.839.990.000	100,00%	32	100,00
294	Tana Toraja	18	10	28	3.360.000.000	28	3.357.724.000	99,93%	28	100,00
295	Wajo	21	23	44	5.280.000.000	44	5.201.100.000	98,51%	44	100,00
296	Luwu Timur	7		7	840.000.000	7	830.570.000	98,88%	7	100,00
297	Toraja Utara	12	9	21	2.520.000.000	21	2.499.930.000	99,20%	21	100,00
298	Pinrang	15	3	18	2.160.000.000	18	2.155.500.000	99,79%	18	100,00
299	Soppeng	4	5	9	1.080.000.000	9	1.074.180.000	99,46%	9	100,00
300	Enrekang	15	3	18	2.160.000.000	18	2.126.102.500	98,43%	18	100,00
301	Kota Makassar		2	2	240.000.000	2	239.999.000	100,00%	2	100,00
26	SULAWESI TENGGARA	111	84	195	23.481.728.000	195	23.481.728.000	100,00%	195	100,00
	Provinsi Sulawesi Tenggara		50	50	6.081.728.000	50	6.081.728.000	100,00%	50	100,00
302	Buton Utara	4		4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00
303	Konawe	10		10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	100,00%	10	100,00
303	Konawe Kepulauan	3		3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00
304	Konawe Selatan	31	11	42	5.040.000.000	42	5.040.000.000	100,00%	42	100,00
305	Konawe Utara	8		8	960.000.000	8	960.000.000	100,00%	8	100,00
306	Kolaka Timur	7		7	840.000.000	7	840.000.000	100,00%	7	100,00
307	Bombana	26	23	49	5.880.000.000	49	5.880.000.000	100,00%	49	100,00
308	Kolaka	6		6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00
309	Kota Bau Bau	2		2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00
310	Wakatobi			-	-	-	-			
311	Buton	4		4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00
312	Muna	3		3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00
313	Muna Barat	4		4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00
314	Kolaka Utara	2		2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00
315	Kota Kendari	1		1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU				REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT		TOTAL	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
		REF	ABT							
27	GORONTALO	69	65	134	16.142.052.000	124	14.976.840.750	92,78%	124	92,54
	Provinsi Gorontalo		25	25	3.062.052.000	-	172.448.750	5,63%		
316	Boalemo	6	5	11	1.320.000.000	9	1.077.000.000	81,59%	9	81,82
317	Gorontalo	25	23	48	5.760.000.000	55	6.581.492.000	114,26%	55	114,58
318	Pohuwato	15	12	27	3.240.000.000	30	3.577.000.000	110,40%	30	111,11
319	Gorontalo Utara	20		20	2.400.000.000	27	3.212.000.000	133,83%	27	135,00
320	Bone Bolango	3		3	360.000.000	3	356.900.000	99,14%	3	100,00
28	SULAWESI BARAT	29	29	58	6.979.675.000	58	6.948.742.400	99,56%	58	100,00
	Provinsi Sulawesi Barat			-	19.675.000	-	30.467.400	154,85%		
321	Mamuju	5	25	30	3.600.000.000	30	3.571.380.000	99,21%	30	100,00
322	Polewali Mandar	13		13	1.560.000.000	13	1.560.000.000	100,00%	13	100,00
323	Mamasa	6	2	8	960.000.000	8	947.555.000	98,70%	8	100,00
324	Majene	2		2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00
325	Mamuju Tengah	1	2	3	360.000.000	3	359.340.000	99,82%	3	100,00
326	Pasangkayu	2		2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00
29	MALUKU	-	6	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00
	Provinsi Maluku			-	-	-	-	#DIV/0!		
327	Buru		2	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00
328	Maluku Tengah		4	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00
30	MALUKU UTARA	24	11	35	4.209.080.000	35	4.209.000.000	100,00%	35	100,00
	Provinsi Maluku Utara			-	9.080.000	-	9.000.000	99,12%		
329	Halmahera Tengah	3	4	7	840.000.000	7	840.000.000	100,00%	7	100,00
330	Halmahera Barat	3	1	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00
331	Halmahera Selatan	4	2	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00
332	Halmahera Timur	5	1	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00
333	Halmahera Utara	3		3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00
334	Kota Tidore Kepulauan	2	1	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00
335	Pulau Morotai	4	2	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00
31	PAPUA SELATAN	9	-	9	1.084.540.000	9	1.015.200.000	93,61%	9	100,00
	Provinsi Papua Selatan				4.540.000	-	-	0,00%		
336	Merauke	9		9	1.080.000.000	9	1.015.200.000	94,00%	9	100,00
32	PAPUA BARAT	8	-	8	961.529.000	8	961.529.000	100,00%	8	100,00
	Provinsi Papua Barat			-	1.529.000	-	1.529.000	100,00%		
337	Manokwari	4		4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00
338	Fak Fak	2		2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00
339	Teluk Bintuni	2		2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00
33	PAPUA BARAT DAYA	-	3	3	360.000.000	3	354.600.000	98,50%	3	100,00
	Provinsi Papua Barat Daya			-	-	-	-	#DIV/0!		
340	Sorong		3	3	360.000.000	3	354.600.000	98,50%	3	100,00
341	Sorong Selatan			-	-	-	-			

**Lampiran 9. Data Capaian Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan
TA 2019 – 2023**

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TA 2018						
		TARGET		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
	NASIONAL	1.071	100.413.700.000	1.064	99.344.130.000	98,93	1.064	99,31
1	ACEH	58	5.056.800.000	58	5.056.800.000	100,00	58	100
2	SUMATERA UTARA	63	5.387.600.000	63	5.387.600.000	100,00	63	100
3	SUMATERA BARAT	32	2.732.800.000	32	2.726.800.000	99,78	32	100
4	RIAU	23	1.912.400.000	23	1.910.600.000	99,91	23	100
5	JAMBI	32	2.732.800.000	32	2.732.800.000	100,00	32	100
6	SUMATERA SELATAN	54	4.892.800.000	54	4.892.680.000	100,00	54	100
7	BENGKULU	19	1.630.000.000	15	1.192.500.000	73	15	90
8	LAMPUNG	51	4.747.600.000	51	4.747.600.000	100,00	51	100
9	BANGKA BELITUNG	3	293.200.000	3	293.200.000	100,00	3	100
10	JAWA BARAT	102	9.080.800.000	101	8.973.200.000	98,82	101	99
11	JAWA TENGAH	152	14.105.600.000	152	14.066.453.000	99,72	152	100
12	DI. YOGYAKARTA	29	2.528.400.000	29	2.440.530.000	96,52	29	100
13	JAWA TIMUR	142	12.674.400.000	140	12.386.389.000	97,73	140	91
14	BANTEN	23	2.119.600.000	23	2.119.600.000	100,00	23	100
15	BALI	27	2.655.000.000	27	2.655.000.000	100	27	100
17	NTT	41	4.898.100.000	41	4.898.100.000	100,00	41	100
18	KALIMANTAN BARAT	18	1.863.000.000	18	1.863.000.000	100,00	18	100
19	KALIMANTAN TENGAH	5	440.000.000	5	440.000.000	100,00	5	100
20	KALIMANTAN SELATAN	32	3.498.000.000	32	3.498.000.000	100,00	32	100
21	KALIMANTAN TIMUR	8	735.000.000	8	735.000.000	100,00	8	100
22	SULAWESI UTARA	18	1.894.000.000	18	1.894.000.000	100,00	18	100
23	SULAWESI TENGAH	23	2.303.000.000	23	2.303.000.000	100,00	23	100
24	SULAWESI SELATAN	51	5.573.000.000	51	5.568.218.000	99,91	51	100
25	SULAWESI TENGGARA	13	1.330.000.000	13	1.250.723.000	94,04	13	100
26	GORONTALO	4	414.000.000	4	414.000.000	100,00	4	100
27	SULAWESI BARAT	10	973.000.000	10	973.000.000	100,00	10	100
28	MALUKU UTARA	9	1.203.600.000	9	1.203.600.000	100,00	9	100
29	PAPUA BARAT	6	715.200.000	6	715.200.000	100,00	6	100

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TA 2019						
		PAGU		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		Unit	Rp	Unit	Rp	%	UNIT	%
	NASIONAL	567	65.330.000.000	535	60.689.381.389	92,90%	535	94,36%
1	ACEH	17	1.711.000.000	17	1.656.524.000	96,82%	17	100,00%
2	SUMATERA UTARA	10	1.046.000.000	10	1.045.344.000	99,94%	10	100,00%
3	SUMATERA BARAT	10	1.014.000.000	10	1.011.846.400	99,79%	10	100,00%
4	RIAU	4	380.000.000	4	376.680.000	99,13%	4	100,00%
5	JAMBI	21	2.347.000.000	16	1.792.300.000	76,37%	16	76,19%
6	SUMATERA SELATAN	30	3.522.000.000	27	3.076.222.200	87,34%	27	90,00%
7	BENGKULU	6	634.000.000	6	621.041.000	97,96%	6	100,00%
8	LAMPUNG	22	2.474.000.000	22	2.471.488.000	99,90%	22	100,00%
9	BANGKA BELITUNG	6	698.000.000	6	696.845.000	99,83%	6	100,00%
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-
11	JAWA BARAT	43	4.597.000.000	43	4.437.835.000	96,54%	43	100,00%
12	JAWA TENGAH	66	7.166.000.000	60	6.367.095.848	88,85%	60	90,91%
13	DI. YOGYAKARTA	20	2.220.000.000	20	2.218.282.803	99,92%	20	100,00%
14	JAWA TIMUR	69	7.611.000.000	61	6.644.466.900	87,30%	61	88,41%
15	BANTEN	11	1.109.000.000	11	1.109.000.000	100,00%	11	100,00%
16	BALI	17	1.960.000.000	17	1.941.795.770	99,07%	17	100,00%
17	NTB	31	3.605.000.000	28	3.110.004.468	86,27%	28	90,32%
18	NTT	24	3.257.000.000	24	3.156.185.000	96,90%	24	100,00%
19	KALIMANTAN BARAT	11	1.260.000.000	11	1.255.012.700	99,60%	11	100,00%
20	KALIMANTAN TENGAH	2	210.000.000	2	200.612.000	95,53%	2	100,00%
21	KALIMANTAN SELATAN	21	2.625.000.000	15	1.940.835.000	73,94%	15	71,43%
22	KALIMANTAN TIMUR	11	1.190.000.000	10	1.028.702.400	86,45%	10	90,91%
23	KALIMANTAN UTARA	2	280.000.000	2	274.940.000	98,19%	2	100,00%
24	SULAWESI UTARA	16	1.855.000.000	16	1.838.087.000	99,09%	16	100,00%
25	SULAWESI TENGAH	24	3.185.000.000	24	3.183.800.000	99,96%	24	100,00%
26	SULAWESI SELATAN	34	4.445.000.000	34	4.396.501.400	98,91%	34	100,00%
27	SULAWESI TENGGARA	9	1.085.000.000	9	1.048.612.000	96,65%	9	100,00%
28	GORONTALO	2	245.000.000	2	244.472.500	99,78%	2	100,00%
29	SULAWESI BARAT	10	1.295.000.000	10	1.240.850.000	95,82%	10	100,00%
30	MALUKU	2	256.000.000	2	256.000.000	100,00%	2	100,00%
31	MALUKU UTARA	5	640.000.000	5	640.000.000	100,00%	5	100,00%
32	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-
33	PAPUA BARAT	11	1.408.000.000	11	1.408.000.000	100,00%	11	100,00%

NO	PROPINSI	TA 2020						
		TARGET		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
	TOTAL	1.000	124.817.000.000	1.000	123.347.168.521	98,82	1.000	100,00
1	ACEH	60	6.756.000.000	60	6.737.666.000	99,73	60	100,00
2	SUMATERA UTARA	26	3.238.000.000	26	3.139.678.000	96,96	26	100,00
3	SUMATERA BARAT	30	3.458.000.000	30	3.442.875.000	99,56	30	100,00
4	RIAU	15	1.905.000.000	15	1.897.470.000	99,60	15	100,00
5	JAMBI	18	2.286.000.000	18	2.256.000.000	98,69	18	100,00
6	SUMATERA SELATAN	65	7.519.000.000	65	7.399.767.000	98,41	65	100,00
7	BENGKULU	12	1.332.000.000	12	1.320.180.000	99,11	12	100,00
8	LAMPUNG	44	5.140.000.000	44	5.132.158.000	99,85	44	100,00
9	BANGKA BELITUNG	11	1.333.000.000	11	1.331.650.000	99,90	11	100,00
10	JAWA BARAT	51	5.741.000.000	51	5.728.665.800	99,79	51	100,00
11	JAWA TENGAH	90	10.662.000.000	90	10.298.015.075	96,59	90	100,00
12	DI. YOGYAKARTA	9	1.079.000.000	9	1.078.518.670	99,96	9	100,00
13	JAWA TIMUR	52	6.156.000.000	52	5.923.121.300	96,22	52	100,00
14	BANTEN	22	2.506.000.000	22	2.506.000.000	100,00	22	100,00
15	BALI	16	1.820.000.000	16	1.808.393.892	99,36	16	100,00
16	NTB	44	5.565.000.000	44	5.551.989.500	99,77	44	100,00
17	NTT	49	7.715.000.000	49	7.605.768.000	98,58	49	100,00
18	KALIMANTAN BARAT	27	3.360.000.000	27	3.345.962.600	99,58	27	100,00
19	KALIMANTAN TENGAH	12	1.680.000.000	12	1.638.849.000	97,55	12	100,00
20	KALIMANTAN SELATAN	30	3.955.000.000	30	3.900.328.000	98,62	30	100,00
21	KALIMANTAN TIMUR	15	1.855.000.000	15	1.816.020.000	97,90	15	100,00
22	KALIMANTAN UTARA	17	2.100.000.000	17	2.088.410.000	99,45	17	100,00
24	SULAWESI UTARA	50	6.335.000.000	50	6.244.410.000	98,57	50	100,00
24	SULAWESI TENGAH	23	3.010.000.000	23	3.009.880.000	100,00	23	100,00
25	SULAWESI SELATAN	88	11.305.000.000	88	11.197.914.684	99,05	88	100,00
26	SULAWESI TENGGARA	51	6.615.000.000	51	6.610.750.000	99,94	51	100,00
27	GORONTALO	13	1.715.000.000	13	1.714.621.000	99,98	13	100,00
28	SULAWESI BARAT	9	1.260.000.000	9	1.207.107.000	95,80	9	100,00
29	MALUKU	15	2.290.000.000	15	2.290.000.000	100,00	15	100,00
30	MALUKU UTARA	12	1.832.000.000	12	1.832.000.000	100,00	12	100,00
31	PAPUA	2	256.000.000	2	255.000.000	99,61	2	100,00
32	PAPUA BARAT	22	3.038.000.000	22	3.038.000.000	100,00	22	100,00

NO	PROPINSI	TA 2021						
		TARGET		REALISASI KEUANGAN			FISIK	
		UNIT	(Rp)	Unit	Rp	(%)	UNIT	%
	TOTAL	688	85.387.888.000	688	84.808.312.435	99,32%	688	100,00%
1	ACEH	28	3.012.000.000	28	3.002.494.588	99,68%	28	100,00%
2	SUMATERA UTARA	6	762.000.000	6	760.620.000	99,82%	6	100,00%
3	SUMATERA BARAT	13	1.587.000.000	13	1.580.520.000	99,59%	13	100,00%
4	RIAU	5	672.200.000	5	665.818.000	99,05%	5	100,00%
5	JAMBI	7	889.000.000	7	889.000.000	100,00%	7	100,00%
6	SUMATERA SELATAN	36	4.153.000.000	36	4.133.551.000	99,53%	36	100,00%
7	BENGKULU	8	796.000.000	8	779.000.000	97,86%	8	100,00%
8	LAMPUNG	36	4.220.000.000	36	4.218.656.000	99,97%	36	100,00%
9	BANGKA BELITUNG	6	881.400.000	6	881.320.000	99,99%	6	100,00%
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-
11	JAWA BARAT	44	4.884.000.000	44	4.878.294.000	99,88%	44	100,00%
12	JAWA TENGAH	81	9.040.200.000	81	8.905.682.500	98,51%	81	100,00%
13	DI. YOGYAKARTA	14	1.650.000.000	14	1.648.780.000	99,93%	14	100,00%
14	JAWA TIMUR	66	7.650.000.000	66	7.406.001.500	96,81%	66	100,00%
15	BANTEN	14	1.586.000.000	14	1.586.000.000	100,00%	14	100%
16	BALI	14	1.715.000.000	14	1.674.322.547	97,63%	14	100,00%
17	NTB	17	2.590.000.000	17	2.590.000.000	100,00%	17	100,00%
18	NTT	38	5.603.088.000	38	5.598.328.000	99,92%	38	100,00%
19	KALIMANTAN BARAT	7	805.000.000	7	803.699.100	99,84%	7	100,00%
20	KALIMANTAN TENGAH	9	1.331.000.000	9	1.310.022.000	98,42%	9	100,00%
21	KALIMANTAN SELATAN	18	2.275.000.000	18	2.265.673.000	99,59%	18	100,00%
22	KALIMANTAN TIMUR	15	1.785.000.000	15	1.782.690.300	99,87%	15	100,00%
23	KALIMANTAN UTARA	6	770.000.000	6	770.000.000	100,00%	6	100,00%
24	SULAWESI UTARA	30	4.039.000.000	30	4.037.116.000	99,95%	30	100,00%
25	SULAWESI TENGAH	26	3.255.000.000	26	3.255.000.000	100,00%	26	100,00%
26	SULAWESI SELATAN	39	5.005.000.000	39	4.962.203.000	99,14%	39	100,00%
27	SULAWESI TENGGARA	28	3.570.000.000	28	3.570.000.000	100,00%	28	100,00%
28	GORONTALO	8	1.050.000.000	8	1.049.620.900	99,96%	8	100,00%
29	SULAWESI BARAT	13	1.645.000.000	13	1.643.900.000	99,93%	13	100,00%
30	MALUKU	16	2.344.000.000	16	2.344.000.000	100,00%	16	100,00%
31	MALUKU UTARA	16	2.381.000.000	16	2.381.000.000	100,00%	16	100,00%
32	PAPUA	3	384.000.000	3	377.000.000	98,18%	3	100,00%
33	PAPUA BARAT	21	3.058.000.000	21	3.058.000.000	100,00%	21	100,00%

NO	PROVINSI	TA 2022						
		TARGET		REALISASI KEUANGAN			FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	Rp	(%)	UNIT	%
	TOTAL	300	38.000.000.000	300	37.764.434.815	99,38%	300	100,00%
1	ACEH	9	983.000.000	9	979.836.000	99,68%	9	100,00%
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-	-	-	-
3	SUMATERA BARAT	8	888.000.000	8	849.190.000	95,63%	8	100,00%
4	RIAU	4	444.000.000	4	425.626.500	95,86%	4	100,00%
5	JAMBI	4	444.000.000	4	443.998.880	100,00%	4	100,00%
6	SUMATERA SELATAN	14	1.554.000.000	14	1.551.254.536	99,82%	14	100,00%
7	BENGKULU	7	761.000.000	7	760.100.000	99,88%	7	100,00%
8	LAMPUNG	9	983.000.000	9	981.926.000	99,89%	9	100,00%
9	BANGKA BELITUNG	4	444.000.000	4	443.960.000	99,99%	4	100,00%
10	KEPULAUAN RIAU			-	-		-	
11	JAWA BARAT	11	1.205.000.000	11	1.204.908.000	99,99%	11	100,00%
12	JAWA TENGAH	11	1.205.000.000	11	1.193.760.900	99,07%	11	100,00%
13	DI. YOGYAKARTA	4	444.000.000	4	444.000.000	100,00%	4	100,00%
14	JAWA TIMUR	13	1.491.000.000	13	1.484.367.000	99,56%	13	100,00%
15	BANTEN	2	254.000.000	2	254.000.000	100,00%	2	100%
16	BALI	10	1.260.000.000	10	1.209.447.150	95,99%	10	100,00%
17	NTB	8	1.015.000.000	8	1.015.000.000	100,00%	8	100,00%
18	NTT	45	6.574.000.000	45	6.570.980.000	99,95%	45	100,00%
19	KALIMANTAN BARAT	12	1.400.000.000	12	1.397.097.500	99,79%	12	100,00%
20	KALIMANTAN TENGAH	7	875.000.000	7	847.610.000	96,87%	7	100,00%
21	KALIMANTAN SELATAN	8	945.000.000	8	935.290.000	98,97%	8	100,00%
22	KALIMANTAN TIMUR	4	490.000.000	4	490.000.000	100,00%	4	100,00%
23	KALIMANTAN UTARA	4	490.000.000	4	489.701.830	99,94%	4	100,00%
24	SULAWESI UTARA	5	595.000.000	5	595.000.000	100,00%	5	100,00%
25	SULAWESI TENGAH	11	1.330.000.000	11	1.329.900.000	99,99%	11	100,00%
26	SULAWESI SELATAN	11	1.400.000.000	11	1.384.883.419	98,92%	11	100,00%
27	SULAWESI TENGGARA	11	1.330.000.000	11	1.330.000.000	100,00%	11	100,00%
28	GORONTALO	3	385.000.000	3	384.997.100	100,00%	3	100,00%
29	SULAWESI BARAT	6	735.000.000	6	735.000.000	100,00%	6	100,00%
30	MALUKU	17	2.472.000.000	17	2.472.000.000	100,00%	17	100,00%
31	MALUKU UTARA	14	2.051.000.000	14	2.051.000.000	100,00%	14	100,00%
32	PAPUA	8	1.209.000.000	8	1.209.000.000	100,00%	8	0,00%
33	PAPUA BARAT	16	2.344.000.000	16	2.300.600.000	98,15%	16	100,00%

NO	PROPINSI	TA 2023						
		TARGET		REALISASI KEUANGAN			FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
	TOTAL	7	1.086.800.000	7	1.067.752.800	98,25	7	100,00
1	ACEH	-	17.200.000	-	16.672.000	96,93	-	-
2	SUMATERA SELATAN	-	36.500.000	-	32.250.000	88,36	-	-
3	BENGKULU	-	8.500.000	-	8.430.000	99,18	-	-
4	BANGKA BELITUNG	-	35.000.000	-	34.975.000	99,93	-	-
5	JAWA TIMUR	-	750.000	-	-	-	-	-
6	NTB	-	26.000.000	-	25.800.000	99,23	-	-
7	KALIMANTAN BARAT	4	422.800.000	4	420.170.800	99,38	4	100,00
8	KALIMANTAN SELATAN	-	30.000.000	-	29.545.000	98,48	-	-
9	KALIMANTAN TIMUR	1	138.200.000	1	137.910.000	99,79	1	100,00
10	KALIMANTAN UTARA	-	14.850.000	-	5.000.000	33,67	-	-
11	SULAWESI UTARA	-	21.000.000	-	21.000.000	100,00	-	-
12	PAPUA BARAT	2	336.000.000	2	336.000.000	100,00	2	100,00

**Lampiran 10. Realisasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan
TA. 2024**

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
	NASIONAL	5.435	543.500.000.000	4.204	416.732.183.105	76,68	4.204	77,35%
1	ACEH	60	6.000.000.000	60	5.962.363.500	99,37%	60	100,00%
1	Aceh Barat	4	400.350.000	4	400.350.000	100,00%	4	100,00
2	Aceh Selatan		-	-	-			
3	Aceh Singkil		-	-	-			
4	Aceh Timur	12	1.197.280.000	12	1.197.280.000	100,00%	12	100,00
5	Aceh Utara	14	1.397.600.000	14	1.374.840.000	98,37%	14	100,00
6	Pidie	2	201.310.000	2	198.333.500	98,52%	2	100,00
7	Kota Subulussalam		-	-	-			
8	Simeulue	3	300.870.000	3	300.870.000	100,00%	3	100,00
9	Gayo Lues	9	899.680.000	9	899.680.000	100,00%	9	100,00
10	Aceh Jaya	3	300.870.000	3	300.870.000	100,00%	3	100,00
11	Aceh Besar	7	699.820.000	7	689.320.000	98,50%	7	100,00
12	Bireun	2	201.310.000	2	201.310.000	100,00%	2	100,00
13	Aceh Tenggara	4	400.910.000	4	399.510.000	99,65%	4	100,00
2	SUMATERA UTARA	60	6.000.000.000	60	5.989.914.000	99,83%	60	100,00%
	Provinsi Sumatera Utara		78.000.000		77.514.000	99,38%		
14	Deli Serdang		-	-	-			
15	Labuhanbatu Utara		-	-	-			
16	Langkat		-	-	-			
17	Mandailing Natal	12	1.184.400.000	12	1.184.400.000	100,00%	12	100,00
18	Nias	6	592.200.000	6	591.750.000	99,92%	6	100,00
19	Nias Selatan	6	592.200.000	6	592.200.000	100,00%	6	100,00
20	Nias Utara		-	-	-			
21	Tapanuli Selatan	7	690.900.000	7	687.750.000	99,54%	7	100,00
22	Pakpak Bharat	9	888.300.000	9	888.300.000	100,00%	9	100,00
23	Padang Lawas Utara	20	1.974.000.000	20	1.968.000.000	99,70%	20	100,00
24	Serdang Bedagai		-	-	-			
3	SUMATERA BARAT	114	11.400.000.000	114	11.311.375.200	99,22%	114	100,00%
25	Lima Puluh Kota	14	1.396.500.000	14	1.390.423.000	99,56%	14	100,00
26	Agam	12	1.199.000.000	12	1.189.015.700	99,17%	12	100,00
27	Padang Pariaman	5	500.000.000	5	495.784.000	99,16%	5	100,00
28	Pasaman	12	1.199.000.000	12	1.187.251.400	99,02%	12	100,00
29	Pesisir Selatan	12	1.199.000.000	12	1.191.140.000	99,34%	12	100,00
30	Solok	12	1.199.000.000	12	1.189.580.000	99,21%	12	100,00
31	Tanah Datar	6	599.500.000	6	594.480.000	99,16%	6	100,00
32	Kota Padang	6	600.000.000	6	595.140.000	99,19%	6	100,00
33	Dharmasraya	10	997.500.000	10	993.400.000	99,59%	10	100,00
34	Solok Selatan	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00
35	Pasaman Barat	11	1.095.000.000	11	1.089.025.000	99,45%	11	100,00
36	Kota Payakumbuh	4	400.000.000	4	399.630.000	99,91%	4	100,00
37	Kota Sawahlunto	3	300.000.000	3	288.996.000	96,33%	3	100,00
37	Sijunjung	6	600.500.000	6	592.910.100	98,74%	6	100,00
	Provinsi Sumatera Barat		15.000.000	-	14.600.000	97,33%		
4	RIAU	60	6.000.000.000	57	5.705.981.000	95,10%	57	95,00%
1	Indragiri Hilir		-	-	-			
2	Indragiri Hulu	6	600.000.000	6	600.000.000	100,00%	6	100,00
3	Kampar	10	1.000.000.000	7	707.481.000	70,75%	7	70,00
4	Kuantan Singingi	6	600.000.000	6	600.000.000	100,00%	6	100,00
5	Pelalawan	14	1.400.000.000	14	1.400.000.000	100,00%	14	100,00
6	Rokan Hilir	24	2.400.000.000	24	2.398.500.000	99,94%	24	100,00
44	Rokan Hulu		-	-	-			
45	Siak		-	-	-			

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
5	JAMBI	30	3.000.000.000	30	2.999.950.000	100,00%	30	100,00%
46	Batanghari	6	600.000.000	6	599.950.000	99,99%	6	100,00
47	Merangin	6	600.000.000	6	600.000.000	100,00%	6	100,00
48	Muaro Jambi		1.500.000	-	1.500.000	100,00%		
49	Tanjung Jabung Barat	6	598.500.000	6	598.500.000	100,00%	6	100,00
50	Tanjung Jabung Timur		-	-	-			
51	Tebo		-	-	-			
52	Bungo	6	600.000.000	6	600.000.000	100,00%	6	100,00
53	Sarolangun	6	600.000.000	6	600.000.000	100,00%	6	100,00
54	Kota Sungai Penuh		-	-	-			
6	SUMATERA SELATAN	60	6.000.000.000	20	1.959.466.800	32,66%	20	33,33%
55	Lahat		-	-	-			
56	Musi Banyuasin	6	600.000.000	-	-	0,00%		-
57	Musi Rawas		-	-	-			
58	Musi Rawas Utara		-	-	-			
59	Muara Enim	12	1.200.000.000	12	1.159.966.800	96,66%	12	100,00
60	Ogan Komering Ilir	12	1.200.000.000	-	-	0,00%		-
61	Kota Palembang		-	-	-			
62	Banyuasin	22	2.200.000.000	-	-	0,00%		-
63	Ogan Komering Ulu Timur		-	-	-			
64	Ogan Komering Ulu Selatan		-	-	-			
65	Ogan Ilir		-	-	-			
66	Empat Lawang	8	800.000.000	8	799.500.000	99,94%	8	100,00
67	Penukal Abab Lematang Ilir		-	-	-			
7	BENGGKULU	18	1.800.000.000	18	1.799.850.000	99,99%	18	100,00
68	Bengkulu Selatan		-	-	-			
69	Bengkulu Utara		-	-	-			
70	Lebong	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00
71	Kaur	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00
72	Seluma	9	900.000.000	9	899.850.000	99,98%	9	100,00
73	Bengkulu Tengah		-	-	-			
74	Muko Muko	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00
8	LAMPUNG	12	1.200.000.000	12	1.199.290.000	99,94%	12	100,00
75	Lampung Barat	2	200.000.000	2	199.500.000	99,75%	2	100,00
76	Lampung Selatan		-	-	-			
77	Lampung Tengah		-	-	-			
78	Lampung Utara	2	200.000.000	2	199.950.000	99,98%	2	100,00
79	Lampung Timur	6	600.000.000	6	599.840.000	99,97%	6	100,00
80	Tanggamus		-	-	-			
81	Tulang Bawang		-	-	-			
82	Tulang Bawang Barat		-	-	-			
83	Way Kanan	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00
84	Pringsewu		-	-	-			
85	Pesawaran		-	-	-			
86	Mesuji		-	-	-			
87	Pesisir Barat		-	-	-			
9	BANGKA BELITUNG	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00
88	Bangka Selatan	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00
89	Bangka	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
10	JAWA BARAT	990	99.000.000.000	990	98.418.020.500	99,41%	990	100,00
90	Kota Banjar	6	600.000.000	6	599.895.750	99,98%	6	100,00
91	Bandung	28	2.800.000.000	28	2.781.485.000	99,34%	28	100,00
92	Ciamis	30	3.000.000.000	30	2.969.955.000	99,00%	30	100,00
93	Cianjur	21	2.100.000.000	21	2.099.900.000	100,00%	21	100,00
94	Garut	120	12.000.000.000	120	12.000.000.000	100,00%	120	100,00
95	Indramayu	40	4.000.000.000	40	3.967.780.000	99,19%	40	100,00
96	Kuningan	47	4.700.000.000	47	4.676.380.000	99,50%	47	100,00
97	Majalengka	40	4.000.000.000	40	3.996.030.500	99,90%	40	100,00
98	Purwakarta	56	5.600.000.000	56	5.599.500.000	99,99%	56	100,00
99	Subang	100	10.000.000.000	100	9.889.982.000	98,90%	100	100,00
100	Tasikmalaya	70	7.000.000.000	70	6.932.850.000	99,04%	70	100,00
101	Sukabumi	225	22.500.000.000	225	22.330.650.000	99,25%	225	100,00
102	Bogor	48	4.800.000.000	48	4.766.819.250	99,31%	48	100,00
103	Bandung Barat	10	1.000.000.000	10	999.627.800	99,96%	10	100,00
104	Kota Bandung		-	-	-	-		
105	Kota Sukabumi		-	-	-	-		
106	Kota Bogor		-	-	-	-		
107	Karawang	6	600.000.000	6	599.479.000	99,91%	6	100,00
108	Pangandaran	31	3.100.000.000	31	3.099.536.200	99,99%	31	100,00
109	Bekasi	25	2.500.000.000	25	2.499.900.000	100,00%	25	100,00
110	Sumedang	85	8.500.000.000	85	8.408.450.000	98,92%	85	100,00
111	Kota Tasikmalaya	2	200.000.000	2	199.800.000	99,90%	2	100,00
11	JAWA TENGAH	1.006	100.600.000.000	490	48.368.353.900	48,08%	490	48,71
112	Kendal	14	1.400.000.000	14	1.382.081.000	98,72%	14	100,00
113	Pemalang	35	3.500.000.000	35	3.419.650.300	97,70%	35	100,00
114	Purbalingga	26	2.600.000.000	26	2.566.806.500	98,72%	26	100,00
115	Tegal	103	10.300.000.000	-	-	0,00%		-
116	Kota Tegal		-	-	-	-		
117	Kota Semarang		-	-	-	-		
118	Sragen	120	12.000.000.000	-	-	0,00%		-
119	Banjarnegara	59	5.900.000.000	59	5.886.851.000	99,78%	59	100,00
120	Sukoharjo	5	500.000.000	5	494.084.000	98,82%	5	100,00
121	Banyumas	66	6.600.000.000	66	6.490.079.500	98,33%	66	100,00
122	Pati	9	900.000.000	9	889.158.000	98,80%	9	100,00
123	Kudus	6	600.000.000	6	599.670.000	99,95%	6	100,00
124	Rembang	10	1.000.000.000	10	981.154.400	98,12%	10	100,00
125	Magelang	30	3.000.000.000	30	2.975.159.000	99,17%	30	100,00
126	Wonosobo	4	400.000.000	4	398.397.500	99,60%	4	100,00
127	Batang	8	800.000.000	8	799.264.000	99,91%	8	100,00
128	Kebumen	5	500.000.000	5	491.920.000	98,38%	5	100,00
129	Punworejo	11	1.100.000.000	-	-	0,00%		-
130	Demak	100	10.000.000.000	-	-	0,00%		-
131	Jepara	3	300.000.000	3	299.901.000	99,97%	3	100,00
132	Semarang	14	1.400.000.000	14	1.392.672.000	99,48%	14	100,00
133	Klaten	90	9.000.000.000	-	-	0,00%		-
134	Temanggung	4	400.000.000	4	395.168.000	98,79%	4	100,00
135	Wonogiri	2	200.000.000	2	196.910.000	98,46%	2	100,00
136	Boyolali	6	600.000.000	6	588.150.000	98,03%	6	100,00
137	Karanganyar	47	4.700.000.000	-	-	0,00%		-
138	Pekalongan	38	3.800.000.000	38	3.792.190.000	99,79%	38	100,00
139	Blora	49	4.900.000.000	49	4.817.411.700	98,31%	49	100,00
140	Brebes	58	5.800.000.000	13	1.222.000.000	21,07%	13	22,41
141	Cilacap	60	6.000.000.000	60	5.926.992.000	98,78%	60	100,00
142	Grobogan	24	2.400.000.000	24	2.362.684.000	98,45%	24	100,00
12	DI. YOGYAKARTA	24	2.400.000.000	20	2.000.000.000	83,33%	20	83,33
143	Bantul	12	1.200.000.000	8	800.000.000	66,67%	8	66,67
144	Gunungkidul		-	-	-	-		
145	Kulon Progo	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	100,00%	12	100,00

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
13	JAWA TIMUR	1.050	105.000.000.000	813	79.859.771.180	76,06%	813	77,43
146	Bangkalan	48	4.800.000.000	48	4.799.804.250	100,00%	48	100,00
147	Banyuwangi	60	6.000.000.000	-	-	0,00%	-	-
148	Blitar	5	500.000.000	-	-	0,00%	-	-
149	Bojonegoro	12	1.200.000.000	12	1.168.864.650	97,41%	12	100,00
150	Bondowoso	4	400.000.000	4	398.781.700	99,70%	4	100,00
151	Gresik	236	23.600.000.000	64	6.089.632.730	25,80%	64	27,12
152	Jember	100	10.000.000.000	100	9.768.073.600	97,68%	100	100,00
153	Jombang	7	700.000.000	7	689.225.850	98,46%	7	100,00
154	Kediri	-	-	-	-	-	-	-
155	Lamongan	6	600.000.000	6	598.300.000	99,72%	6	100,00
156	Lumajang	50	5.000.000.000	50	4.933.800.000	98,68%	50	100,00
157	Madiun	8	800.000.000	8	791.510.000	98,94%	8	100,00
158	Magetan	85	8.500.000.000	85	8.447.600.000	99,38%	85	100,00
159	Malang	15	1.500.000.000	15	1.499.900.000	99,99%	15	100,00
160	Nganjuk	70	7.000.000.000	70	6.762.380.000	96,61%	70	100,00
161	Ngawi	16	1.600.000.000	16	1.600.000.000	100,00%	16	100,00
162	Pacitan	31	3.100.000.000	31	3.085.640.000	99,54%	31	100,00
163	Pamekasan	64	6.400.000.000	64	6.400.000.000	100,00%	64	100,00
164	Ponorogo	10	1.000.000.000	10	999.750.000	99,98%	10	100,00
165	Probolinggo	3	300.000.000	3	299.767.000	99,92%	3	100,00
166	Sampang	9	900.000.000	9	888.005.000	98,67%	9	100,00
167	Sidoarjo	-	-	-	-	-	-	-
168	Situbondo	15	1.500.000.000	15	1.450.353.000	96,69%	15	100,00
169	Sumenep	160	16.000.000.000	160	15.634.445.000	97,72%	160	100,00
170	Trenggalek	11	1.100.000.000	11	1.083.183.800	98,47%	11	100,00
171	Tuban	11	1.100.000.000	11	1.072.139.600	97,47%	11	100,00
172	Tulungagung	12	1.200.000.000	12	1.198.915.000	99,91%	12	100,00
173	Pasuruan	1	100.000.000	1	99.700.000	99,70%	1	100,00
174	Kota Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-
175	Kota Surabaya	-	-	-	-	-	-	-
176	Kota Batu	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00
14	BANTEN	300	30.000.000.000	300	29.950.000.000	99,83%	300	100,00
177	Lebak	110	11.000.000.000	110	10.990.000.000	99,91%	110	100,00
178	Pandeglang	110	11.000.000.000	110	10.960.000.000	99,64%	110	100,00
179	Serang	70	7.000.000.000	70	7.000.000.000	100,00%	70	100,00
180	Tangerang	9	900.000.000	9	900.000.000	100,00%	9	100,00
181	Kota Serang	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00
15	BALI	-	-	-	-	-	-	-
182	Jembrana	-	-	-	-	-	-	-
183	Buleleng	-	-	-	-	-	-	-
16	NTB	300	30.000.000.000	98	9.745.730.000	32,49%	98	32,67
184	Bima	126	12.600.000.000	-	11.700.000	0,09%	-	-
185	Dompu	33	3.300.000.000	33	3.254.000.000	98,61%	33	100,00
186	Lombok Barat	-	-	-	-	-	-	-
187	Lombok Tengah	36	3.600.000.000	36	3.582.000.000	99,50%	36	100,00
188	Lombok Timur	21	2.100.000.000	21	2.079.830.000	99,04%	21	100,00
189	Lombok Utara	42	4.200.000.000	5	510.700.000	12,16%	5	11,90
190	Sumbawa	39	3.900.000.000	-	18.000.000	0,46%	-	-
191	Kota Bima	3	300.000.000	3	289.500.000	96,50%	3	100,00
192	Sumbawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
193	Kota Mataram	-	-	-	-	-	-	-

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
17	NTT	270	27.000.000.000	270	26.856.094.700	99,47%	270	100,00
	Provinsi Nusa Tenggara Timur		391.500.000		376.444.700	96,15%		
194	Kupang	21	2.069.550.000	21	2.059.050.000	99,49%	21	100,00
195	Timor Tengah Utara		-		-			
196	Manggarai	11	1.084.050.000	10	983.400.000	90,72%	10	90,91
197	Sumba Barat	12	1.182.600.000	16	1.553.050.000	131,33%	16	133,33
198	Sumba Timur	33	3.252.150.000	33	3.235.050.000	99,47%	33	100,00
199	Rote Ndao	14	1.379.700.000	14	1.373.050.000	99,52%	14	100,00
200	Manggarai Barat	18	1.773.900.000	18	1.761.900.000	99,32%	18	100,00
201	Ngada	12	1.182.600.000	12	1.179.300.000	99,72%	12	100,00
202	Sumba Barat Daya	28	2.759.400.000	25	2.463.050.000	89,26%	25	89,29
203	Sumba Tengah	13	1.281.150.000	13	1.275.050.000	99,52%	13	100,00
204	Manggarai Timur	15	1.478.250.000	15	1.473.450.000	99,68%	15	100,00
205	Sabu Raijua	2	197.100.000	2	197.050.000	99,97%	2	100,00
206	Ende	20	1.971.000.000	20	1.961.050.000	99,50%	20	100,00
207	Malaka	12	1.182.600.000	12	1.177.050.000	99,53%	12	100,00
208	Timor Tengah Selatan	10	985.500.000	10	982.700.000	99,72%	10	100,00
209	Alor	5	492.750.000	5	488.650.000	99,17%	5	100,00
210	Sikka	30	2.956.500.000	30	2.940.750.000	99,47%	30	100,00
211	Nagekeo	6	591.300.000	6	589.050.000	99,62%	6	100,00
212	Kota Kupang		-		-			
213	Belu	1	98.550.000	1	98.750.000	100,00%	1	100,00
214	Flores Timur	5	492.750.000	5	491.650.000	99,78%	5	100,00
215	Lembata	2	197.100.000	2	196.600.000	99,75%	2	100,00
18	KALIMANTAN BARAT	120	12.000.000.000	63	6.262.552.100	52,19%	63	52,50
216	Bengkayang	12	1.200.000.000	12	1.194.000.000	99,50%	12	100,00
217	Landak	27	2.700.000.000	27	2.675.838.000	99,11%	27	100,00
218	Kapuas Hulu	12	1.200.000.000	12	1.199.000.000	99,92%	12	100,00
219	Ketapang	12	1.200.000.000	-	-	0,00%	-	-
220	Mempawah	6	600.000.000	-	-	0,00%	-	-
221	Sambas	12	1.200.000.000	12	1.193.714.100	99,48%	12	100,00
222	Sintang	14	1.400.000.000	-	-	0,00%	-	-
223	Kota Singkawang	-	-	-	-			
224	Kubu Raya	9	900.000.000	-	-	0,00%	-	-
225	Kayong Utara	9	900.000.000	-	-	0,00%	-	-
226	Sekadau	4	400.000.000	-	-	0,00%	-	-
227	Sanggau	3	300.000.000					
19	KALIMANTAN TENGAH	60	6.000.000.000	49	4.835.990.000	80,60%	49	81,67
228	Barito Selatan	1	100.000.000	-	-	0,00%	-	-
229	Barito Utara	1	100.000.000	-	2.500.000	2,50%	-	-
230	Kapuas	21	2.100.000.000	21	2.047.500.000	97,50%	21	100,00
231	Katingan	6	600.000.000	-	-	0,00%	-	-
232	Seruyan	6	600.000.000	6	587.990.000	98,00%	6	100,00
233	Sukamara	2	200.000.000	-	-	0,00%	-	-
234	Pulang Pisau	21	2.100.000.000	21	2.100.000.000	100,00%	21	100,00
235	Lamandau		-		-			
236	Gunung Mas		-		-			
237	Kotawaringin Barat	1	100.000.000	-	-			
238	Kotawaringin Timur	1	100.000.000	1	98.000.000	98,00%	1	100,00
20	KALIMANTAN SELATAN	120	12.000.000.000	39	3.859.120.725	32,16%	39	32,50
239	Banjar	12	1.200.000.000	9	882.900.000	73,58%	9	75,00
240	Barito Kuala	12	1.200.000.000	-	-	0,00%	-	-
241	Hulu Sungai Selatan	12	1.200.000.000	12	1.187.700.000	98,98%	12	100,00
242	Hulu Sungai Tengah	9	900.000.000	-	-	0,00%	-	-
243	Hulu Sungai Utara	9	900.000.000	-	-	0,00%	-	-
244	Kotabaru	12	1.200.000.000	-	-	0,00%	-	-
245	Tabalong	6	600.000.000	6	599.920.725	99,99%	6	100,00
246	Tanah Laut	12	1.200.000.000	-	-	0,00%	-	-
247	Tapin	12	1.200.000.000	-	-	0,00%	-	-
248	Kota Banjarmasin	6	600.000.000	-	-	0,00%	-	-
249	Balangan	6	600.000.000	-	-	0,00%	-	-
250	Tanah Bumbu	12	1.200.000.000	12	1.188.600.000	99,05%	12	100,00

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
21	KALIMANTAN TIMUR	30	3.000.000.000	30	2.978.395.000	99,28%	30	100,00
	Provinsi Kalimantan Timur		15.000.000		14.610.000			
251	Berau	15	1.492.500.000	15	1.483.370.000	99,39%	15	100,00
252	Kutai Kartanegara	9	895.500.000	9	895.415.000	99,99%	9	100,00
253	Kutai Timur	4	398.000.000	4	390.000.000	97,99%	4	100,00
254	Paser	2	199.000.000	2	195.000.000	97,99%	2	100,00
22	KALIMANTAN UTARA	30	3.000.000.000	30	2.999.046.500	99,97%	30	100,00
255	Bulungan	23	2.300.000.000	23	2.299.900.000	100,00%	23	100,00
256	Malinau	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00
257	Nunukan	6	600.000.000	6	599.146.500	99,86%	6	100,00
23	SULAWESI UTARA	24	2.400.000.000	24	2.341.600.000	97,57%	24	100,00
	Provinsi Sulawesi Utara	3	300.000.000	3	292.200.000	97,40%	3	100,00
258	Bolaang Mongondow	4	400.000.000	4	392.000.000	98,00%	4	100,00
259	Bolaang Mongondow Utara		-		-			
260	Bolaang Mongondow Timur	4	400.000.000	4	391.200.000	97,80%	4	100,00
261	Bolaang Mongondow Selatan		-		-			
262	Minahasa		-		-			
263	Minahasa Selatan	7	700.000.000	7	681.800.000	97,40%	7	100,00
264	Minahasa Utara		-		-			
265	Minahasa Tenggara	2	200.000.000	2	194.800.000	97,40%	2	100,00
266	Kota Tomohon	4	400.000.000	4	389.600.000	97,40%	4	100,00
24	SULAWESI TENGAH	30	3.000.000.000	30	3.000.000.000	100,00%	30	100,00
267	Banggai Laut	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00
268	Buol	14	1.400.000.000	14	1.400.000.000	100,00%	14	100,00
269	Toli Toli		-		-			
270	Tojo Una Una	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00
271	Morowali Utara	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00
272	Poso	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00
273	Sigi	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00
274	Kota Palu	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00
25	SULAWESI SELATAN	420	42.000.000.000	420	41.581.960.000	99,00%	420	100,00
275	Barru	18	1.800.000.000	18	1.797.200.000	99,84%	18	100,00
276	Bone	53	5.300.000.000	53	5.217.300.000	98,44%	53	100,00
277	Gowa	19	1.900.000.000	19	1.871.400.000	98,49%	19	100,00
278	Jeneponto		-		-			
279	Luwu	7	700.000.000	7	699.880.000	99,98%	7	100,00
280	Luwu Utara		-		-			
281	Maros		-		-			
282	Pangkajene dan Kepulauan	35	3.500.000.000	35	3.447.500.000	98,50%	35	100,00
283	Kepulauan Selayar	12	1.200.000.000	12	1.186.280.000	98,86%	12	100,00
284	Sidenreng Rappang	33	3.300.000.000	33	3.266.800.000	98,99%	33	100,00
285	Sinjai	5	500.000.000	5	497.500.000	99,50%	5	100,00
286	Takalar		-		-			
287	Tana Toraja	24	2.400.000.000	24	2.375.700.000	98,99%	24	100,00
288	Wajo	45	4.500.000.000	45	4.450.500.000	98,90%	45	100,00
289	Luwu Timur	12	1.200.000.000	12	1.187.850.000	98,99%	12	100,00
290	Toraja Utara	80	8.000.000.000	80	7.920.000.000	99,00%	80	100,00
291	Pinrang	6	600.000.000	6	594.000.000	99,00%	6	100,00
292	Soppeng	15	1.500.000.000	15	1.498.380.000	99,89%	15	100,00
293	Enrekang	53	5.300.000.000	53	5.271.670.000	99,47%	53	100,00
294	Kota Makassar	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
25	SULAWESI TENGGARA	93	9.300.000.000	93	9.300.000.000	100,00%	93	100,00
295	Buton Utara	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00
296	Konawe	11	1.100.000.000	11	1.100.000.000	100,00%	11	100,00
296	Konawe Kepulauan	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00
297	Konawe Selatan	36	3.600.000.000	36	3.600.000.000	100,00%	36	100,00
298	Konawe Utara	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00
299	Kolaka Timur	13	1.300.000.000	13	1.300.000.000	100,00%	13	100,00
300	Bombana	7	700.000.000	7	700.000.000	100,00%	7	100,00
301	Kolaka	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00
302	Kota Bau Bau	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00
303	Wakatobi		-	-	-			
304	Buton		-	-	-			
305	Muna	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00
306	Muna Barat		-	-	-			
307	Kolaka Utara	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00
26	GORONTALO	120	12.000.000.000	40	4.074.440.000	33,95%	40	33,33
	Provinsi Gorontalo		63.000.000		62.940.000	99,90%		
308	Boalemo	3	303.100.000	3	303.100.000	100,00%	3	100,00
309	Gorontalo	92	9.115.900.000	17	1.660.400.000	18,21%	17	18,48
310	Pohuwato	12	1.208.400.000	12	1.208.400.000	100,00%	12	100,00
311	Gorontalo Utara	12	1.208.400.000	7	738.400.000	61,11%	7	58,33
312	Bone Bolango	1	101.200.000	1	101.200.000	100,00%	1	100,00
27	SULAWESI BARAT	30	3.000.000.000	30	2.972.918.000	99,10%	30	100,00
	Provinsi Sulawesi Barat		14.000.000		14.000.000	100,00%		
313	Mamuju		-	-	-			
314	Polewali Mandar		-	-	-			
315	Mamasa	30	2.986.000.000	30	2.958.918.000	99,09%	30	100,00
316	Majene		-	-	-			
317	Mamuju Tengah		-	-	-			
318	Pasangkayu		-	-	-			
28	MALUKU	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00	2	100,00
319	Buru	1	100.000.000	1	100.000.000		1	100,00
320	Maluku Tengah	1	100.000.000	1	100.000.000		1	100,00
321	Seram Bagian Barat		-	-	-			
322	Seram Bagian Timur		-	-	-			
29	MALUKU UTARA	-	-	-	-			
323	Halmahera Barat		-	-	-			
324	Halmahera Selatan		-	-	-			
325	Halmahera Tengah		-	-	-			
326	Halmahera Timur		-	-	-			
327	Halmahera Utara		-	-	-			
328	Kepulauan Sula		-	-	-			
329	Kota Tidore Kepulauan		-	-	-			
330	Pulau Morotai		-	-	-			
331	Pulau Taliabu		-	-	-			
30	PAPUA SELATAN	-	-	-	-			
330	Mimika		-	-	-			
331	Nabire		-	-	-			
31	PAPUA BARAT	-	-	-	-			
332	Kota Sorong		-	-	-			
333	Raja Ampat		-	-	-			
334	Sorong		-	-	-			
335	Sorong Selatan		-	-	-			

**Lampiran 11. Data Capaian Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan
TA 2019 – 2023**

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TA 2019						
		PAGU		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		Unit	Rp	Unit	Rp	%	UNIT	%
	NASIONAL	138	13.800.000.000	138	13.470.845.410	97,61%	138	100,00%
1	ACEH	6	600.000.000	6	596.510.900	99,42%	6	100,00%
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-	-	-	-
3	SUMATERA BARAT	2	200.000.000	2	199.345.000	99,67%	2	100,00%
4	RIAU	-	-	-	-	-	-	-
5	JAMBI	11	1.100.000.000	11	1.100.000.000	100,00%	11	100,00%
6	SUMATERA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-
7	BENGKULU	8	800.000.000	8	791.380.000	98,92%	8	100,00%
8	LAMPUNG	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%
9	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-
11	JAWA BARAT	15	1.500.000.000	15	1.500.000.000	100,00%	15	100,00%
12	JAWA TENGAH	14	1.400.000.000	14	1.344.696.750	96,05%	14	100,00%
13	DI. YOGYAKARTA	9	900.000.000	9	839.918.950	93,32%	9	100,00%
14	JAWA TIMUR	6	600.000.000	6	571.700.000	95,28%	6	100,00%
15	BANTEN	7	700.000.000	7	700.000.000	100,00%	7	100,00%
16	BALI	9	900.000.000	9	882.797.960	98,09%	9	100,00%
17	NTB	15	1.500.000.000	15	1.430.600.000	95,37%	15	100,00%
18	NTT	1	100.000.000	1	85.750.000	85,75%	1	100,00%
19	KALIMANTAN BARAT	1	100.000.000	1	99.850.000	99,85%	1	100,00%
20	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
21	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-
22	KALIMANTAN TIMUR	3	300.000.000	3	288.390.000	96,13%	3	100,00%
23	KALIMANTAN UTARA	2	200.000.000	2	175.975.000	87,99%	2	100,00%
24	SULAWESI UTARA	5	500.000.000	5	480.000.000	96,00%	5	100,00%
25	SULAWESI TENGAH	4	400.000.000	4	398.495.000	99,62%	4	100,00%
26	SULAWESI SELATAN	8	800.000.000	8	785.435.850	98,18%	8	100,00%
27	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-
28	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-
29	SULAWESI BARAT	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%
30	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-
32	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-
33	PAPUA BARAT	6	600.000.000	6	600.000.000	100,00%	6	100,00%

Keterangan

*) Pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpipaan mulai Tahun Anggaran 2019

NO	PROPINSI	TA 2020						
		TARGET		REALISASI KEUANGAN			FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
	TOTAL	138	13.800.000.000	138	13.731.239.552	99,50%	138	100,00%
1	ACEH	6	600.000.000	6	599.845.200	99,97%	6	100,00%
2	SUMATERA UTARA	6	600.000.000	6	599.732.000	99,96%	6	100,00%
3	SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	-
4	RIAU	-	-	-	-	-	-	-
5	JAMBI	8	800.000.000	8	800.000.000	100,00%	8	100,00%
6	SUMATERA SELATAN	4	400.000.000	4	398.500.000	99,63%	4	100,00%
7	BENGKULU	4	400.000.000	4	397.248.300	99,31%	4	100,00%
8	LAMPUNG	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%
9	BANGKA BELITUNG	2	200.000.000	2	199.780.000	99,89%	2	100,00%
10	JAWA BARAT	11	1.100.000.000	11	1.099.479.500	99,95%	11	100,00%
11	JAWA TENGAH	10	1.000.000.000	10	966.990.000	96,70%	10	100,00%
12	DI. YOGYAKARTA	7	700.000.000	7	699.494.800	99,93%	7	100,00%
13	JAWA TIMUR	6	600.000.000	6	590.440.000	98,41%	6	100,00%
14	BANTEN	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%
15	BALI	8	800.000.000	8	787.447.252	98,43%	8	100,00%
16	NTB	6	600.000.000	6	598.837.000	99,81%	6	100,00%
17	NTT	2	200.000.000	2	197.820.000	98,91%	2	100,00%
18	KALIMANTAN BARAT	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%
19	KALIMANTAN TENGAH	2	200.000.000	2	196.720.000	98,36%	2	100,00%
20	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-
21	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-
22	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-
23	SULAWESI UTARA	8	800.000.000	8	799.800.000	99,98%	8	100,00%
24	SULAWESI TENGAH	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%
25	SULAWESI SELATAN	12	1.200.000.000	12	1.199.739.000	99,98%	12	100,00%
26	SULAWESI TENGGARA	10	1.000.000.000	10	999.600.000	99,96%	10	100,00%
27	GORONTALO	3	300.000.000	3	299.766.500	99,92%	3	100,00%
28	SULAWESI BARAT	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%
29	MALUKU	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%
30	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-
31	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-
32	PAPUA BARAT	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%

NO	PROPINSI	TA 2021						
		PAGU		REALISASI KEUANGAN			FISIK	
		UNIT	(Rp)	Jumlah	Rp	(%)	UNIT	%
	TOTAL	150	15.060.100.000	150	14.946.560.300	99,25%	150	100,00%
1	ACEH	8	800.000.000	8	797.343.600	99,67%	8	100,00%
2	SUMATERA UTARA	4	400.000.000	4	399.218.000	99,80%	4	100,00%
3	SUMATERA BARAT	2	200.100.000	2	199.910.000	99,91%	2	100,00%
4	RIAU	-	-	-	-	-	-	-
5	JAMBI	6	600.000.000	6	586.700.000	97,78%	6	100,00%
6	SUMATERA SELATAN	3	300.000.000	3	298.200.000	99,40%	3	100,00%
7	BENGGULU	5	560.000.000	5	554.000.000	98,93%	5	100,00%
8	LAMPUNG	3	300.000.000	3	299.242.000	99,75%	3	100,00%
9	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	KEPULAUAN RIAU							
11	JAWA BARAT	17	1.700.000.000	17	1.699.301.000	99,96%	17	100,00%
12	JAWA TENGAH	16	1.600.000.000	16	1.572.936.000	98,31%	16	100,00%
13	DI. YOGYAKARTA	5	500.000.000	5	499.868.000	99,97%	5	100,00%
14	JAWA TIMUR	20	2.000.000.000	20	1.964.058.500	98,20%	20	100,00%
15	BANTEN	7	700.000.000	7	700.000.000	100,00%	7	100,00%
16	BALI	5	500.000.000	5	492.664.000	98,53%	5	100,00%
17	NTB	10	1.000.000.000	10	997.819.500	99,78%	10	100,00%
18	NTT	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%
19	KALIMANTAN BARAT	1	100.000.000	1	98.398.000	98,40%	1	100,00%
20	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
21	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-
22	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-
23	KALIMANTAN UTARA	2	200.000.000	2	192.171.700	96,09%	2	100,00%
24	SULAWESI UTARA	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%
25	SULAWESI TENGAH	13	1.300.000.000	13	1.299.760.000	99,98%	13	100,00%
26	SULAWESI SELATAN	11	1.100.000.000	11	1.100.000.000	100,00%	11	100,00%
27	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-
28	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-
29	SULAWESI BARAT	2	200.000.000	2	194.970.000	97,49%	2	100,00%
30	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-
32	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-
33	PAPUA BARAT	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%

NO	PROVINSI	TA 2022						
		TARGET		REALISASI KEUANGAN			FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	Rp	(%)	UNIT	%
	TOTAL	150	15.000.000.000	150	14.861.272.550	99,08%	150	100,00%
1	ACEH	10	1.000.000.000	10	997.194.800	99,72%	10	100,00%
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-	-	-	-
3	SUMATERA BARAT	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%
4	RIAU	-	-	-	-	-	-	-
5	JAMBI	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%
6	SUMATERA SELATAN	3	300.000.000	3	294.025.000	98,01%	3	100,00%
7	BENGKULU	6	600.000.000	6	600.000.000	100,00%	6	100,00%
8	LAMPUNG	1	100.000.000	1	99.500.000	99,50%	1	100,00%
9	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-
11	JAWA BARAT	19	1.900.000.000	19	1.897.730.000	99,88%	19	100,00%
12	JAWA TENGAH	15	1.500.000.000	15	1.479.176.500	98,61%	15	100,00%
13	DI. YOGYAKARTA	5	500.000.000	5	499.828.250	99,97%	5	100,00%
14	JAWA TIMUR	19	1.900.000.000	19	1.834.568.000	96,56%	19	100,00%
15	BANTEN	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	100,00%	10	100,00%
16	BALI	5	500.000.000	5	471.600.000	94,32%	5	100,00%
17	NTB	9	900.000.000	9	896.127.500	99,57%	9	100,00%
18	NTT	1	100.000.000	1	99.800.000	99,80%	1	100,00%
19	KALIMANTAN BARAT	1	100.000.000	1	99.722.500	99,72%	1	100,00%
20	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
21	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-
22	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-
23	KALIMANTAN UTARA	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%
24	SULAWESI UTARA	8	800.000.000	8	800.000.000	100,00%	8	100,00%
25	SULAWESI TENGAH	13	1.300.000.000	13	1.300.000.000	100,00%	13	100,00%
26	SULAWESI SELATAN	11	1.100.000.000	11	1.100.000.000	100,00%	11	100,00%
27	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-
28	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-
29	SULAWESI BARAT	1	100.000.000	1	99.600.000	99,60%	1	100,00%
30	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-
32	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-
33	PAPUA BARAT	4	400.000.000	4	392.400.000	98,10%	4	100,00%

NO	PROPINSI	TA 2023						
		TARGET		REALISASI KEUANGAN			FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
	TOTAL	-	127.200.000	-	110.113.500	86,57	-	-
1	ACEH	-	20.600.000	-	19.633.500	95,31	-	-
2	SUMATERA SELATAN	-	1.000.000	-	1.000.000	100,00	-	-
3	BENGKULU	-	3.000.000	-	2.880.000	96,00	-	-
4	BANGKA BELITUNG	-	12.000.000	-	12.000.000	100,00	-	-
5	JAWA TIMUR	-	1.800.000	-	900.000	50,00	-	-
6	NTB	-	9.000.000	-	9.000.000	100,00	-	-
7	KALIMANTAN TIMUR	-	1.800.000	-	1.700.000	94,44	-	-
8	KALIMANTAN UTARA	-	39.000.000	-	24.000.000	61,54	-	-
9	SULAWESI UTARA	-	10.000.000	-	10.000.000	100,00	-	-
10	PAPUA BARAT	-	29.000.000	-	29.000.000	100,00	-	-

Keterangan:

**) Alokasi anggaran pengembangan irigasi perpipaan TA 2023 hanya untuk dana pendukung karena refokussing anggaran*

Pengembangan Irigasi Perpompaan (Pusat) TA. 2023

NO	PROPINSI	KABUPATEN	SUB SEKTOR	ALOKASI		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
				Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%	Unit
1	ACEH	ACEH SELATAN	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
2	ACEH	ACEH TENGAH	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
3	ACEH	ACEH TIMUR	TP	6	750.000.000	6	750.000.000	100,00%	6	100,00%	120
4	ACEH	ACEH UTARA	TP	6	750.000.000	6	750.000.000	100,00%	6	100,00%	120
5	ACEH	BENER MERIAH	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
6	ACEH	LHOKSEUMAWE	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
7	ACEH	PIDIE JAYA	TP	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%	100
8	BALI	BANGLI	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
9	BANTEN	LEBAK	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
10	BANTEN	PANDEGLANG	TP	6	600.000.000	6	600.000.000	100,00%	6	100,00%	120
11	BANTEN	SERANG	TP	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%	100
12	DIY	KULON PROGO	NAK	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
13	JAMBI	KERINCI	BUN	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
14	JAMBI	SAROLANGUN	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
15	JAWA BARAT	BANDUNG	TP	2	134.500.000	2	134.500.000	100,00%	2	100,00%	40
16	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
17	JAWA BARAT	CIAMIS	TP	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%	80
18	JAWA BARAT	CIREBON	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
19	JAWA BARAT	GARUT	TP	2	180.000.000	2	180.000.000	100,00%	2	100,00%	40
20	JAWA BARAT	KARAWANG	TP	3	150.000.000	3	150.000.000	100,00%	3	100,00%	60
21	JAWA BARAT	KARAWANG	TP	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%	100
22	JAWA BARAT	KUNINGAN	TP	6	600.000.000	6	600.000.000	100,00%	6	100,00%	120
23	JAWA BARAT	SUBANG	TP	8	600.000.000	8	600.000.000	100,00%	8	100,00%	160
24	JAWA BARAT	SUKABUMI	TP	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%	80
25	JAWA TENGAH	BANYUMAS	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
26	JAWA TENGAH	BLORA	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
27	JAWA TENGAH	CILACAP	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
28	JAWA TENGAH	GROBOGAN	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
29	JAWA TENGAH	JEPARA	TP	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00%	1	100,00%	20
30	JAWA TENGAH	MAGELANG	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
31	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
32	JAWA TENGAH	SRAGEN	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
33	JAWA TIMUR	JEMBER	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
34	JAWA TIMUR	LAMONGAN	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
35	JAWA TIMUR	PACITAN	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
36	JAWA TIMUR	PAMEKASAN	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
37	JAWA TIMUR	SAMPANG	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
38	JAWA TIMUR	TUBAN	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
39	JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	TP	2	190.000.000	2	190.000.000	100,00%	2	100,00%	40
40	KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS	TP	2	300.000.000	2	300.000.000	100,00%	2	100,00%	40
41	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS	TP	2	300.000.000	2	300.000.000	100,00%	2	100,00%	40
42	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
43	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
44	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	NAK	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
45	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	BUN	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
46	SULAWESI BARAT	MAMUJU	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
47	SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
48	SULAWESI SELATAN	BANTAENG	TP	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%	100
49	SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	TP	9	900.000.000	9	900.000.000	100,00%	9	100,00%	180
50	SULAWESI SELATAN	ENREKANG	TP	14	1.400.000.000	14	1.400.000.000	100,00%	14	100,00%	280
51	SULAWESI SELATAN	GOWA	TP	11	1.100.000.000	11	1.100.000.000	100,00%	11	100,00%	220
52	SULAWESI SELATAN	JENEPONTO	TP	9	900.000.000	9	900.000.000	100,00%	9	100,00%	180
53	SULAWESI SELATAN	MAROS	TP	6	600.000.000	6	600.000.000	100,00%	6	100,00%	120
54	SULAWESI SELATAN	PANGKAIJENE DAN KEPULAUAN	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
55	SULAWESI SELATAN	PINRANG	TP	7	700.000.000	7	700.000.000	100,00%	7	100,00%	140

NO	PROPINSI	KABUPATEN	SUB SEKTOR	ALOKASI		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
				Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%	Unit
56	SULAWESI SELATAN	SIDENRENG RAPPANG	TP	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%	40
57	SULAWESI SELATAN	TAKALAR	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
58	SULAWESI SELATAN	WAJO	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
59	SULAWESI TENGAH	MOROWALI UTARA	TP	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%	80
60	SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
61	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT	TP	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%	20
62	SUMATERA UTARA	SAMOSIR	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
TOTAL				211	21.264.500.000	211	21.264.500.000	100,00%	211	100,00%	4.220

Rekapitulasi per sub sektor

No	Sub Sektor	Volume
		(Unit)
1	Tanaman Pangan	205
2	Hortikultura	-
3	Perkebunan	2
4	Peternakan	4
TOTAL		211

Pengembangan Irigasi Perpipaan (Pusat) TA. 2023

NO	PROPINSI	KABUPATEN	SUB SEKTOR	ALOKASI		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
				Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%	Ha
1	BANTEN	PANDEGLANG	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
2	DIY	KULON PROGO	BUN	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
3	JAMBI	KERINCI	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
4	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
5	JAMBI	SAROLANGUN	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
6	JAWA BARAT	BANDUNG	BUN	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
7	JAWA BARAT	CIAMIS	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
8	JAWA BARAT	KUNINGAN	TP	1	240.000.000	1	240.000.000	100,00%	1	100,00%	20
9	JAWA BARAT	SUKABUMI	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
10	JAWA TENGAH	BLORA	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
11	JAWA TENGAH	MAGELANG	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
12	JAWA TIMUR	LAMONGAN	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
13	JAWA TIMUR	MAGETAN	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
14	JAWA TIMUR	TRENGGALEK	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
15	LAMPUNG	PESAWARAN	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
16	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
17	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
18	SULAWESI BARAT	MAJENE	TP	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
19	SULAWESI BARAT	MAMASA	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
20	SULAWESI BARAT	MAMUJU	BUN	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
21	SULAWESI BARAT	PASANG KAYU	TP	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
22	SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	BUN	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
23	SULAWESI SELATAN	GOWA	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
24	SULAWESI SELATAN	JENEPONTO	TP	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%	80
25	SULAWESI TENGAH	POSO	TP	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%	80
26	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA	TP	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
TOTAL				44	4.540.000.000	44	4.540.000.000	100,00%	44	100,00%	880

Rekapitulasi per sub sektor

No	Sub Sektor	Volume
		(Unit)
1	Tanaman Pangan	39
2	Hortikultura	-
3	Perkebunan	5
4	Peternakan	-
TOTAL		44

Pengembangan Irigasi Air tanah (Pusat) TA. 2023

NO	PROPINSI	KABUPATEN	ALOKASI		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
			Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%	Unit
1	ACEH	ACEH TIMUR	2	300.000.000	2	300.000.000	100,00%	2	100,00%	40
2	ACEH	ACEH UTARA	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00%	1	100,00%	20
3	BANTEN	LEBAK	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00%	1	100,00%	20
4	BANTEN	PANDEGLANG	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00%	1	100,00%	20
5	BANTEN	SERANG	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00%	1	100,00%	20
6	BANTEN	TANGERANG	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
7	JAWA BARAT	BEKASI	3	305.000.000	3	305.000.000	100,00%	3	100,00%	60
8	JAWA BARAT	GARUT	2	250.000.000	2	250.000.000	100,00%	2	100,00%	40
9	JAWA BARAT	INDRAMAYU	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
10	JAWA BARAT	KARAWANG	3	310.000.000	3	310.000.000	100,00%	3	100,00%	60
11	JAWA BARAT	KUNINGAN	1	140.000.000	1	140.000.000	100,00%	1	100,00%	20
12	JAWA BARAT	MAJALENGKA	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
13	JAWA BARAT	SUMEDANG	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
14	JAWA TENGAH	BANYUMAS	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00%	1	100,00%	20
15	JAWA TENGAH	BREBES	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
16	JAWA TENGAH	KLATEN	2	300.000.000	2	300.000.000	100,00%	2	100,00%	40
17	JAWA TIMUR	JEMBER	2	300.000.000	2	300.000.000	100,00%	2	100,00%	40
18	JAWA TIMUR	LAMONGAN	2	300.000.000	2	300.000.000	100,00%	2	100,00%	40
19	JAWA TIMUR	LUMAJANG	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
20	JAWA TIMUR	NGANJUK	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%	60
21	JAWA TIMUR	PAMEKASAN	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
22	JAWA TIMUR	SAMPANG	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
23	JAWA TIMUR	SUMENEP	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%	100
24	JAWA TIMUR	TRENGGALEK	2	300.000.000	2	300.000.000	100,00%	2	100,00%	40
25	JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
26	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00%	1	100,00%	20
27	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	2	300.000.000	2	300.000.000	100,00%	2	100,00%	40
28	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
29	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	7	400.000.000	7	400.000.000	100,00%	7	100,00%	140
30	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	3	400.000.000	3	400.000.000	100,00%	3	100,00%	60
31	LAMPUNG	PRINGSEWU	2	250.000.000	2	250.000.000	100,00%	2	100,00%	40
32	LAMPUNG	WAY KANAN	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
33	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	2	250.000.000	2	250.000.000	100,00%	2	100,00%	40
34	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	2	250.000.000	2	250.000.000	100,00%	2	100,00%	40
35	PAPUA	KEEROM	3	318.750.000	3	318.750.000	100,00%	3	100,00%	60
36	SULAWESI SELATAN	BONE	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00%	1	100,00%	20
37	SULAWESI SELATAN	MAROS	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00%	1	100,00%	20
38	SULAWESI SELATAN	PINRANG	4	450.000.000	4	450.000.000	100,00%	4	100,00%	80
39	SULAWESI SELATAN	SIDENRENG RAPPANG	1	170.000.000	1	170.000.000	100,00%	1	100,00%	20
40	SULAWESI SELATAN	TAKALAR	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00%	1	100,00%	20
41	SULAWESI SELATAN	WAJO	2	300.000.000	2	300.000.000	100,00%	2	100,00%	40
42	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
43	SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG	2	300.000.000	2	300.000.000	100,00%	2	100,00%	40
44	SUMATERA UTARA	BATUBARA	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%	20
45	SUMATERA UTARA	SAMOSIR	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%	40
TOTAL			83	9.743.750.000	83	9.743.750.000	100,00%	83	100,00%	1.660

Rekapitulasi per sub sektor

No	Sub Sektor	Volume
		(Unit)
1	Tanaman Pangan	82
2	Hortikultura	-
3	Perkebunan	-
4	Peternakan	1
TOTAL		83

Lampiran 12. Realisasi Konservasi Air berupa Irigasi Betekanan TA. 2024

No	Provinsi/Kabupaten	Alokasi		Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik	
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%
	NASIONAL	266	31.920.000.000	233	31.394.969.000	98,36%	233	87,59%
1	JAWA BARAT	38	5.300.000.000	38	5.300.000.000	100,00%	38	93,75%
1	Subang	5	550.000.000	5	550.000.000	100,00%	5	100,00%
2	Sumedang	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
3	Majalengka	7	700.000.000	7	700.000.000	100,00%	7	100,00%
4	Cirebon	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%
5	Sukabumi	2	1.630.000.000	2	1.630.000.000	100,00%	1	50,00%
6	Bogor	1	60.000.000	1	60.000.000	100,00%	1	100,00%
7	Ciamis	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%
8	Indramayu	2	220.000.000	2	220.000.000	100,00%	2	100,00%
9	Bandung	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%
10	Kuningan	4	420.000.000	4	420.000.000	100,00%	4	100,00%
11	Garut	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%
12	Tasikmalaya	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%
2	JAWA TENGAH	14	6.520.075.000	14	6.520.075.000	100,00%	14	100,00%
14	Rembang	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00%	1	100,00%
15	Purbalingga	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%
16	Klaten	3	370.000.000	3	370.000.000	100,00%	3	100,00%
17	Banyumas	3	5.169.500.000	3	5.169.500.000	100,00%	3	100,00%
18	Semarang	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%
19	Karanganyar	1	70.000.000	1	70.000.000	100,00%	1	100,00%
20	Sukoharjo	4	560.575.000	4	560.575.000	100,00%	3	75,00%
3	JAWA TIMUR	14	1.400.000.000	14	1.400.000.000	100,00%	14	100,00%
21	Tuban	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%
22	Sumenep	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%
23	Pacitan	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%
4	BANTEN	6	600.000.000	6	600.000.000	100,00%	6	100,00%
24	Lebak	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%
25	Pandeglang	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%
5	DI YOGYAKARTA	29	3.150.094.000	29	3.150.094.000	100,00%	29	100,00%
26	Gunungkidul	29	3.150.094.000	29	3.150.094.000	100,00%	29	100,00%
6	ACEH	34	3.400.000.000	34	3.400.000.000	100,00%	34	100,00%
27	Aceh Tengah	9	900.000.000	9	900.000.000	100,00%	9	100,00%
28	Bener Meriah	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%
29	Aceh Tamiang	11	1.100.000.000	11	1.100.000.000	100,00%	11	100,00%
30	Bireun	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%
31	Aceh Selatan	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%
7	SUMATERA UTARA	22	2.200.000.000	22	2.200.000.000	100,00%	22	100,00%
32	Simalungun	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%
33	Padang Lawas Utara	15	1.500.000.000	15	1.500.000.000	100,00%	15	100,00%
34	Padang Lawas	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%
8	LAMPUNG	8	800.000.000	8	800.000.000	100,00%	8	100,00%
35	Lampung Selatan	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%
36	Lampung Tengah	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%
37	Lampung Timur	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%
9	SULAWESI SELATAN	41	4.412.800.000	41	4.412.800.000	100,00%	41	100,00%
38	Wajo	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%
39	Sidenreng Rappang	5	700.000.000	5	700.000.000	100,00%	5	100,00%
40	Enrekang	7	700.000.000	7	700.000.000	100,00%	7	100,00%
41	Bulukumba	7	700.000.000	7	700.000.000	100,00%	7	100,00%
42	Pangkajene dan Kepulauan	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	100,00%	10	100,00%
43	Kota Makassar	1	112.800.000	1	112.800.000	100,00%	1	100,00%
44	Bantaeng	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00%	1	100,00%
45	Bone	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%
46	Maros	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00%	1	100,00%
47	Luwu	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%

No	Provinsi/Kabupaten	Alokasi		Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik	
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%
10	SULAWESI TENGAH	7	700.000.000	7	700.000.000	100,00%	7	100,00%
48	Poso	7	700.000.000	7	700.000.000	100,00%	7	100,00%
11	SULAWESI BARAT	11	1.100.000.000	11	1.100.000.000	100,00%	11	100,00%
49	Polewali Mandar	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%
50	Mamasa	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%
51	Pasangkayu	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%
12	NUSA TENGGARA BARAT	6	924.000.000	6	924.000.000	100,00%	6	100,00%
52	Dompu	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%
53	Sumbawa	1	200.000.000	1	200.000.000	100,00%	1	100,00%
54	Lombok Barat	1	324.000.000	1	324.000.000	100,00%	1	100,00%
13	PAPUA SELATAN	1	208.000.000	1	208.000.000	100,00%	1	100,00%
55	Merauke	1	208.000.000	1	208.000.000	100,00%	1	100,00%
14	NUSA TENGGARA TIMUR	1	300.000.000	1	300.000.000	100,00%	1	100,00%
56	Kupang	1	300.000.000	1	300.000.000	100,00%	1	100,00%
16	KALIMANTAN TIMUR	1	380.000.000	1	380.000.000	100,00%	1	100,00%
57	Penajem Paser Utara	1	380.000.000	1	380.000.000	100,00%	1	100,00%
	Alokasi	33	525.031.000					

Lampiran 13. Realisasi Konservasi Air Berupa Damparit TA. 2024

No	Propinsi/Kabupaten	Alokasi		Realisasi Keuangan			Realisasi Fisk	
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%
	NASIONAL	121	14.520.000.000	100	12.536.140.000	86,34%	100	82,64%
1	JAWA BARAT	22	2.920.000.000	22	2.920.000.000	100,00%	22	100,00%
1	Sukabumi	5	880.000.000	5	880.000.000	100,00%	5	100,00%
2	Garut	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
3	Kuningan	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00%
4	Purwakarta	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00%
5	Tasikmalaya	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
2	JAWA TENGAH	3	836.140.000	3	836.140.000	100,00%	3	100,00%
6	Purbalingga	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
7	Banjarnegara	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
8	Pati	1	596.140.000	1	596.140.000	100,00%	1	100,00%
3	JAWA TIMUR	7	740.000.000	7	740.000.000	100,00%	7	100,00%
9	Pacitan	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
10	Lumajang	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%
11	Trenggalek	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
4	BANTEN	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%
12	Lebak	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
13	Pandeglang	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
5	ACEH	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
14	Aceh Utara	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
6	SUMATERA UTARA	2	300.000.000	2	300.000.000	100,00%	2	100,00%
15	Padang Lawas	1	250.000.000	1	250.000.000	100,00%	1	100,00%
16	Deli Serdang	1	50.000.000	1	50.000.000	100,00%	1	100,00%
7	SUMATERA BARAT	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00%
17	Pasaman Barat	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%
18	Kota Padang	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
8	SUMATERA SELATAN	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00%
19	Oku Selatan	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00%
9	KEP. BANGKA BELITUNG	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
20	Bangka Selatan	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
10	SULAWESI BARAT	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
21	Polewali Mandar	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
22	Mamasa	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00%
11	SULAWESI SELATAN	27	3.060.000.000	27	3.060.000.000	100,00%	27	100,00%
23	Takalar	4	400.000.000	4	400.000.000	100,00%	4	100,00%
24	Gowa	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
25	Jeneponto	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
26	Bantaeng	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
27	Kota Palopo	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%
28	Luwu	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
29	Enrekang	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%
12	SULAWESI TENGGARA	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00%
30	Konawe Kepulauan	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00%
13	GORONTALO	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
31	Pohuwato	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
32	Boalemo	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
33	Gorontalo Utara	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
34	Bone Bolango	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%

No	Propinsi/Kabupaten	Alokasi		Realisasi Keuangan			Realisasi Fisk	
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%
14	KALIMANTAN BARAT	8	960.000.000	8	960.000.000	100,00%	8	100,00%
32	Sekadau	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
33	Melawi	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
15	NUSA TENGGARA TIMUR	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00%
33	Kupang	1	120.000.000	1	120.000.000	0,00%	1	100,00%
34	Manggarai Timur	1	120.000.000	1	120.000.000	0,00%	1	100,00%
35	Alor	1	120.000.000	1	120.000.000	0,00%	1	100,00%
16	LAMPUNG	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%
36	Way Kanan	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%
17	RIAU	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%
37	Kuantan Singingi	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%
	Alokasi	21	1.983.860.000					

**Lampiran 14. Realisasi Konservasi Air Berupa Normalisasi Saluran
TA. 2024**

No	Propinsi/Kabupaten	Alokasi		Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik	
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%
	NASIONAL	33	3.960.000.000	24	2.695.000.000	68,06%	24	72,73%
1	JAWA BARAT	3	225.000.000	3	225.000.000	100,00%	3	100,00%
1	Bandung	1	25.000.000	1	25.000.000	100,00%	1	100,00%
2	Indramayu	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%
2	JAWA TENGAH	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%
3	Sukoharjo	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%
4	Klaten	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	1	100,00%
3	NUSA TENGGARA BARAT	6	620.000.000	6	620.000.000	100,00%	6	100,00%
5	Lombok Timur	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
6	Dompu	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%
4	SULAWESI TENGGARA	7	700.000.000	7	700.000.000	100,00%	7	100,00%
7	Konawe Selatan	5	500.000.000	5	500.000.000	100,00%	5	100,00%
8	Konawe Utara	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00%	2	100,00%
5	SULAWESI BARAT	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%
9	Majene	3	300.000.000	3	300.000.000	100,00%	3	100,00%
6	SUMATERA BARAT	2	300.000.000	2	300.000.000	100,00%	2	100,00%
10	Kota Padang	2	300.000.000	2	300.000.000	100,00%	2	100,00%
7	SUMATERA UTARA	1	350.000.000	1	350.000.000	100,00%	1	100,00%
11	Padang Lawas	1	350.000.000	1	350.000.000	100,00%	1	100,00%
	Alokasi	9	1.265.000.000					

**Lampiran 15. Realisasi Konservasi Air Berupa Tata Air Mikro
TA. 2024**

No	Propinsi/Kabupaten	Total Pagu		Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik	
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	%	Unit	%
	NASIONAL	58	6.960.000.000	58	6.960.000.000	100,00%	58	100,00%
1	Kalimantan Tengah	58	6.960.000.000	58	6.960.000.000	100,00%	58	100,00%
1	Kapuas	58	6.960.000.000	58	6.960.000.000	100,00%	58	100,00%

Lampiran 16. Data Capaian Kegiatan Konservasi Air Berupa Pengembangan Embung Pertanian (Dana TP) TA 2019 – 2023

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TA. 2019						
		PAGU		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
	NASIONAL	400	48.000.000.000	400	48.000.000.000	100,00%	400	100,00%
1	ACEH	16	1.920.000.000	16	1.920.000.000	100,00%	16	100,00%
2	SUMATERA UTARA	13	1.560.000.000	13	1.560.000.000	100,00%	13	100,00%
3	SUMATERA BARAT	8	960.000.000	8	960.000.000	100,00%	8	100,00%
4	RIAU	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00%	1	100,00%
5	JAMBI	17	2.040.000.000	17	2.040.000.000	100,00%	17	100,00%
6	SUMATERA SELATAN	9	1.080.000.000	9	1.080.000.000	100,00%	9	100,00%
7	BENGKULU	8	960.000.000	8	960.000.000	100,00%	8	100,00%
8	LAMPUNG	16	1.920.000.000	16	1.920.000.000	100,00%	16	100,00%
9	BANGKA BELITUNG							
10	KEPULAUAN RIAU	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%
11	JAWA BARAT	36	4.320.000.000	36	4.320.000.000	100,00%	36	100,00%
12	JAWA TENGAH	33	3.960.000.000	33	3.960.000.000	100,00%	33	100,00%
13	DI. YOGYAKARTA	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00%
14	JAWA TIMUR	35	4.200.000.000	35	4.200.000.000	100,00%	35	100,00%
15	BANTEN	5	600.000.000	5	600.000.000	100,00%	5	100,00%
16	BALI	20	2.400.000.000	20	2.400.000.000	100,00%	20	100,00%
17	NTB	11	1.320.000.000	11	1.320.000.000	100,00%	11	100,00%
18	NTT	19	2.280.000.000	19	2.280.000.000	100,00%	19	100,00%
19	KALIMANTAN BARAT	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00%
20	KALIMANTAN TENGAH							
21	KALIMANTAN SELATAN	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%
22	KALIMANTAN TIMUR	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00%
23	KALIMANTAN UTARA	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00%
24	SULAWESI UTARA	12	1.440.000.000	12	1.440.000.000	100,00%	12	100,00%
25	SULAWESI TENGAH	20	2.400.000.000	20	2.400.000.000	100,00%	20	100,00%
26	SULAWESI SELATAN	42	5.040.000.000	42	5.040.000.000	100,00%	42	100,00%
27	SULAWESI TENGGARA	18	2.160.000.000	18	2.160.000.000	100,00%	18	100,00%
28	GORONTALO	9	1.080.000.000	9	1.080.000.000	100,00%	9	100,00%
29	SULAWESI BARAT	16	1.920.000.000	16	1.920.000.000	100,00%	16	100,00%
30	MALUKU	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%
31	MALUKU UTARA	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00%
32	PAPUA	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%
33	PAPUA BARAT	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TA. 2020						
		PAGU		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
	NASIONAL	400	48000000000	400	48.000.000.000	100,00%	400	100,00%
1	ACEH	15	1.800.000.000	15	1.800.000.000	100,00%	15	100,00%
2	SUMATERA UTARA	9	1.080.000.000	9	1.080.000.000	100,00%	9	100,00%
3	SUMATERA BARAT	7	840.000.000	7	840.000.000	100,00%	7	100,00%
4	RIAU	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
5	JAMBI	15	1.800.000.000	15	1.800.000.000	100,00%	15	100,00%
6	SUMATERA SELATAN	9	1.080.000.000	9	1.080.000.000	100,00%	9	100,00%
7	BENGKULU	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	100,00%	10	100,00%
8	LAMPUNG	14	1.680.000.000	14	1.680.000.000	100,00%	14	100,00%
9	BANGKA BELITUNG			0				
10	KEPULAUAN RIAU			0				
11	JAWA BARAT	37	4.440.000.000	37	4.440.000.000	100,00%	37	100,00%
12	JAWA TENGAH	31	3.720.000.000	31	3.720.000.000	100,00%	31	100,00%
13	DI. YOGYAKARTA	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00%
14	JAWA TIMUR	18	2.160.000.000	18	2.160.000.000	100,00%	18	100,00%
15	BANTEN	5	600.000.000	5	600.000.000	100,00%	5	100,00%
16	BALI	25	3.000.000.000	25	3.000.000.000	100,00%	25	100,00%
17	NTB	9	1.080.000.000	9	1.080.000.000	100,00%	9	100,00%
18	NTT	19	2.280.000.000	19	2.280.000.000	100,00%	19	100,00%
19	KALIMANTAN BARAT	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00%
20	KALIMANTAN TENGAH			0				
21	KALIMANTAN SELATAN	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
22	KALIMANTAN TIMUR	5	600.000.000	5	600.000.000	100,00%	5	100,00%
23	KALIMANTAN UTARA	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
24	SULAWESI UTARA	12	1.440.000.000	12	1.440.000.000	100,00%	12	100,00%
25	SULAWESI TENGAH	28	3.360.000.000	28	3.360.000.000	100,00%	28	100,00%
26	SULAWESI SELATAN	44	5.280.000.000	44	5.280.000.000	100,00%	44	100,00%
27	SULAWESI TENGGARA	19	2.280.000.000	19	2.280.000.000	100,00%	19	100,00%
28	GORONTALO	14	1.680.000.000	14	1.680.000.000	100,00%	14	100,00%
29	SULAWESI BARAT	16	1.920.000.000	16	1.920.000.000	100,00%	16	100,00%
30	MALUKU	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
31	MALUKU UTARA	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00%
32	PAPUA	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%
33	PAPUA BARAT	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00%

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TA. 2021						
		PAGU		REALISASI KEUANGAN			FISIK	
		Jumlah (Unit)	(Rp)	Jumlah		(%)	UNIT	%
				Unit	Rp			
		401	48.120.000.000	400	48.120.000.000	100,00%	401	100,00%
1	ACEH	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	100,00%	10	100,00%
2	SUMATERA UTARA	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00%
3	SUMATERA BARAT	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	100,00%	10	100,00%
4	RIAU	9	1.080.000.000	9	1.080.000.000	100,00%	9	100,00%
5	JAMBI	9	1.080.000.000	9	1.080.000.000	100,00%	9	100,00%
6	SUMATERA SELATAN	8	960.000.000	8	960.000.000	100,00%	8	100,00%
7	BENGKULU	5	600.000.000	5	600.000.000	100,00%	5	100,00%
8	LAMPUNG	7	840.000.000	7	840.000.000	100,00%	7	100,00%
9	BANGKA BELITUNG	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	0,00%
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-			
11	JAWA BARAT	29	3.480.000.000	29	3.480.000.000	100,00%	29	100,00%
12	JAWA TENGAH	42	5.040.000.000	42	5.040.000.000	100,00%	42	100,00%
13	DI. YOGYAKARTA	8	960.000.000	8	960.000.000	100,00%	8	100,00%
14	JAWA TIMUR	30	3.600.000.000	30	3.600.000.000	100,00%	30	100,00%
15	BANTEN	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00%	3	100,00%
16	BALI	18	2.160.000.000	18	2.160.000.000	100,00%	18	100,00%
17	NTB	8	960.000.000	7	960.000.000	100,00%	8	100,00%
18	NTT	16	1.920.000.000	16	1.920.000.000	100,00%	16	100,00%
19	KALIMANTAN BARAT	8	960.000.000	8	960.000.000	100,00%	8	100,00%
20	KALIMANTAN TENGAH	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00%	4	100,00%
21	KALIMANTAN SELATAN	8	960.000.000	8	960.000.000	100,00%	8	100,00%
22	KALIMANTAN TIMUR	5	600.000.000	5	600.000.000	100,00%	5	100,00%
23	KALIMANTAN UTARA	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%
24	SULAWESI UTARA	9	1.080.000.000	9	1.080.000.000	100,00%	9	100,00%
25	SULAWESI TENGAH	26	3.120.000.000	26	3.120.000.000	100,00%	26	100,00%
26	SULAWESI SELATAN	48	5.760.000.000	48	5.760.000.000	100,00%	48	100,00%
27	SULAWESI TENGGARA	19	2.280.000.000	19	2.280.000.000	100,00%	19	100,00%
28	GORONTALO	14	1.680.000.000	14	1.680.000.000	100,00%	14	100,00%
29	SULAWESI BARAT	21	2.520.000.000	21	2.520.000.000	100,00%	21	100,00%
30	MALUKU	7	840.000.000	7	840.000.000	100,00%	7	100,00%
31	MALUKU UTARA	5	600.000.000	5	600.000.000	100,00%	5	100,00%
32	PAPUA	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00%	2	100,00%
33	PAPUA BARAT	6	720.000.000	6	720.000.000	100,00%	6	100,00%

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2022						
		PAGU		REALISASI KEUANGAN			FISIK	
		Jumlah	(Rp)	Jumlah		(%)	UNIT	%
		(Unit)		Unit	Rp			
		401	48,120,000,000	400	48,120,000,000	100.00%	401	100.00%
1	ACEH	10	1,200,000,000	10	1,200,000,000	100.00%	10	100.00%
2	SUMATERA UTARA	3	360,000,000	3	360,000,000	100.00%	3	100.00%
3	SUMATERA BARAT	10	1,200,000,000	10	1,200,000,000	100.00%	10	100.00%
4	RIAU	9	1,080,000,000	9	1,080,000,000	100.00%	9	100.00%
5	JAMBI	9	1,080,000,000	9	1,080,000,000	100.00%	9	100.00%
6	SUMATERA SELATAN	8	960,000,000	8	960,000,000	100.00%	8	100.00%
7	BENGKULU	5	600,000,000	5	600,000,000	100.00%	5	100.00%
8	LAMPUNG	7	840,000,000	7	840,000,000	100.00%	7	100.00%
9	BANGKA BELITUNG	2	240,000,000	2	240,000,000	100.00%	2	0.00%
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-			
11	JAWA BARAT	29	3,480,000,000	29	3,480,000,000	100.00%	29	100.00%
12	JAWA TENGAH	42	5,040,000,000	42	5,040,000,000	100.00%	42	100.00%
13	DI. YOGYAKARTA	8	960,000,000	8	960,000,000	100.00%	8	100.00%
14	JAWA TIMUR	30	3,600,000,000	30	3,600,000,000	100.00%	30	100.00%
15	BANTEN	3	360,000,000	3	360,000,000	100.00%	3	100.00%
16	BALI	18	2,160,000,000	18	2,160,000,000	100.00%	18	100.00%
17	NTB	8	960,000,000	7	960,000,000	100.00%	8	100.00%
18	NTT	16	1,920,000,000	16	1,920,000,000	100.00%	16	100.00%
19	KALIMANTAN BARAT	8	960,000,000	8	960,000,000	100.00%	8	100.00%
20	KALIMANTAN TENGAH	4	480,000,000	4	480,000,000	100.00%	4	100.00%
21	KALIMANTAN SELATAN	8	960,000,000	8	960,000,000	100.00%	8	100.00%
22	KALIMANTAN TIMUR	5	600,000,000	5	600,000,000	100.00%	5	100.00%
23	KALIMANTAN UTARA	2	240,000,000	2	240,000,000	100.00%	2	100.00%
24	SULAWESI UTARA	9	1,080,000,000	9	1,080,000,000	100.00%	9	100.00%
25	SULAWESI TENGAH	26	3,120,000,000	26	3,120,000,000	100.00%	26	100.00%
26	SULAWESI SELATAN	48	5,760,000,000	48	5,760,000,000	100.00%	48	100.00%
27	SULAWESI TENGGARA	19	2,280,000,000	19	2,280,000,000	100.00%	19	100.00%
28	GORONTALO	14	1,680,000,000	14	1,680,000,000	100.00%	14	100.00%
29	SULAWESI BARAT	21	2,520,000,000	21	2,520,000,000	100.00%	21	100.00%
30	MALUKU	7	840,000,000	7	840,000,000	100.00%	7	100.00%
31	MALUKU UTARA	5	600,000,000	5	600,000,000	100.00%	5	100.00%
32	PAPUA	2	240,000,000	2	240,000,000	100.00%	2	100.00%
33	PAPUA BARAT	6	720,000,000	6	720,000,000	100.00%	6	100.00%

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung Geomembran Tahun 2023					
		Target		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		UNIT	RP	UNIT	RP	UNIT	%
NASIONAL		400	20.000.000.000	400	20.000.000.000	400	100,00%
1	ACEH	19	950.000.000	19	950.000.000	19	100,00%
	1 ACEH UTARA	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	2 BIREUN	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	3 ACEH TIMUR	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	4 ACEH TENGAH	6	300.000.000	6	300.000.000	6	100,00%
	5 ACEH TENGGARA	4	200.000.000	4	200.000.000	4	100,00%
2	BALI	10	500.000.000	10	500.000.000	10	100,00%
	1 KARANGASEM	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100,00%
	2 BANGLI	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100,00%
	3 BULELENG	7	350.000.000	7	350.000.000	7	100,00%
3	BANTEN	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	20	100,00%
	1 SERANG	6	300.000.000	6	300.000.000	6	100,00%
	2 LEBAK	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	3 PANDEGLANG	11	550.000.000	11	550.000.000	11	100,00%
4	GORONTALO	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	1 GORONTALO	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
5	JAWA BARAT	60	3.000.000.000	60	3.000.000.000	60	100,00%
	1 KARAWANG	9	450.000.000	9	450.000.000	9	100,00%
	2 KUNINGAN	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	3 PURWAKARTA	7	350.000.000	7	350.000.000	7	100,00%
	4 CIAMIS	7	350.000.000	7	350.000.000	7	100,00%
	5 SUKABUMI	9	450.000.000	9	450.000.000	9	100,00%
	6 GARUT	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	7 TASIKMALAYA	7	350.000.000	7	350.000.000	7	100,00%
	8 SUBANG	6	300.000.000	6	300.000.000	6	100,00%
	9 CIANJUR	7	350.000.000	7	350.000.000	7	100,00%
6	JAWA TENGAH	63	3.150.000.000	63	3.150.000.000	63	100,00%
	1 PURBALINGGA	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	2 TEGAL	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	3 WONOGIRI	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	4 PEMALANG	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100,00%
	5 TEMANGGUNG	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100,00%
	6 PATI	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	7 KLATEN	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	8 BATANG	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	9 BANYUMAS	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	10 PURWOREJO	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100,00%
	11 MAGELANG	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	12 REMBANG	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	13 KARANGANYAR	4	200.000.000	4	200.000.000	4	100,00%
	14 JEPARA	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	15 GROBOGAN	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	16 BLORA	10	500.000.000	10	500.000.000	10	100,00%
	17 CILACAP	4	200.000.000	4	200.000.000	4	100,00%
7	JAWA TIMUR	41	2.050.000.000	41	2.050.000.000	41	100,00%
	1 PAMEKASAN	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	2 MAGETAN	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	3 PACITAN	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	4 TUBAN	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	5 LAMONGAN	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	6 MADIUN	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100,00%
	7 BLITAR	11	550.000.000	11	550.000.000	11	100,00%
	8 BANGKALAN	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	9 JEMBER	4	200.000.000	4	200.000.000	4	100,00%

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung Geomembran Tahun 2023					
		Target		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		UNIT	RP	UNIT	RP	UNIT	%
8	KALIMANTAN BARAT	10	500.000.000	10	500.000.000	10	100,00%
	1 MELAWI	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	2 SINTANG	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	3 LANDAK	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100,00%
9	KALIMANTAN SELATAN	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	1 TABALONG	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
10	LAMPUNG	28	1.400.000.000	28	1.400.000.000	28	100,00%
	1 PESAWARAN	18	900.000.000	18	900.000.000	18	100,00%
	2 MESUJI	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	3 PRINGSEWU	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	4 LAMPUNG TENGAH	4	200.000.000	4	200.000.000	4	100,00%
11	NTB	36	1.800.000.000	36	1.800.000.000	36	100,00%
	1 LOMBOK BARAT	10	500.000.000	10	500.000.000	10	100,00%
	2 SUMBAWA	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	3 LOMBOK TENGAH	6	300.000.000	6	300.000.000	6	100,00%
	4 DOMPU	9	450.000.000	9	450.000.000	9	100,00%
	5 BIMA	6	300.000.000	6	300.000.000	6	100,00%
12	SULAWESI BARAT	22	1.100.000.000	22	1.100.000.000	22	100,00%
	1 MAMUJU	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100,00%
	2 MAJENE	8	400.000.000	8	400.000.000	8	100,00%
	3 POLEWALI MANDAR	10	500.000.000	10	500.000.000	10	100,00%
	4 MAMUJU	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
13	SULAWESI SELATAN	44	2.200.000.000	44	2.200.000.000	44	100,00%
	1 BARRU	6	300.000.000	6	300.000.000	6	100,00%
	2 SINJAI	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	3 JENEPONTO	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	4 SOPPENG	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	5 TAKALAR	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	6 SIDENRENG RAPPANG	6	300.000.000	6	300.000.000	6	100,00%
	7 GOWA	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	8 PALOPO	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	9 LUWUK	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	10 BONE	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100,00%
14	SULAWESI TENGGARA	4	200.000.000	4	200.000.000	4	100,00%
	1 KOLAKA	4	200.000.000	4	200.000.000	4	100,00%
15	SUMATERA SELATAN	4	200.000.000	4	200.000.000	4	100,00%
	1 LAHAT	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100,00%
	2 OKU SELATAN	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100,00%
16	SUMATERA UTARA	28	1.400.000.000	28	1.400.000.000	28	100,00%
	1 SAMOSIR	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	2 PADANG LAWAS	3	150.000.000	3	150.000.000	3	100,00%
	3 PADANG LAWAS UTARA	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	4 PAKPAK BHARAT	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	5 LABUAN BATU	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	6 TAPANULI UTARA	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
17	YOGYAKARTA	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%
	1 GUNUNGKIDUL	5	250.000.000	5	250.000.000	5	100,00%

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Embung Geomembran Tahun 2023					
		Target		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	%
	NASIONAL	100	1.940.000.000	100	1.940.000.000	100	100,00%
1	ACEH	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100,00%
	1 ACEH TENGGARA	4	80.000.000	4	80.000.000	4	100,00%
	2 ACEH UTARA	1	20.000.000	1	20.000.000	1	100,00%
	3 BIREUN	3	60.000.000	3	60.000.000	3	100,00%
2	GORONTALO	6	120.000.000	6	120.000.000	6	100,00%
	1 GORONTALO	6	120.000.000	6	120.000.000	6	100,00%
3	JAWA TIMUR	7	140.000.000	7	140.000.000	7	100,00%
	1 TUBAN	4	80.000.000	4	80.000.000	4	100,00%
	2 BLITAR	3	60.000.000	3	60.000.000	3	100,00%
4	KALIMANTAN BARAT	3	60.000.000	3	60.000.000	3	100,00%
	1 LANDAK	3	60.000.000	3	60.000.000	3	100,00%
5	LAMPUNG	4	80.000.000	4	80.000.000	4	100,00%
	1 LAMPUNG TENGAH	4	80.000.000	4	80.000.000	4	100,00%
6	SULAWESI SELATAN	59	1.180.000.000	59	1.180.000.000	59	100,00%
	1 ENREKANG	29	580.000.000	29	580.000.000	29	100,00%
	2 SINJAI	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100,00%
	3 SIDENRENG RAPPANG	10	200.000.000	10	200.000.000	10	100,00%
	4 BARRU	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100,00%
	5 BONE	10	200.000.000	10	200.000.000	10	100,00%
7	SULAWESI BARAT	12	240.000.000	12	240.000.000	12	100,00%
	1 MAJENE	4	80.000.000	4	80.000.000	4	100,00%
	2 MAMUJU	3	60.000.000	3	60.000.000	3	100,00%
	3 POLEWALI MANDAR	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100,00%
8	SUMATERA SELATAN	1	20.000.000	1	20.000.000	1	100,00%
	1 LAHAT	1	20.000.000	1	20.000.000	1	100,00%

No	Provinsi/Kabupaten	Embung TP 2023					
		Target		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Unit	Rp	Rp	%	Unit	%
	NASIONAL	3	360.000.000	360.000.000	100,00%	3	100,00%
1	BALI	3	360.000.000	360.000.000	100,00%	3	100,00%
	1 Tabanan	3	360.000.000	360.000.000	100,00%	3	100,00%

Lampiran 17. Rekomendasi Mitigasi Iklim TA. 2024

1. Adaptasi dalam menyikapi awal musim kemarau

- a. *Early warning system* dan rutin pantau informasi BMKG
- b. Pada wilayah yang mengalami awal musim kemarau pada Mei-Juli 2024 perlu ada persiapan pemanfaatan sumber-sumber air alternatif dan pemilihan komoditas yang sesuai.
- c. Pada wilayah yang diprediksi masih akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) perlu ada persiapan pemanfaatan sumber-sumber air alternatif.
- d. Pada wilayah yang tidak mengalami musim kemarau, berpeluang melakukan tanam lebih awal sekitar bulan September-Oktober 2024
- e. Untuk melakukan penjadwalan musim tanam menyesuaikan karakteristik klimatologi wilayah
- f. Pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi tersier/kuarter, gerakan panen air, teknologi hemat air
- g. Gunakan benih toleran kekeringan
- h. Memanfaatkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi yang sudah mendaftar

2. Adaptasi dalam menyikapi awal musim hujan

Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa awal musim hujan di Indonesia dimulai pada Bulan September 2024 dan diperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada Bulan Desember sd Januari 2024.

Dalam rangka menghadapi musim hujan dan antisipasi terjadinya banjir/longsor, agar tidak mengganggu produksi pangan nasional, maka perlu segera dilakukan upaya-upaya antisipasi dan mitigasi. Untuk itu perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir/longsor akibat perubahan iklim,

- b. Memetakan daerah rawan banjir melalui pemantauan kondisi iklim harian yang datanya bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),
- c. Melakukan percepatan tanam pada daerah yang rawan banjir di Bulan Januari – Februari 2025 dan sudah memasuki musim hujan, dengan mengerahkan brigade alsintan dan prasarana pendukung seperti traktor, pupuk, benih dan lainnya untuk mempercepat proses pengolahan tanah dan tanam.
- d. Melakukan normalisasi saluran dan pembangunan tanggul penahan air,
- e. Menggunakan benih varietas tahan genangan air,
- f. Mendorong petani untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Lampiran 18. Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier TA. 2024

DAERAH IRIGASI		Kecamatan:	Kubung
Penerima Manfaat	: HEGAR MANAH	Desa	: Saok Laweh
Provinsi	: SUMATERA BARAT	Kabupaten	: solok



Gambar 0 %

Gambar 50 %

Gambar 100 %

DAERAH IRIGASI		Kecamatan:	: CAMBA
Penerima Manfaat	: SINAR MANDALLE I	Desa	: CENRANA
Provinsi	: SULAWESI SELATAN	Kabupaten	: MAROS



Gambar 0 %

Gambar 50 %

Gambar 100 %

DAERAH IRIGASI		Kecamatan:	: WELERI
Penerima Manfaat	: SUBUR BARU	Desa	: BUMIAYU
Provinsi	: JAWA TENGAH	Kabupaten	: KENDAL



Gambar 0 %

Gambar 50 %

Gambar 100 %

DAERAH IRIGASI		Kecamatan:	: ALAK
Penerima Manfaat	: TETUS	Desa	: NAIONI
Provinsi	: NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten	: KOTA KUPANG



Gambar 0 %

Gambar 50 %

Gambar 100 %

DAERAH IRIGASI		Kecamatan:	: Kurik
Penerima Manfaat	: GOTONG ROYONG	Desa	: Padang Raharja
Provinsi	: PAPUA SELATAN	Kabupaten	: MERAUKE

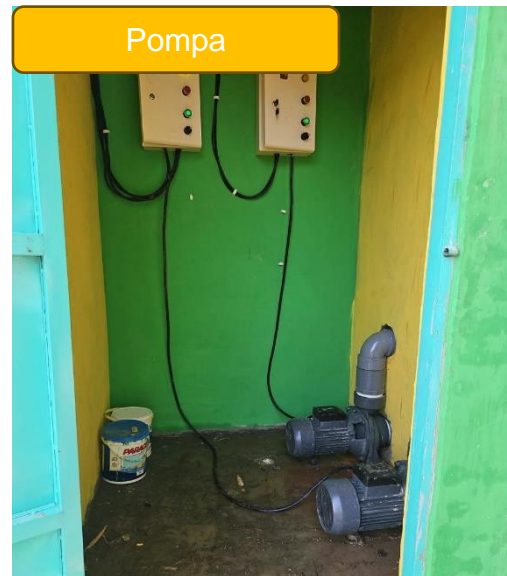
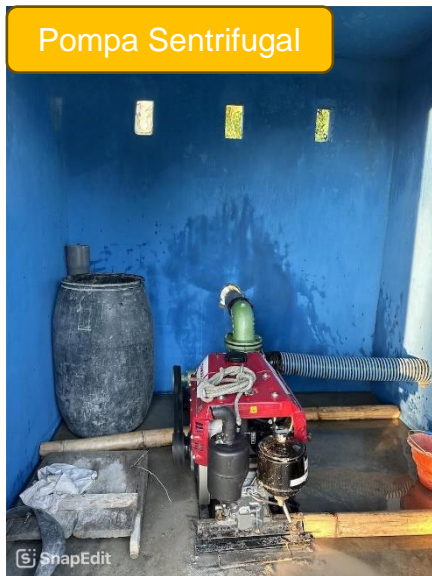


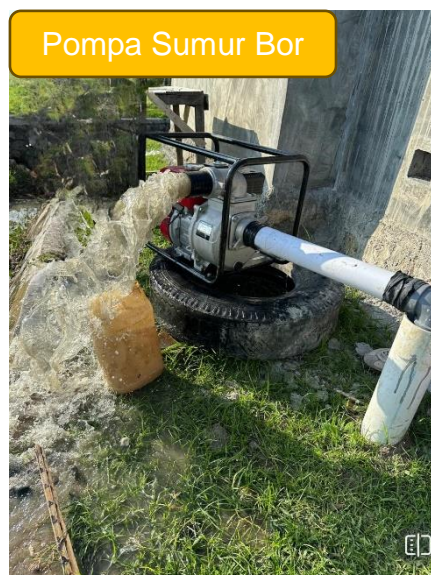
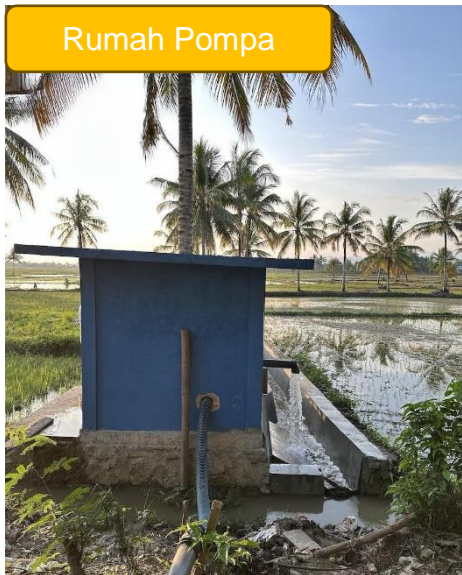
Gambar 0 %

Gambar 50 %

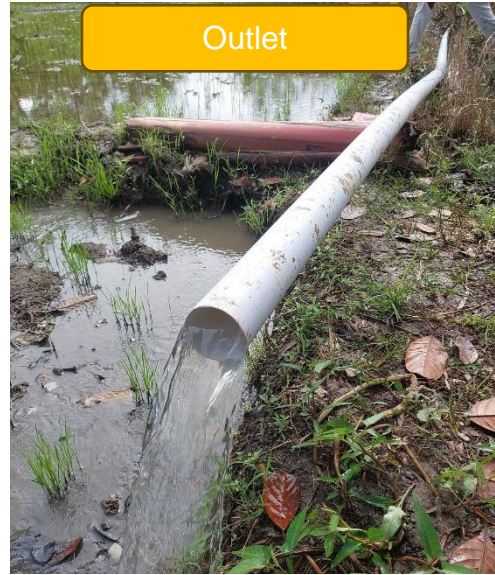
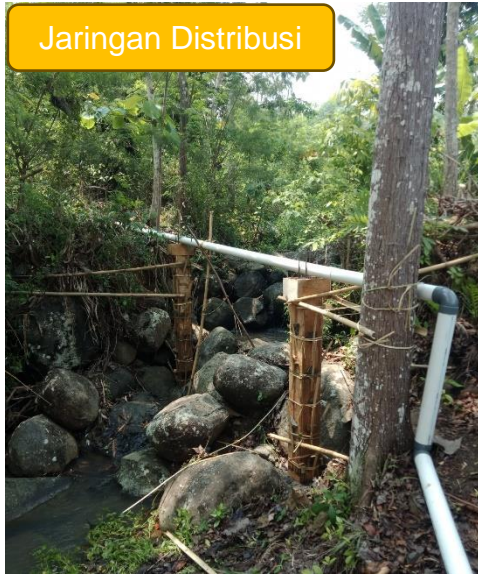
Gambar 100 %

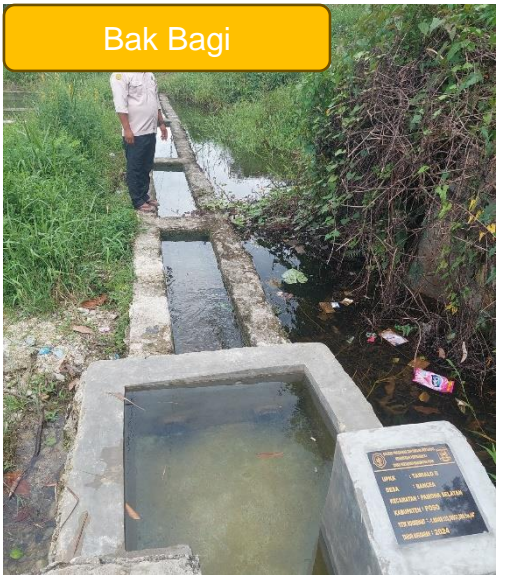
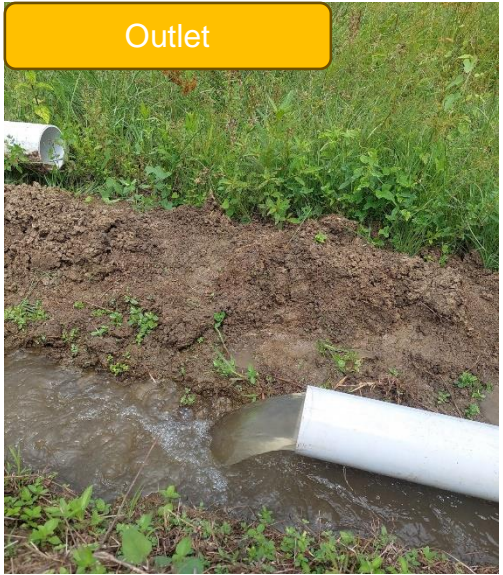
Lampiran 19. Dokumentasi Kegiatan Irigasi Perpompaan TA. 2024



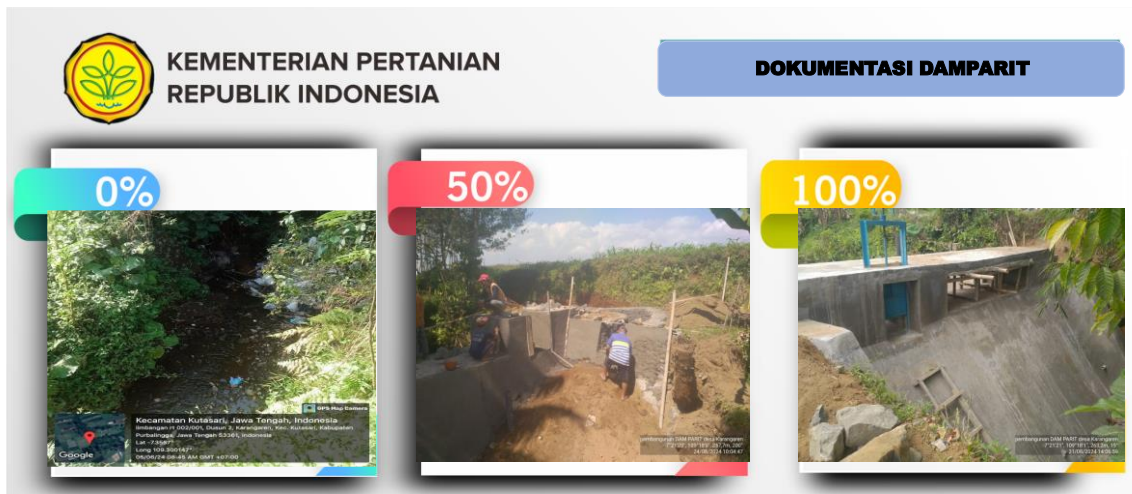


Lampiran 20. Dokumentasi Kegiatan Irigasi Perpipaan TA. 2024

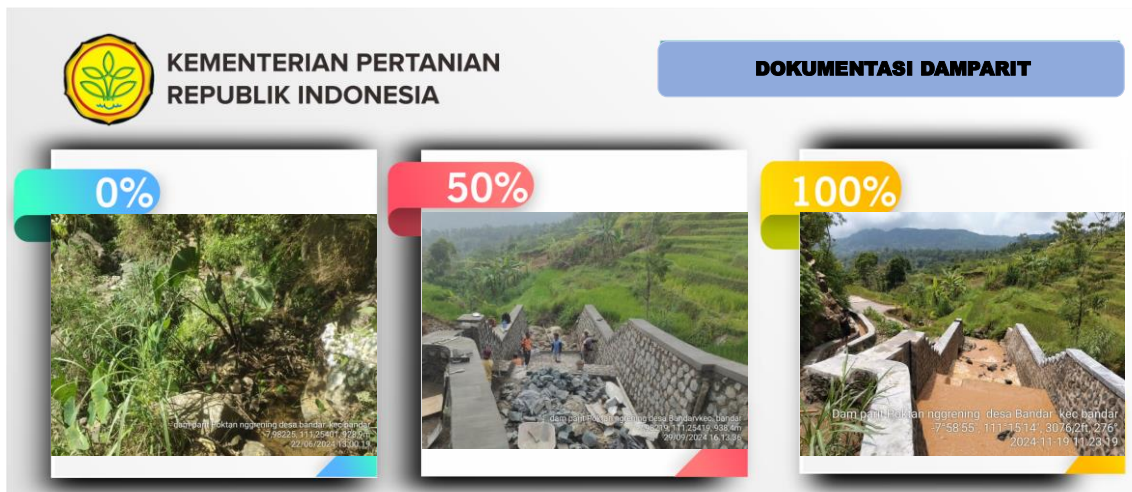




Lampiran 21. Dokumentasi Kegiatan Bangunan Konservasi Air TA. 2024



Kelompok Tani	Kelompok Tani Sri Handayani
Alamat	Desa Karangren Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

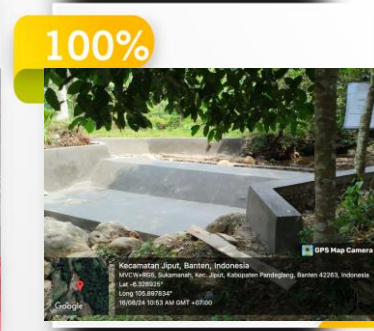
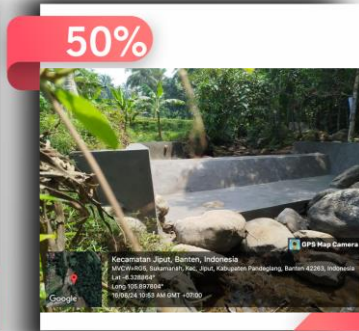
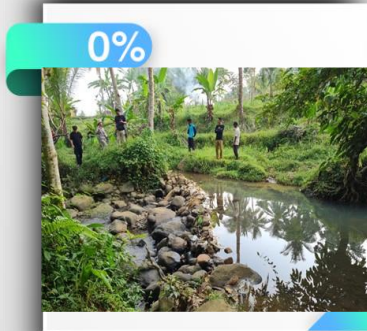


Kelompok Tani	Kelompok Tani Nggreng
Alamat	Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

DOKUMENTASI DAMPARIT

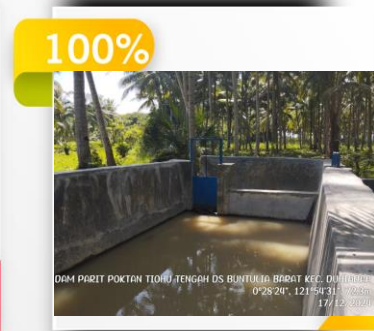
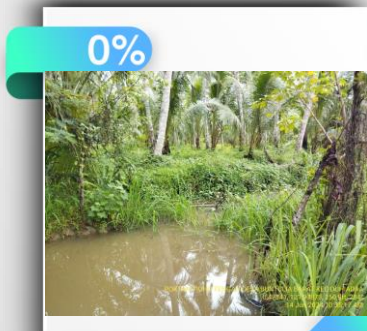


Kelompok Tani	Kelompok Tani Parered
Alamat	Desa Sukamanah Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

DOKUMENTASI DAMPARIT



Kelompok Tani	Kelompok Tani Tiohu Tengah
Alamat	Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiaada Kabupaten Pohuwato



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

DOKUMENTASI IRIGASI BERTEKANAN



Kelompok Tani	Kelompok Tani Sido Makmur
Alamat	Desa Beluk Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

DOKUMENTASI IRIGASI BERTEKANAN

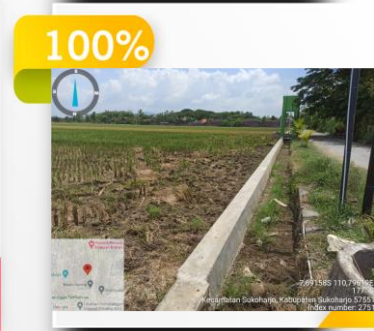
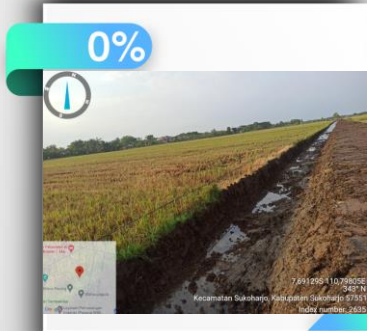


Kelompok Tani	Kelompok Tani Sido Mukti
Alamat	Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

DOKUMENTASI NORMALISASI SALURAN

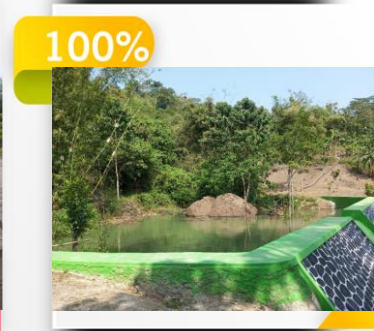
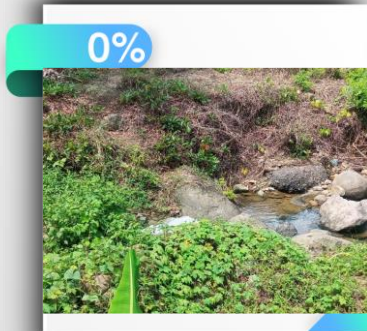


Kelompok Tani	Kelompok Tani Daya Bumi
Alamat	Desa Jurangjero Kecamatan Karanganyom Kabupaten Klaten



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

DOKUMENTASI DAMPARIT



Kelompok Tani	Kelompok Tani Pada Asih
Alamat	Desa Mekarsakti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi